



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 25
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2020

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2017;

12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020;
19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : 41.A/LHP/XXIII.SBY/03/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 5 Agustus 2020

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 36/G

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIGOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, Oleh sebab itu sebagai bentuk konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2020 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2020. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam Pasal 155 dijelaskan bahwa Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Guna melakukan integrasi terhadap RKPD dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Perubahan tersebut sebagai upaya untuk mengintegrasikan program dan kegiatan sesuai perkembangan situasi dan kondisi. Selain itu perubahan tersebut dilaksanakan untuk mengharmonisasai terhadap target dan sasaran baik yang melampaui maupun yang belum sesuai capaian.

Dalam pelaksanaannya RKPD tahun 2020 yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Madiun tahun 2019–2024, yang merupakan pelaksanaan tahun kelima dari RPJMD tersebut maka substansi penetapan prioritas memiliki nilai strategis dan penting dalam upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan dalam RPJMD. Sesuai dengan RKPD 2020 Prioritas Pembangunan Kota Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.**
- b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau.**
- c. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah.**
- d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.**
- e. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.**

Secara prinsip 5 prioritas pembangunan yang telah ditetapkan tersebut tetap menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020. Memperhatikan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2020 tersebut di atas dan evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan, saat ini secara umum sudah dilaksanakan dengan baik namun masih diperlukan penyesuaian-penyempurnaan dan penyempurnaan terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, utamanya dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dampak pandemi covid-19 tidak memungkiri akan berpengaruh pada pencapaian prioritas pembangunan daerah, khususnya peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya target-target yang mendukung prioritas diharapkan dapat tercapai, apabila dalam kondisi tertentu tidak dapat tercapai dengan anggaran yang ada karena pelaksanaan revocusing diharapkan tidak terlalu signifikan jauh dari target yang sudah ada.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2020 yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan penyusunan Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020 yang selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD).

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

- a. memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan RKPD yang ditetapkan sebelumnya.
- b. sebagai pedoman Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
- c. adanya pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/sedang berjalan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran dari asumsi RKPD.
- d. adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun anggaran 2019 yang harus digunakan untuk tahun 2020.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024;

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 / PMK.07 / 2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
28. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2812/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disea 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
30. Peraturan Walikota Madiun Noomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020;

31. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1.4. Sistematika Penulisan Dokumen

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 1.4. Sistematika Penulisan Dokumen
- 1.5. Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

- 2.1. Realisasi Anggaran APBD Tahun 2020 Sampai dengan Semester I
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2020 Sampai dengan Semester I

BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

- 3.1. Perubahan Asumsi Dasar Perubahan RKPD Tahun 2020
- 3.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
- 3.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah
- 3.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

- 5.1. Rencana Perubahan Belanja Langsung
- 5.2. Rencana Perubahan Belanja Tidak Langsung

BAB VI. Penutup

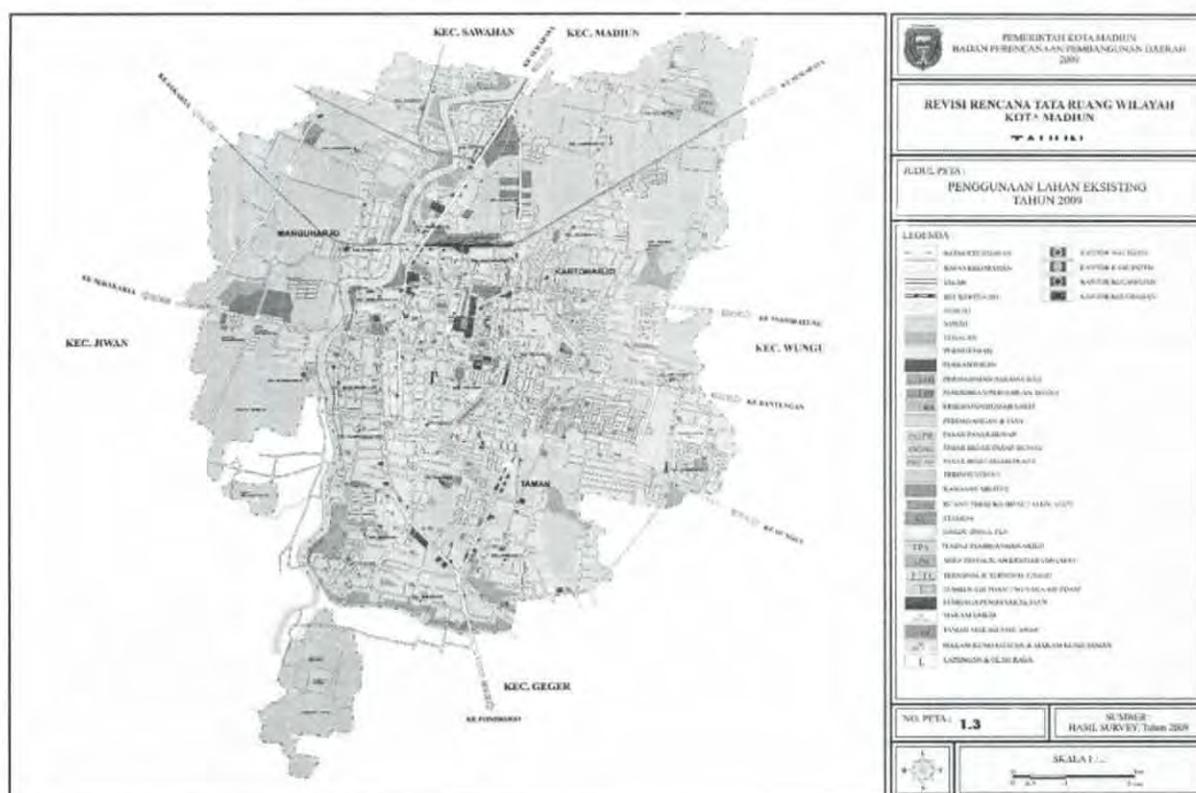
1.5. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan di Kota Madiun dan mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang utama meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek pelayanan umum, lebih lanjut analisis dari masing-masing aspek dimaksud sebagaimana uraian berikut.

1.4.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kota Madiun terletak pada koordinat $111^{\circ}0' - 112^{\circ}0'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} - 8^{\circ}$ Lintang Selatan, berada pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 63 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan ketinggian di atas permukaan laut atau daratan kecamatan Manguharjo berada pada 63 meter di atas permukaan air laut, Kecamatan Taman 67 meter di atas permukaan air laut dan Kecamatan Kartoharjo 67 di atas permukaan air laut. Rentang temperatur udara antara 20°C hingga 35°C . Rata-rata curah hujan tinggi terjadi pada bulan-bulan awal tahun dan akhir tahun, sedangkan rata-rata curah hujan rendah terjadi pada pertengahan tahun. Kota Madiun berada di tengah-tengah Kabupaten Madiun, sehingga wilayahnya berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Madiun dan Magetan, diantaranya:

1. perbatasan sebelah utara: Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun,
2. perbatasan sebelah selatan: Kecamatan Geger Kabupaten Madiun,
3. perbatasan sebelah timur: Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun,
4. perbatasan sebelah barat: Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.



Sumber: madiunkota.go.id

Gambar 1. 1.
Peta Administratif Kota Madiun

Kota Madiun mempunyai luas wilayah sebesar 33,23km² yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu meliputi Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km², Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km² dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km². Masing-masing kecamatan di Kota Madiun terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, sehingga terdapat 27 Kelurahan.

Dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 210.115 jiwa, tersebar di tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Kartoharjo 57.748 jiwa, Kecamatan Manguharjo 63.017 jiwa, dan Kecamatan Taman 89.350 jiwa.

Rincian jumlah penduduk Kota Madiun per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1.
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan
Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	Tahun/Jiwa				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kartoharjo	57.777	58.147	57.985	57.927	57.748
2	Manguharjo	62.276	62.877	62.879	62.801	63.017
3	Taman	88.195	89.013	88.945	89.069	89.350
	Total	208.248	210.037	209.809	209.797	210.115

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2020

Sementara itu, menurut tingkat pendidikan sampai dengan akhir Tahun 2019 menunjukkan bahwa penduduk terbesar Kota Madiun merupakan tamat SLTA, yaitu sebesar 73.045 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA lebih sedikit, diantaranya tamat D-I/II 498 jiwa; D-III 5.761 jiwa; S-1 29.071 jiwa; S-2 1.391 jiwa, dan S-3 35 jiwa. Secara lengkap, jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2015 s/d 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2.
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2015 s/d 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penduduk Berdasarkan Pendidikan :					
Belum Sekolah;	30.989	31.740	32.430	31.258	31.374
Tidak Tamat SD;	18.575	18.695	18.755	19.575	19.887
Tamat SD;	32.950	32.318	30.919	30.169	29.266
Tamat SLTP;	30.155	30.342	29.836	29.487	28.787
Tamat SLTA;	69.799	70.756	71.494	72.405	73.045
Tamat D-I/II;	440	439	452	468	498
Tamat D-III;	5.507	5.557	5.566	5.639	5.761
Tamat S-1;	18.608	18.929	19.065	19.431	20.071
Tamat S-2;	1.205	1.238	1.268	1.334	1.391
Tamat S-3.	20	23	24	31	35

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2020

Sedangkan jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2019 menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 3.
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2015 s/d 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan:					
a. Belum/Tidak	38.404	35.539	38.358	36.721	36.390
b. Mengurus Rumah Tangga	34.603	35.328	34.773	34.965	34.412
c. Pelajar/Mahasiswa	43.581	45.352	44.032	45.119	44.940
d. Pensiunan	6.374	6.399	6.270	6.237	6.095
e. PNS	7.379	7.396	7.204	6.992	6.826
f. TNI	1.850	1.942	1.830	1.806	1.771
g. POLRI	1.048	1.057	1.039	1.040	1.027
h. Jasa	8.608	9.105	8.951	8.449	8.449
i. Karyawan	42.126	43.735	43.557	44.679	46.311
j. Buruh	5.082	4.690	4.578	4.489	4.390
k. Wiraswasta	18.727	19.060	18.826	18.945	18.994
l. Lain-lain	466	434	391	355	510

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2020

1.4.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada Tahun 2015 s/d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 4.
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2019 (Rp. Milyar)

Tahun	PDRB		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2015	10.192,08	8.455,44	6,15
2016	11.184,10	8.954,69	5,90
2017	12.111,90	9.486,12	5,93
2018	13.129,87	10.051,71	5,96
2019*	14.108,33	10.623,82	5,69

Sumber: BPS KotaMadiun, Tahun2020

*) angka sangat sementara

a. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat diukur dengan persentase tahapan keluarga sejahtera. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 kategori tahapan yaitu: Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus.

Tabel 1. 5.
Total Pra KS, KS-I, KS-II, KS-III, dan KS III Plus Kota MadiunTahun 2015 - 2019

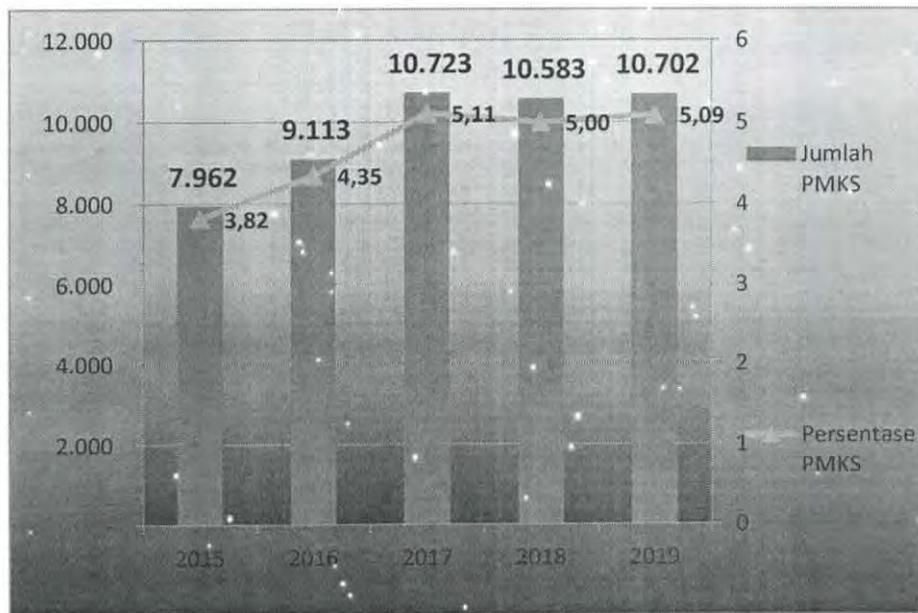
KATEGORI	TAHUN									
	2015		2016		2017		2018		2019	
PRA KS	332	0,63%	198	0,37%	190	0,36%	120	0,23%	88	0,17%
KS-I	7.643	14,52%	7.710	14,57%	5.328	10,11%	6.806	12,99%	6.115	11,63%
KS-II	17.759	33,73%	20.121	38,03%	24.502	46,47%	21.322	40,70%	22.001	41,84%
KS-III	23.815	45,24%	21.692	41,00%	18.162	34,45%	19.122	36,50%	19.231	36,57%
KS-III Plus	3.096	5,88%	3.183	6,02%	4.541	8,61%	5021	9,58%	5151	9,80%
JUMLAH	52.645	100,00%	52.904	100,00%	52.723	100,00%	52.391	100,00%	52.586	100,00%

Sumber :Dinas Kesehatan dan KBKotaMadiunTahun 2020

Prosentase Pra KS dan KS-1 ada perubahan Tahun 2018 sebesar 13,22 % atau jumlahnya 6.926 keluarga, sedangkan tahun 2019 jumlahnya 6.203 keluarga mengalami penurunan 723 keluarga atau 1,42% hal ini menunjukkan perubahan ada kenaikan sedikit dalam kesejahteraan. Prosentase Keluarga Sejahtera II , III dan III Plus mengalami kenaikan 1,42% (918 KK) yaitu tahun 2018 jumlahnya 45.465 menjadi 46.383 pada tahun 2019, yang artinya perbaikan ekonomi atau kesejahteraan keluarga mengalami kenaikan sedikit.

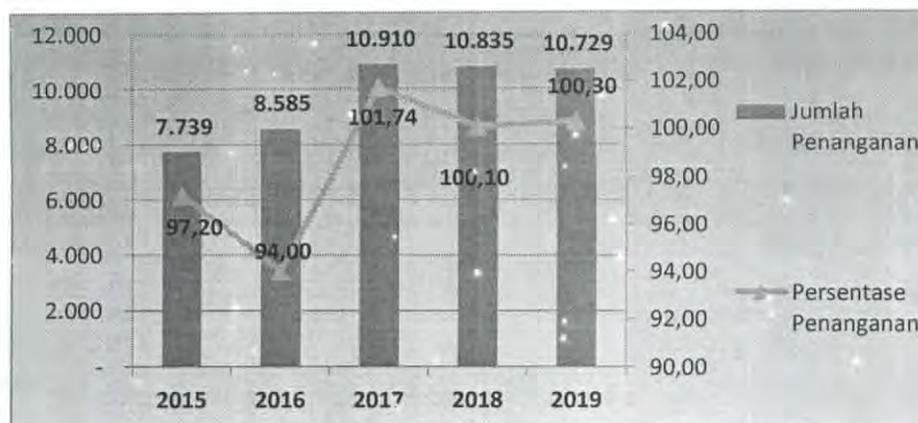
Kondisi kesejahteraan keluarga di Kota Madiun sampai dengan akhir Tahun 2019 menunjukkan perkembangan yang sangat baik dari tahun-tahun sebelumnya. Keluarga di Kota Madiun secara umum termasuk kategori Keluarga Sejahtera II dan III serta III Plus sebanyak 46.383 keluarga atau 88,20 % dari jumlah KK 52.586, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 86,78% dari jumlah KK 52.391.

Selain indikator Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus, indikator kesejahteraan sosial juga dapat dilihat dengan persentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indikator ini membandingkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jumlah penduduk Kota Madiun. Indikator ini juga menunjukkan komitmen pemerintah Kota Madiun dalam upaya mengentaskan komunitas masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program-program kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial.



Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Tahun 2020

Gambar 1.2.
Jumlah PMKS dan Persentase PMKS Kota Madiun
Tahun 2015 - 2019



Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Tahun 2020

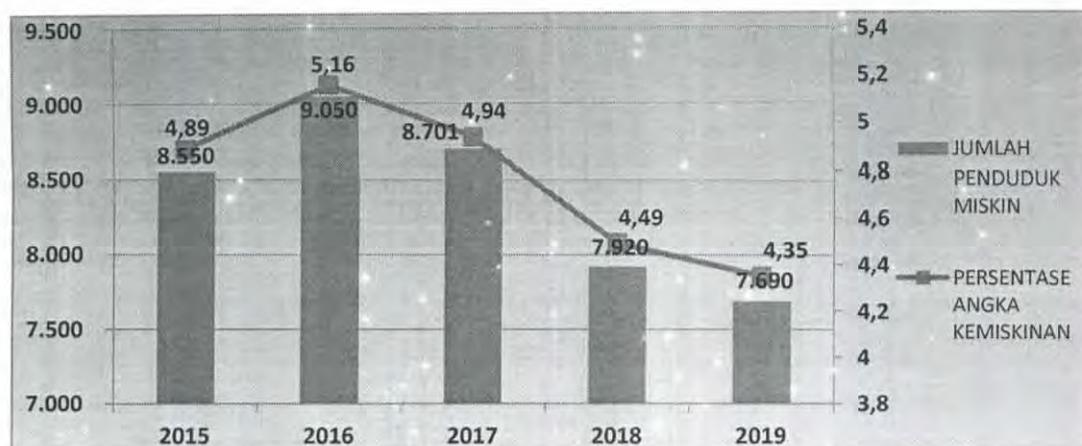
Gambar 1.3.
Jumlah Penanganan PMKS dan Persentase Penanganan PMKS Kota Madiun Tahun 2015 – 2019

Jumlah PMKS mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena adanya Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui bahwa terjadi penambahan PMKS, yang mana jumlah jenis PMKS yang sebelumnya hanya sebanyak 22 jenis, bertambah menjadi 26 jenis PMKS.

Sesuai dengan instruksi pada Peraturan Menteri Sosial tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan dan pengelompokan kembali jenis-jenis PMKS, untuk diupdate data jumlah PMKS secara keseluruhan. Sehingga pada tabel di atas terlihat ada kenaikan jumlah PMKS.

Pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 jumlah PMKS yang terdata mengalami penambahan sebanyak 3.278 orang atau sebesar 5,11% dari jumlah penduduk, akan tetapi jumlah PMKS yang meningkat tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah yang tertangani secara signifikan, dengan capaian 100,30% di tahun 2019 dengan intervensi program dan kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial.

Berkaitan dengan Tingkat Kemiskinan Kota Madiun mengalami tren yang fluktuatif karena Tahun 2015 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan, pada Tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan yang signifikan bahkan sampai dengan 2019 terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan program-program pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan sudah berjalan walaupun belum maksimal yang tentu memerlukan penyempurnaan lagi.



Sumber :BPS Kota Madiun, Tahun 2020

Gambar 1.4
Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2015 sampai dengan 2019

b. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Indikator-indikator pengukur kemajuan seni, budaya dan olahraga diantaranya adalah keikutsertaan dan prestasi dalam event regional dan nasional, jumlah event/ kegiatan budaya, jumlah pembinaan generasi muda, dan jumlah prestasi olahraga. Keikutsertaan dan prestasi dalam event Regional dan Nasional Tahun 2019 di bidang olahraga meningkat signifikan dibandingkan tahun 2018, yaitu 50 prestasi di bidang olahraga sedangkan pada tahun 2018 prestasinya 33 sedangkan di bidang kebudayaan terjadi sedikit penurunan juga pada tahun 2018 sebanyak 12 even sedangkan tahun 2019 sebanyak 8 even.

Tabel 1. 6.
Prestasi Olahraga dan Kebudayaan
Kota Madiun Tahun 2015 - 2019

KETERANGAN	2015	2016	2017	2018	2019
PRESTASI KEOLAHRAGAAN	6	7	8	33	50
PRESTASIKEBUDAYAAN	6	2	10	12	8

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun, Tahun 2020

Dengan rincian untuk prestasi olahraga sebagai berikut :
Prestasi Olahraga selama Tahun 2019 meraih sebanyak 50 medali diantaranya :

Kejuaraan PORPROV JATIM :

- a. 2 medali perunggu cabang olahraga angkat besi
- b. 1 medali perunggu cabang olahraga atletik (lompat jauh)
- c. 1 medali perunggu cabang olahraga billiard
- d. 1 medali emas cabang olahraga gulat
- e. 2 medali perunggu cabang olahraga gulat

- f. 4 medali perunggu cabang olahraga judo
- g. 1 medali perunggu cabang olahraga karate
- h. 1 medali perak cabang olahraga karate
- i. 4 medali perunggu cabang olahraga muathay
- j. 1 medali perak cabang olahraga muathay
- k. 2 medali emas cabang olahraga muathay
- l. 1 medali perak cabang olahraga renang
- m. 1 medali perunggu cabang olahraga senam
- n. 3 medali perunggu cabang olahraga taekwondo
- o. 2 medali perak cabang olahraga tenis meja
- p. 1 medali perunggu cabang olahraga tenis meja
- q. 1 medali perak cabang olahraga tinju
- r. 7 medali emas cabang olahraga jujitsu
- s. 2 medali perak cabang olahraga jujitsu
- t. 5 medali perunggu cabang olahraga jujitsu
- u. 1 medali perak cabang olahraga judo beregu
- v. 1 medali perunggu cabang olahraga tenis meja beregu

Kejuaraan diluar PORPROV JATIM 2019:

- a. 2 medali emas cabang olahraga atletik
- b. 2 medali emas cabang olahraga sepak takraw
- c. 1 medali emas cabang olahraga pencak silat

Prestasi Seni Budaya selama Tahun 2019 sebanyak 8 kejuaraan

- a. Juara 1 Dalang Mumpuni Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional
- b. Juara Penyaji Catur Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional
- c. Juara 1 Dalang Mumpuni Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
- d. Juara Penyaji Sabet Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
- e. Juara Penyaji Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
- f. Juara Penyaji Catur Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Provinsi Jawa Timur
- g. Juara 3 Lomba Baca Puisi Pekan Seni Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Timur
- h. Juara 3 Lomba Teater Pekan Seni Pelajar Tingkat Provinsi Jawa Timur

1.4.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator aspek daya saing daerah adalah sebagai berikut.

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB (baik ADHB maupun ADHK). Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2019

*) angka sementara

Gambar 1. 5.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun
Tahun 2015 s/d 2019 (%)

Untuk laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2015 s/d 2019 Kota Madiun adalah sebagai berikut.

Tabel 1.7.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2015 s/d 2019

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,58	1,31	-1,78	1,78	-0,94
2	Pertambangan dan Penggalian	1,98	1,91	2,31	1,07	2,41

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019*)
3	Industri Pengolahan	6,49	7,21	8	7,01	4,64
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,28	3,86	4,91	5,45	6,69
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	2,58	3,82	6,84	4,44	4,52
6	Konstruksi	5,48	4,44	5,57	2,03	4,90
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	4,48	5,11	5,83	7,54	6,20
8	Transportasi dan Pergudangan	6,78	7,13	8,18	8,48	9,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,28	7,3	7,47	9,23	8,86
10	Informasi dan Komuniasi	8,13	6,64	6,77	5,34	4,58
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,52	7,11	3,88	4,08	4,79
12	Real Estate	6,76	5,64	4,22	3,57	5,96
13	Jasa Perusahaan	8,41	5,94	6,34	5,31	6,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,88	3,05	2,46	4,48	3,85
15	Jasa Pendidikan	6,3	5,14	4,5	4,21	7,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,35	5,85	5,93	7,38	7,52
17	Jasa Lainnya	4,28	4,17	4,14	5,74	6,92
PDRB		6,15	5,9	5,93	5,96	5,69

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

*) angka sangat sementara

PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 s/d 2019 Kota Madiun adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 8.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 s/d 2019
(Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	98,02	102,29	100,96	105,67	106,81
2	Pertambangan dan Penggalian	2,48	2,62	2,73	2,91	3,05
3	Industri Pengolahan	1.637,08	1.807,89	1.983,44	2.143,80	2.290,02
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,78	8,39	9,52	10,35	11,22
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	22,65	24,46	26,74	28,51	29,04
6	Konstruksi	664,08	718,12	767,94	805,27	834,71
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	2.529,95	2.791,97	3.031,46	3.371,83	3.658,65
8	Transportasi dan	321,17	360,09	407,73	449,97	498,89

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019*)
	Pergudangan					
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	464,84	523,63	574,36	636,99	705,63
10	Informasi dan Komuniasi	1.393,96	1.524,59	1.660,03	1.752,67	1.851,67
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.056,63	1.177,74	1.259,76	1.355,51	1.432,48
12	Real Estate	274,01	297,82	318,81	344,40	374,20
13	Jasa Perusahaan	69,26	75,73	82,45	90,30	98,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	329,41	350,21	366,76	401,37	438,16
15	Jasa Pendidikan	803,00	862,99	923,49	978,13	1.067,46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	131,10	141,94	155,98	172,62	189,69
17	Jasa Lainnya	386,66	413,64	439,72	479,56	518,48
	PDRB	10.192,08	11.184,11	12.111,90	13.129,88	14.108,32

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

*) angka sementara

PDRB atas dasar harga konstan pada Tahun 2015 s/d 2019 Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 9.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015 s/d 2019
(Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	75,39	76,37	75,02	76,35	75,63
2	Pertambangan dan Penggalian	2,04	2,08	2,13	2,15	2,20
3	Industri Pengolahan	1.448,90	1.553,36	1.677,59	1.795,19	1.878,54
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,02	7,30	7,65	8,07	8,61
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	18,38	19,08	20,39	21,29	22,26
6	Konstruksi	548,47	572,82	604,75	616,99	647,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	1.979,78	2.080,95	2.202,18	2.368,25	2.515,13
8	Transportasi dan Pergudangan	242,76	260,07	281,35	305,21	330,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	407,81	437,59	470,29	513,72	559,24
10	Informasi dan Komuniasi	1.332,55	1.421,03	1.517,25	1.598,22	1.671,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	780,75	836,28	868,72	904,19	947,54
12	Real Estate	217,68	229,96	239,67	248,22	263,02
13	Jasa Perusahaan	61,46	65,10	69,23	72,91	77,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	281,38	289,96	297,09	310,42	322,38

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019*)
15	Jasa Pendidikan	623,55	655,60	685,13	714,00	768,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107,79	114,10	120,87	129,79	139,55
17	Jasa Lainnya	319,71	333,04	346,82	366,76	392,10
PDRB		8.455,44	8.954,70	9.486,14	10.051,71	10.623,81

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

*) Angka Sementara

Sedangkan atas dasar harga konstan peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 10.
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 s/d 2019 (%)

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,96	0,91	0,83	0,80	0,76
2	Pertambangan dan Pengalihan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3	Industri Pengolahan	16,06	16,16	16,38	16,33	16,23
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21
6	Konstruksi	6,52	6,42	6,34	6,13	5,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	24,82	24,96	25,03	25,68	25,93
8	Transportasi dan Pergudangan	3,15	3,22	3,37	3,43	3,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,56	4,68	4,74	4,85	4,98
10	Informasi dan Komunikasi	13,68	13,63	13,71	13,35	13,12
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,37	10,53	10,40	10,32	10,15
12	Real Estate	2,69	2,66	2,63	2,62	2,65
13	Jasa Perusahaan	0,68	0,68	0,68	0,69	0,70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,23	3,13	3,03	3,06	3,11
15	Jasa Pendidikan	7,88	7,72	7,62	7,45	7,57
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,27	1,29	1,31	1,34
17	Jasa Lainnya	3,79	3,70	3,63	3,65	3,68
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

*) angka sementara

PDRB perkapita menurut lapangan usaha sebagai berikut :

Tabel 1. 11.
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp.)Tahun 2015 s/d 2019

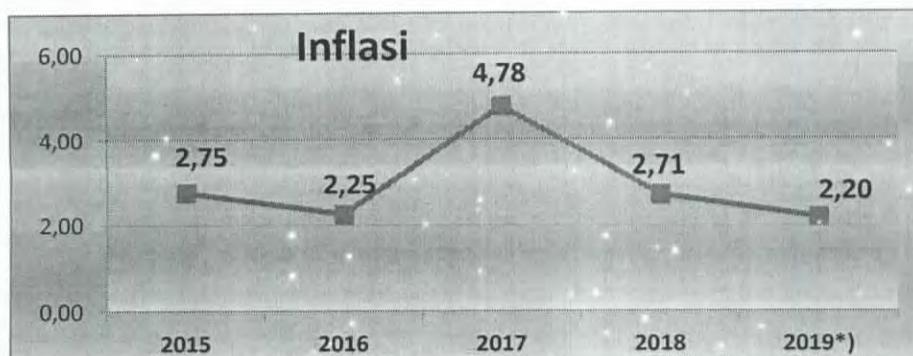
No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,56	0,58	0,57	0,60	0,60
2	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
3	Industri Pengolahan	9,35	10,29	11,31	12,11	12,94
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16
6	Konstruksi	3,79	4,09	4,36	4,55	4,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	14,46	18,90	17,33	19,05	20,67
8	Transportasi dan Pergudangan	1,84	2,05	2,32	2,54	2,82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,66	2,98	3,26	3,60	3,99
10	Informasi dan Komunikasi	7,97	8,68	9,43	9,90	10,46
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,04	6,71	7,15	7,66	8,09
12	Real Estate	1,57	1,70	1,81	1,95	2,11
13	Jasa Perusahaan	0,40	0,43	0,47	0,51	0,55
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,88	1,99	2,08	2,27	2,48
15	Jasa Pendidikan	4,59	4,91	5,24	5,53	6,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,75	0,81	0,89	0,98	1,07
17	Jasa Lainnya	2,21	2,36	2,50	2,71	2,93
PDRB Per Kapita		58,24	63,69	68,89	74,54	79,70

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2019

*) angka sementara

Di Kota Madiun lapangan usaha yang dominan diantaranya Perdagangan Besar dan Eceran yang menduduki tingkat pertama sebesar 20,67 juta dalam PDRB per Kapita menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2019 seperti terlihat pada tabel diatas.

Di Kota Madiun tingkat inflasi cenderung stabil. Lebih detail, inflasi di Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut.

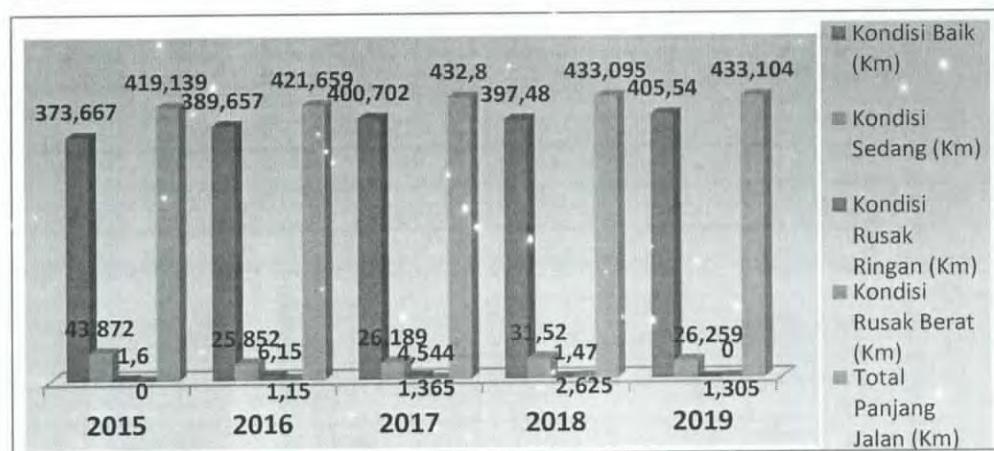


Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

Gambar 1. 6.
Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2019 (%)

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Perkembangan fasilitas wilayah/infrastruktur daerah salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan jalan dan kondisi jalan. Jalan yang ada di Kota Madiun terdiri dari jalan negara dan jalan kota.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, Tahun 2020

Gambar 1. 7.
Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kota Madiun diarahkan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dan perindustrian dalam rangka menunjang sasaran meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap PDRB di Kota Madiun. Penyelenggaraan kegiatan urusan penanaman modal (investasi) di Kota Madiun saat ini masih berada dalam Dinas Penanaman Modal, PTSP dan KUMK. Perkembangan realisasi investasi di Kota Madiun mulai 2015 – 2019 sebagai berikut.

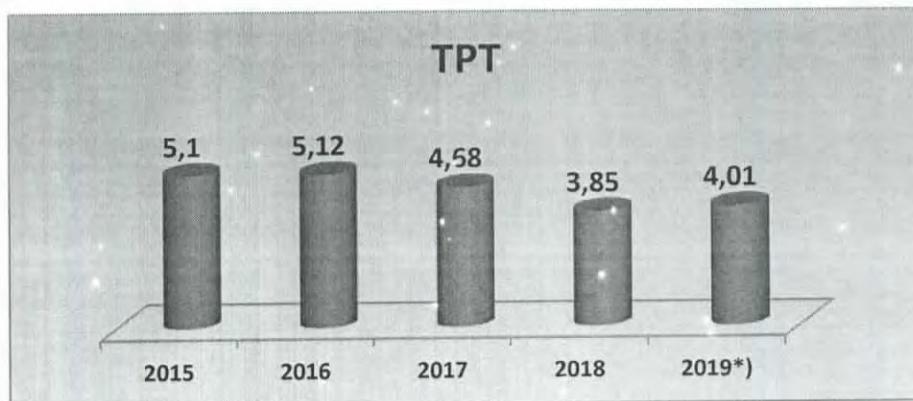


Sumber: DPMPTSPKUM, Tahun 2020

Gambar 1. 8.
Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2014 – 2018

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian tingkat pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

Gambar 1. 9.
Tren Tingkat pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2015 – 2019

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 1. 12.
Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2019

Indeks	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
IPM	79,48	80,01	80,13	80,33	80,88
Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Umur Harapan Hidup	72,41	72,44	72,48	72,59	72,75
Indeks Pengetahuan	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77
Harapan Lama Sekolah	14,06	14,19	14,20	14,21	14,39
Rata-rata Lama Sekolah	11,08	11,09	11,10	11,11	11,13
Indeks Pengeluaran	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83
Pengeluaran per kapita (000 Rp)	14.723	15,300	15.415	15,616	16,040

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

IPM Kota Madiun pada Tahun 2019 mencapai 80,88 atau naik sebesar 0,55 poin dibanding Tahun 2018 yang mencapai 80,33. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Kota Madiun masuk daerah dengan IPM sangat tinggi karena lebih dari 80.

1.4.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum daerah adalah kemampuan daerah agar terselenggaranya pelayanan guna memenuhi kepentingan umum melalui cara-cara yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani. Aspek pelayanan daerah terdiri dari pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perizinan.

a. Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang anggarannya sudah diamanatkan dalam Undang-undang sebesar 20 persen dari APBD, dalam penerimaan sekolah pada tahun 2019 ini sistem zonasi sesuai domisili merupakan pilihan yang diambil untuk menyeimbangkan tingkat pendidikan setiap zonasi agar tidak adanya perspektif sekolah unggulan dan sekolah favorit, untuk mendukung program zonasi tersebut kota madiun sudah memetakan jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik yang dapat di lihat sebagaimana tabel 2.13 dan tabel 2.14 dibawah.

Tabel 1. 13.
Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan, 2019

No.	Uraian	Kecamatan		
		Kartoharjo	Manguharjo	Taman
PAUD				
1.	Bangunan PAUD (unit)	26	21	29
2.	Peserta PAUD	646	595	730
3.	Tenaga Pendidik	120	116	139
TK				
1.	Jumlah Siswa (Orang)	1.603	1.498	2.123
2.	Jumlah TK Bangunan Baik (Unit)	32	24	38

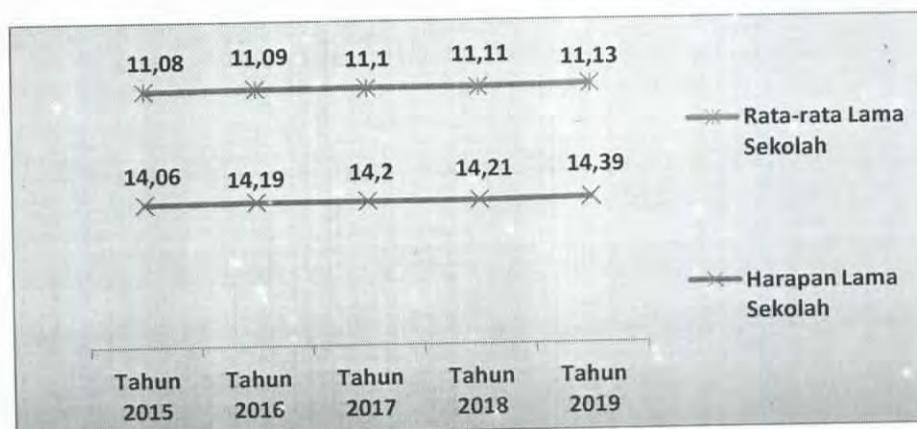
Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2020

Tabel 1. 14.
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun, 2019

Jenjang Pendidikan	Kecamatan			Jumlah
	Mangunharjo	Taman	Kartoharjo	
Sekolah Dasar (SD)	20	25	23	68
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	7	6	3	16
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11	9	3	23
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	2	1	4

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2020

Meningkatnya angka HLS dan RLS yang merupakan indikator dimensi pengetahuan pada IPM, menunjukkan bahwa pembangunan manusia di sisi pendidikan perlahan mengalami kemajuan di Kota Madiun. Sebagaimana dilihat pada Gambar II.10, selama periode tahun 2015 hingga tahun 2019, harapan lama sekolah di Kota Madiun telah meningkat dari 14,06 tahun (2015) menjadi 14,39 tahun (2019) atau naik sebesar 0,33 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 11,08 (tahun 2015) menjadi 11,13 tahun (2019) atau naik 0,05 tahun.



Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

Gambar 1. 10.
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun 2015-2019 (tahun)

Angka HLS rata-rata tumbuh sebesar 6,6 persen per tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2019, harapan lama sekolah di Kota Madiun telah mencapai 14,39 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D3.

Pada periode yang sama, rata-rata lama sekolah di Kota Madiun tumbuh 1 persen per tahun. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan.

RLS Kota Madiun tahun 2019 mencapai 11,13 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kota Madiun usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas XI (SMA Kelas 2).

b. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar selain pendidikan. Jumlah puskesmas, jumlah rumah sakit, jumlah dokter serta tenaga kesehatan yang memadai dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat untuk menjaga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Persebaran jumlah rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel 2.15, 2.16 dan 2.17 dibawah ini.

Tabel 1. 15
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2019

Tahun	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk
2015	0,12
2016	0,11
2017	0,11
2018	0,11
2019*	0,11

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB, Tahun 2020

Tabel 1. 16.
Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2019

Tahun	Dokter	Tenaga Kesehatan Lainnya
2015	112,85	770,72
2016	103,32	719,87
2017	151,09	996,14
2018	136,40	907,13
2019	138,02	1.043,71

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB, Tahun 2020

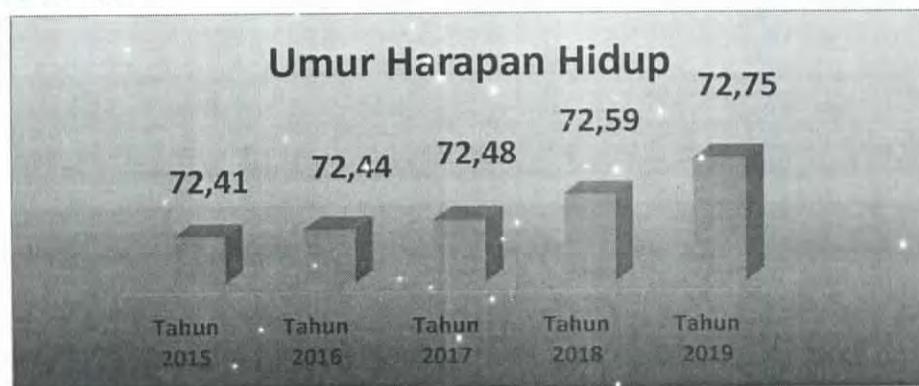
Tabel 1. 17.
Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2019

Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk
2015	8	208.248	0,0384
2016	8	210.037	0,0381
2017	8	209.809	0,0383
2018	8	209.672	0,0383
2019*	8	210.115	0,0383

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB, Tahun 2020

Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh umur harapan hidup saat lahir di Kota Madiun terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana terlihat pada Gambar II.11, selama periode tahun 2015 hingga tahun 2019, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,41 tahun (2015) menjadi 72,75 tahun (2019) atau naik sebesar 0,34 tahun.

Dalam kurun waktu tersebut, secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 6,8 persen per tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kota Madiun. Masyarakat semakin menikmati pembangunan di bidang kesehatan.



Sumber: BPS KotaMadiun, Tahun 2020

Gambar 1.11.
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Madiun 2015-2019 (tahun)

c. Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2018 sampai dengan 2019 dilakukan dalam rangka mencapai beberapa sasaran pemenuhan kebutuhan. Adapun perkembangan pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 24.

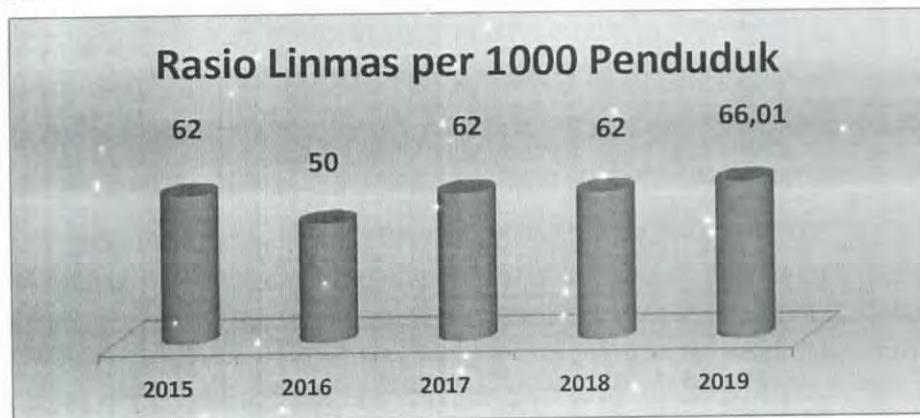
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 – 2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINEPJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN	
		TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	2	3	4
II	ASPEK PELAYANAN UMUM		
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
4.1	Rasio rumah layak huni	99,65	99,95
4.2	Rasio pemukiman layak huni	100	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

d. Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

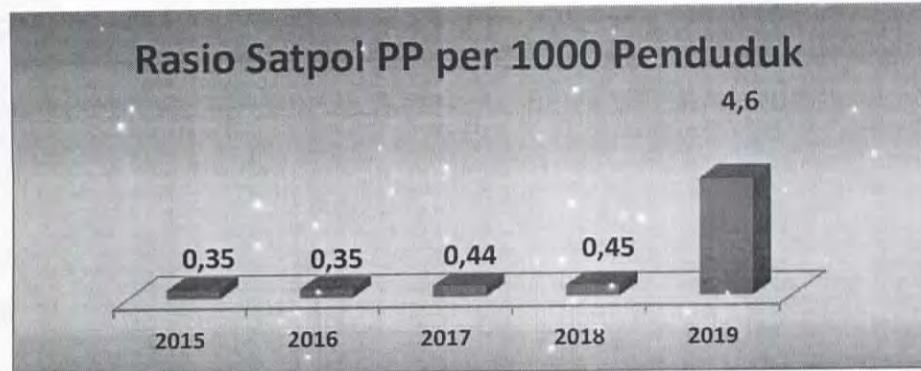
Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang di amanatkan dalam undang-undang, cakupan petugas satpol pp dan linmas sangat berpengaruh dalam terciptanya suasana tertib dan tentram dalam masyarakat, saat ini pemerintah kota madiun akan mamperkecil rasio petugas dan jumlah penduduk dengan mengagendakan perekrutan petugas satpol pp per kelurahan. Untuk mengetahui besar cakupan petugas tahun 2019 satpol pp dan linmas dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada gambar 2.10 dan 2.11 di bawah ini



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2020

Gambar 1. 12.

Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Madiun,



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2020

Gambar 1. 13.

Rasio Petugas Pol PP per 10.000 Penduduk di Kota Madiun,

e. Pelayanan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel II. 25

Perkembangan Kinerja Pembangunan DaerahAspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Sosial Tahun 2018- 2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN	
		TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	2	3	4
II ASPEK PELAYANAN UMUM			
A Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar			
6 Sosial			
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	16	16
6.2	Jumlah Penerima Bantuan	12936	10.612
6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	10594	10.573
6.4	Persentase PMKS yang tertangani	100,1	100,30%
6.5	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	12936	10.612
6.6	Angka Kemiskinan	4,49	4,35
6.7	Indeks Gini	0,34	0,33

Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun

f. Pelayanan Perizinan

Tahun 2019 lama pengurusan perizinan sudah sangat efektif dan tidak berbelit-belit, hal ini dapat dilihat sesuai tabel dibawah terkecuali untuk perizinan yang melibatkan beberapa rekomendasi dari berbagai instansi dikarenakan harus ada survei lapangan.

Tabel 1. 18
Lama Proses Perizinan di Kota Madiun, 2019

No.	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Pengurusan (Rp)
1	Izin Reklame Permanen	5 (lima)	6 (enam)	Tidak Ada
2	Izin Reklame Insidentil	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
3	Izin Operasional Puskesmas	5 (lima)	9 (sembilan)	Tidak Ada
4	Izin Penyelenggaraan Optikal (SIPO)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
5	Izin Apotik	Perizinan diproses melalui sistem nasional (oss.go.id)		
6	Izin Operasional Klinik			
7	Izin Operasional Lab Klinik			
8	Izin Unit Transfusi Darah/ Bank Darah	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
9	Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
10	Izin Praktik Perawat (SIPP)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
11	Izin Kerja Perawat (SIKP)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
12	Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
13	Izin Praktik Bidan (SIPB/SIKB)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
14	Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
15	Izin Kerja Refraksi Optisien (SIKRO)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
16	Izin Praktik Radiografer (SIPRad)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
17	Izin Praktek Apoteker (SIPA)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
18	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
19	Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
20	Izin Kerja Terapis Wicara	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
21	Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
22	Izin Kerja Okupasi Terapis	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
23	Izin Praktek Tenaga Sanitarian (SIPTS)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
24	Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
25	Izin Praktik Akupunturis	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
26	Izin Kerja Akupunturis	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
27	Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
28	Izin Kerja Teknisi Kardiovaskuler	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
29	Izin Kerja Optometris	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
30	Izin Kerja Teknisi Gigi	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
31	Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIK ATLM)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
32	Izin Praktik Elektromedis (SIP E)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
33	Izin Kerja Ortotis Prostetis (SIKOP)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
34	Izin Praktik Ortotis Prostetis	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
35	Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
36	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
37	Izin Tukang Gigi	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
38	Izin Praktik Dokter Hewan	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
39	Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)	5 (lima)	8 (delapan)	Tidak Ada
40	Izin Klinik Hewan	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
41	Izin Rumah Sakit Hewan	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada

No.	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Pengurusan (Rp)
42	Izin Rumah Sakit Hewan Khusus	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
43	Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner	5 (lima)	7 (tujuh)	Tidak Ada
44	Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing	5 (lima)	7 (tujuh)	Tidak Ada
45	Izin Penempatan Pedagang Pasar	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
46	Izin Promosi Dalam Pasar	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
47	Izin Reklame Dalam Pasar	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
48	Izin Pengelolaan Parkir Dalam Pasar	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
49	Izin Pengelolaan Kamar Mandi/WC Dalam Pasar	5 (lima)	4 (empat)	Tidak Ada
50	Izin Mendirikan Rumah Sakit			
51	Izin Operasional Rumah Sakit			
52	Izin Toko Obat			
53	Izin Toko Alat Kesehatan			
54	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
55	Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT			
56	Izin Lingkungan Amdal	5 (lima)	10 (sepuluh)	Tidak Ada
57	Izin Lingkungan UKL UPL	5 (lima)	10 (sepuluh)	Tidak Ada
58	Izin TPS Limbah B3	5 (lima)	7 (tujuh)	Tidak Ada
59	Izin Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah (Aset)	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
60	Izin Sewa Wales	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
61	Izin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk terop di jalan golongan A dan B	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
62	Izin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk keperluan jalan keluar masuk ke perusahaan dan industri	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
63	Izin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk penimbunan barang, bahan bangunan dan bekas bongkaran di jalan golongan A dan B	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
64	Izin Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk usaha atau industri beserta halamannya di jalan golongan A, B dan C	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
65	Izin Pemakaian Lahan Sumber Umis	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
66	Izin Sewa Jasa Pemakaian GOR, Stadion Willis dan Wisma Haji	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada
67	Izin Sewa Kios Ex Bengkok Kelurahan Pilangbango	5 (lima)	3 (tiga)	Tidak Ada

Sumber: DPMPTSPKUM, Tahun 2020

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD

Pemerintah Kota Madiun sudah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2020, dan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2020. Program dan kegiatan yang ada di APBD yang mendapat anggaran dan dilaksanakan, hal ini berarti tidak semua program dan kegiatan yang ada di RKPD dilaksanakan karena keterbatasan anggaran maka hanya program dan kegiatan yang prioritas yang mendapatkan anggaran dan bisa dilaksanakan.

2.1 Realisasi Anggaran APBD Tahun 2020 Sampai Dengan Semester I

Realisasi Anggaran pelaksanaan APBD tahun 2020 sampai dengan triwulan kedua adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020
Sampai Dengan 30 Juni 2020

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	LEBIH/KURANG	
				RP	%
1	2	3	4	5	6
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	235.504.941.000,00	122.156.196.344,82	113.348.744.655,18	48,13%
1.1.1.	Pajak Daerah	85.000.000.000,00	40.180.366.786,31	44.819.633.213,69	52,73%
1.1.2.	Retribusi Daerah	18.762.439.600,00	3.267.658.906,00	15.494.780.694,00	82,58%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.934.446.400,00	12.374.690.254,40	2.559.756.145,60	17,14%
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	116.808.055.000,00	66.333.480.398,11	50.474.574.601,89	43,21%
1.2.	Dana Perimbangan	671.425.330.000,00	321.481.715.827,00	349.943.614.173,00	52,12%
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	53.444.752.000,00	37.395.647.914,00	16.049.104.086,00	30,03%
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	527.916.797.000,00	249.092.260.000,00	278.824.537.000,00	52,82%
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	76.136.504.000,00	34.993.807.913,00	41.142.696.087,00	54,04%
1.2.4.	Dana Bagi Hasil Cukai	13.927.277.000,00	0,00	13.927.277.000,00	100,00%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	149.976.033.000,00	25.031.085.326,00	124.944.947.674,00	83,31%
1.3.1.	Pendapatan Hibah	19.399.600.000,00	0,00	19.399.600.000,00	100,00%
1.3.2.	Pendapatan Darurat	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	64.366.614.000,00	24.014.006.326,00	40.352.607.674,00	62,69%

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	
		2020	2020	RP	%
1	2	3	4	5	6
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	65.095.240.000,00	0,00	65.095.240.000,00	100,00%
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.114.579.000,00	1.017.079.000,00	97.500.000,00	8,75%
	Jumlah Pendapatan	1.056.906.304.000,00	468.668.997.497,82	588.237.306.502,18	55,66%
2.	BELANJA DAERAH				
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	464.944.240.577,00	184.107.817.801,00	280.836.422.776,00	60,40%
2.1.1.	Belanja Pegawai	424.570.731.577,00	175.260.721.994,00	249.310.009.583,00	58,72%
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.	Belanja Hibah	14.862.390.000,00	4.973.307.807,00	9.889.082.193,00	66,54%
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	21.248.848.000,00	3.873.788.000,00	17.375.060.000,00	81,77%
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik	700.062.000,00	0,00	700.062.000,00	100,00%
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	3.562.209.000,00	0,00	3.562.209.000,00	100,00%
2.2.	BELANJA LANGSUNG	813.218.478.628,00	195.000.090.450,97	618.218.388.177,03	76,02%
2.2.1.	Belanja Pegawai	86.782.637.920,00	21.563.789.494,00	65.218.848.426,00	75,15%
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.432.411.684,00	127.893.304.011,85	312.539.107.672,15	70,96%
2.2.3.	Belanja Modal	286.003.429.024,00	45.542.996.945,12	240.460.432.078,88	84,08%
	JUMLAH BELANJA	1.278.162.719.205,00	379.107.908.251,97	899.054.810.953,03	70,34%
	SURPLUS / (DEFISIT)	-221.256.415.205,00	89.561.089.245,85	-270.121.249.494,13	122,09%
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	221.256.415.205,00	300.000,00	221.256.115.205,00	100,00%
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	221.256.415.205,00	0,00	221.256.415.205,00	100,00%
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	300.000,00	-300.000,00	
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	LEBIH/KURANG	
				RP	%
1	2	3	4	5	6
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO	221.256.415.205,00	300.000,00	221.256.115.205,00	100,00%
3	SILPA Tahun Berjalan	0,00	89.561.389.245,85	-89.561.389.245,85	

Sumber: BPKAD Kota Madiun

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2020 Sampai Dengan Semester I

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengusulkan perubahan anggaran diinformasikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 (yang mendapat anggaran di APBD Tahun 2020) sebagai berikut :

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP					
1	102	10202	18	89.84	17.100.000	0	0	89.94	3.941.300	0	3.052.364	3.787.779	#DIV/0!	10%	0%	3.787.779	0%	2%								
				96		0	0	96		0	366.566	0%	3%	0	366.566	0%	2,54%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota								
			1	16	15.725.000	0	-	15	3.666.300	6	3.001.098	0	38.535	0%	8%	0	38.535	0%	1,54%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota						
			3	100	1.375.000	0	-	20	275.000	5	51.265	0	3.302.678	0%	13%	0	3.382.678	0%	2,03%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota						
1	2											19.295.602	#DIV/0!	25%	0%	19.295.602	0%	4%								
1	102	10201	18	89.84	153.303.836	0	0	89.84	31.405.395	0	20.321.192	5.897.029	0%	20%	0	5.897.029	0%	1,74%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota							
				96		0	0	96		8	744.444	47%	14%	8	744.444	18%	4,89%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota								
			2	100	11.196.091	0	-	100	5.696.091	0	316.374	1	3.749.988	20%	17%	1	3.749.988	7%	7,19%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota						
			3	10	2.000.000	0	-	2	400.000	1	285.530	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan						

1				2			3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP						
				Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	yang mengikuti pelatihan																					Tata Ruang Kota	
			4	Kegiatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk	Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	Orang	97216	129.950.775	0	-	86375	23.627.334	19.577.378	123	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	#DIV/0!				Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota	
			5	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/Promotif maupun Kuratif/Rehabilitatif di Puskesmas Manguharjo	Nilai PKP Puskesmas	%	90	1.556.050	0	-	90	266.050	50.970	3	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%				Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota	
			6	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/Promotif maupun Kuratif/Rehabilitatif di Puskesmas Patihan	Nilai PKP Puskesmas	%	88	1.127.330	0	-	88	212.330	700	11,53	0	8.453.603	0%	42%	0	8.453.603	0%	6,79%				Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota	
			7	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/Promotif maupun Kuratif/Rehabilitatif di Puskesmas Demangan	Nilai PKP Puskesmas	%	87	2.216.000	0	-	87	326.000	-	16,9	0	445.738	0%	42%	0	445.738	0%	3,78%				Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota	
			8	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/Promotif maupun Kuratif/Rehabilitatif di Puskesmas Banjarejo	Nilai PKP Puskesmas	%	93	2.076.215	0	-	93	346.215	-	4,1	0	4.800	0%	2%	0	4.800	0%	0,32%				Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota	
			9	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/Promotif maupun Kuratif/Rehabilitatif di Puskesmas Oro-Oro Ombo	Nilai PKP Puskesmas	%	86	1.521.900	0	-	86	281.900	43.320	0		4.926.589	#DIV/0!	18%	0%	4.926.589	0%	4%					
			10	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Preventif/Promotif maupun Kuratif/Rehabilitatif di Puskesmas Tawangrejo	Nilai PKP Puskesmas	%	90	1.659.475	0	-	90	249.475	46.920	5,11	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%				Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota	
1		102	10201	19	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kesehatan masyarakat yang sesuai standar	%	25	39.096.331	0	0	25	7.936.798	0	1.607.929	0	4.550.266	0%	7%	0	4.550.266	0%	3,82%			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota	
				1	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	Prosentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI	%	88	24.417.398	0	-	81	4.674.591	0	1.189.127	1	376.324	33%	13%	1	376.324	33%	5,45%			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota	
				2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Prosentase kelurahan STBM	%	92	1.823.672	0	-	55	797.773	3,71	94.909		750.820	#DIV/0!	2%	0%	750.820	0%	0%				

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP	K (%)	RP			
			3					100	7.642.460	0	-	100	1.251.749	0	124.468	0	48.324	0%	7%	0	48.324	0%	1,82%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota		
			4					100	3.045.593	0	-	100	749.593	25	153.525	0	702.496	0%	2%	0	702.496	0%	0,31%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota		
			5					43	275.000	0	-	41	55.000	0	11.580	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota		
			6					6	1.035.448	0	-	6	39.448	0	9.067	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota		
			7					80	605.145	0	-	60	121.029	0	25.253											
			8					40	247.615	0	-	225	247.615	0	-		543.488	#DIV/0!	9%	0%	543.488	0%	2%			
1	102	10201	20					5	8.131.592	0	0	5	1.973.830	0	855.868	175	140.926	28%	32%	175	140.926	6%	6,16%	Dinas Perhubungan		
			1					100	4.415.700	0	-	60	966.145	0	146.133	1	297.625	17%	20%	1	297.625	3%	3,58%	Dinas Perhubungan		
			2					100	3.123.536	0	-	50	816.674	0	293.995	0	40.137	0%	7%	0	40.137	0%	1,45%	Dinas Perhubungan		
			3					100	592.356	0	-	100	191.011	11,11	415.740	0	25.600	0%	4%	0	25.600	0%	0,85%	Dinas Perhubungan		
1	102	10201	21					48,27	144.015.683	0	0	48,27	25.524.843	0	5.912.642	0	39.200	0%	1%	0	39.200	0%	0,23%	Dinas Perhubungan		
			1					1	810.290	0	-	1	166.765	0	29.650		674.894	#DIV/0!	22%	0%	674.894	0%	4%			
			2					100	11.571.009	0	-	100	3.171.009	0	-	34102	283.360	29%	24%	34102	283.360	6%	3,94%	Dinas Perhubungan		

1				2		3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP			
			1	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Demangan	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	95	8.630.370	0	-	93	1.120.224	2	175.691	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
			1	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Manguharjo	Prosentase Penilaian Kinerja Puskesmas Essensial dan Pengembangan	94	7.031.180	0	-	93	881.160	0	208.237	0	799.513	0%	11%	0	799.513	0%	1,39%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
			1	Kegiatan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (Bk Prov)	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	1	150.000	0	-	1	30.000	0	25.000	10	3.271.934	43%	41%	10	3.271.934	33%	6,42%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
			2	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Manguharjo (DAK)	Prosentase SPM mencapai target	100	2.238.002	0	-	100	463.002	8,33	66.828	0	78.012	0%	2%	0	78.012	0%	0,39%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
			2	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Patihan (DAK)	Prosentase SPM Puskesmas mencapai target	100	2.239.810	0	-	100	459.810	0	103.780	1980	1.302.481	602%	67%	1980	1.302.481	130%	15,62%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
			2	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Demangan (DAK)	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	100	2.345.000	0	-	100	535.000	17	79.965	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
			2	Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Banjarejo (DAK)	Prosentase SPM Puskesmas mencapai target	100	2.690.632	0	-	100	580.632	-	205.492	0	68.725	0%	4%	0	68.725	0%	0,65%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
2	208	10201	15	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase peserta KB aktif MKJP	42,74	15.513.814	0	0	42,74	4.152.697	0	595.756	3	110.321	43%	55%	3	110.321	43%	3,97%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
			1	Kegiatan Pembinaan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	Prosentase keluarga yang menjadi anggota tribina	67	3.100.633	0	-	67	762.783	0	146.857											
			2	Kegiatan Advokasi, Penggerakkan dan Informasi KB	Prosentase cakupan penyediaan informasi dan data mikro	100	1.286.136	0	-	100	575.706	0	61.891		86.707	#DIV/0!	7%	0%	86.707	0%	4%			
			3	Kegiatan Pengendalian Penduduk	Prosentase usia kawin pertama perempuan	3	6.471.955	0	-	3	1.060.090	0	240.455	4	38.013	2%	10%	4	38.013	4%	4,75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota		
			4	Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Jumlah Kampung KB Aktif	7	3.914.740	0	-	7	1.013.768	0	146.554	16	41.431	23%	10%	16	41.431	19%	29,59%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota		

1				2		3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP				
			5					4	740.350	0	-	2	740.350	0	-	0	7.262	0%	1%	0	7.262	0%	0,73%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota	
1																									
	1																								
		10101	15					100	3.019.759	0	0	100	453.299	0	54.098										
				1				460	464.154	0	-	92	89.987	0	25.900		49.699	#DIV/0!	43%	0%		49.699	0%	50%	
				2				920	551.182	0	-	184	-	0	-	1	49.699	50%	43%	1	49.699	50%	49,70%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				3				710	1.105.126	0	-	142	198.737	0	28.198										
				4				245	580.192	0	-	49	99.575	0	-		155.424	#DIV/0!	0%	0%		155.424	0%	5%	
				5				1500	319.105	0	-	300	65.000	0	-	1	112.576	20%	0%	1	112.576	5%	8,6%	Dinas Lingkungan Hidup	
1																									
		101	10101	16				100	9.640.804	0	0	0	1.945.668	0	196.650	70	12.968	100%	32%	70	12.968	100%	32,42%	Dinas Lingkungan Hidup	
				1				625	1.238.041	0	-	125	224.054	0	26.049	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup	
				2				2500	797.763	0	-	500	144.375	0	14.500	329	23.281	119%	23%	329	23.281	20%	4,24%	Dinas Lingkungan Hidup	
				3				2500	2.500.000	0	0	500	418.381	0	92.698	0	5.250	0%	5%	0	5.250	0%	0,78%	Dinas Lingkungan Hidup	
				5				90	1.080.000	0	-	10	120.000	0	-	4	1.350	80%	2%	4	1.350	16%	0,25%	Dinas Lingkungan Hidup	

1				2			3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP						
				6	Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Guru Kelas dan Mapel Online serta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	jumlah guru yang memahami materi	Orang	2500	2.000.000	0	0	500	399.969	0	38.513	158.641	#DIV/0!	19%	0%	158.641	0%	4%						
				7	Kegiatan Peningkatan SDM Tenaga Kependidikan (TU)	jumlah TU yang taat aturan	Orang	400	400.000	0	-	80	351.845	0	24.890	35.201	0%	13%	0	35.201	0%	2,52%	Dinas Lingkungan Hidup					
				8	Kegiatan Outdoor Learning Guru	jumlah guru yang mengikuti outdoor learning	Orang	2000	1.625.000	0	-	400	287.044	0	-	318	54.650	64%	44%	318	54.650	7%	6,66%	Dinas Lingkungan Hidup				
1					Program Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	%	100	628.872.208				125.425.289			0	7.490	0%	8%	0	7.490	0%	2,49%	Dinas Lingkungan Hidup				
				1	Kegiatan Penyelenggaraan SMP Terbuka	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	424.071	0	-	1	-	0	-	0	22.900	0%	28%	0	22.900	0%	5,99%	Dinas Lingkungan Hidup				
				2	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 1	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.807.273	0	-	1	1.807.273	0	151.004	0	20.944	0%	18%	0	20.944	0%	3,10%	Dinas Lingkungan Hidup				
				3	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 2	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.555.369	0	-	1	1.555.369	0	230.652	0	17.456	0%	10%	0	17.456	0%	2,70%	Dinas Lingkungan Hidup				
				4	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 3	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.071.885	0	-	1	1.071.885	0	169.632	240.430	#DIV/0!	9%	0%	240.430	0%	1%						
				5	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 4	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.391.293	0	-	1	1.391.293	0	291.798	30	87.746	73%	6%	30	87.746	34%	1,02%	Dinas Lingkungan Hidup				

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP		
	6	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 5	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	836.852	0	-	1	836.852	0	104.507	3	3.201	38%	9%	3	3.201	38%	1,78%	Dinas Lingkungan Hidup
	7	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 6	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.264.776	0	-	1	1.264.776	0	330.937	0	480	0%	1%	0	480	0%	0,11%	Dinas Lingkungan Hidup
	8	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 7	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.458.032	0	-	1	1.458.032	0	97.884	0	60.002	0%	28%	0	60.002	0%	3,64%	Dinas Lingkungan Hidup
	9	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 8	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.204.131	0	-	1	1.204.131	0	208.882	0	89.002	0%	11%	0	89.002	0%	1,75%	Dinas Lingkungan Hidup
	10	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 9	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	5.237.723	0	-	1	1.306.194	0	228.625	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
	11	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 10	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	13.092.700	0	-	1	1.485.995	0	306.384	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
	12	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 11	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	990.536	0	-	1	990.536	0	163.376	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
	13	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 12	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.376.177	0	-	1	1.376.179	0	210.372		1.825.314	#DIV/0!	23%	0%	1.825.314	0%	4%	
	14	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 13	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.286.469	0	-	1	1.286.469	0	170.467	9	122.145	69%	8%	9	122.145	15%	1,70%	Dinas Lingkungan Hidup
	15	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 14	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	4.368.905	0	-	1	906.011	0	86.183	0	1.230.676	0%	40%	0	1.230.676	0%	6,40%	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP		
	2 6	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Kanigoro	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.144.043	0	-	1	223.089	0	78.602	0	11.523	0%	5%	0	11.523	0%	1,21%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2 7	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Kanigoro	jumlah lembaga yang beroperasi baik	Lembaga	5	1.575.968	0	-	1	290.733	0	100.279	0	8.587	0%	1%	0	8.587	0%	0,03%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2 8	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Kanigoro	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.556.632	0	-	1	318.659	0	144.195	0	30.570	0%	4%	0	30.570	0%	0,73%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2 9	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sukosari	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	140.292	0	-	1	140.292	0	55.770									
	3 0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Pilangbango	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.878.317	0	-	1	499.117	0	75.140		3.787.779	#DIV/0!	10%	0%	3.787.779	0%	2%	
	3 1	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Tawangrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.394.816	0	-	1	264.241	0	92.883	0	366.566	0%	3%	0	366.566	0%	2,54%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
	3 2	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Tawangrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.150.850	0	-	1	228.726	0	75.105	0	38.535	0%	8%	0	38.535	0%	1,54%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
	3 3	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kelun	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	272.934	0	-	1	272.934	0	99.555	0	3.382.678	0%	13%	0	3.382.678	0%	2,03%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
	3 4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Maguharjo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.751.325	0	-	1	567.730	0	123.234		19.295.602	#DIV/0!	25%	0%	19.295.602	0%	4%	
	3 5	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.339.024	0	-	1	483.047	0	162.608	0	5.897.029	0%	20%	0	5.897.029	0%	1,74%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP							
3 6	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.162.297	0	-	1	237.330	0	88.405	8	744.444	47%	14%	8	744.444	18%	4,89%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
3 7	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Madiun Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.261.958	0	-	1	277.889	0	69.999	1	3.749.988	20%	17%	1	3.749.988	7%	7,19%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
3 8	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Madiun Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.282.437	0	-	1	269.837	0	84.951	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
3 9	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Madiun Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	3.996.936	0	-	1	766.267	0	134.023	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
4 0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Madiun Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.586.227	0	-	1	496.014	0	149.737	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
4 1	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 05 Madiun Lor	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	3.033.054	0	-	1	564.228	0	-	0	8.453.603	0%	42%	0	8.453.603	0%	6,79%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
4 2	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.221.332	0	-	1	257.405	0	104.435	0	445.738	0%	42%	0	445.738	0%	3,78%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
4 3	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	986.633	0	-	1	229.253	0	79.210	0	4.800	0%	2%	0	4.800	0%	0,32%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
4 4	Kegiatan Penyelenggaraan SC:N 03 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.337.990	0	-	1	484.579	0	124.844		4.926.589	#DIV/0!	18%	0%	4.926.589	0%	4%	
4 5	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.210.406	0	-	1	253.742	0	51.402	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP							
4 6	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Winongo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.481.836	0	-	1	449.150	0	191.375	0	4.550.266	0%	20%	0	4.550.266	0%	3,82%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
4 7	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Winongo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	590.340	0	-	1	229.892	0	78.123	1	376.324	33%	13%	1	376.324	33%	5,45%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
4 8	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Ngegong	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.091.021	0	-	1	227.755	0	71.960		750.820	#DIV/0!	2%	0%	750.820	0%	0%	
4 9	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Patihan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	521.015	0	-	1	521.015	0	148.320	0	48.324	0%	7%	0	48.324	0%	1,82%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
5 0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pangongangan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	223.037	0	-	1	223.037	0	33.183	0	702.496	0%	2%	0	702.496	0%	0,31%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
5 1	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pangongangan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.312.416	0	-	1	448.071	0	99.818	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
5 2	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Sogaten	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	300.555	0	-	1	300.555	0	103.492	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
5 3	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Taman	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	3.701.142	0	-	1	658.217	0	208.454									
5 4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Taman	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	780.787	0	-	1	141.303	0	47.794		543.488	#DIV/0!	9%	0%	543.488	0%	2%	
5 5	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Taman	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.052.706	0	-	1	232.131	0	89.978	175	140.926	28%	32%	175	140.926	6%	6,16%	Dinas Perhubungan

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP							
5 6	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Pandean	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	5.797.153	0	-	1	530.143	0	98.178	1	297.625	17%	20%	1	297.625	3%	3,58%	Dinas Perhubungan
5 7	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Pandean	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.572.254	0	-	1	527.977	0	159.875	0	40.137	0%	7%	0	40.137	0%	1,45%	Dinas Perhubungan
5 8	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Banjarejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	3.390.215	0	-	1	657.702	0	194.553	0	25.600	0%	4%	0	25.600	0%	0,85%	Dinas Perhubungan
5 9	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Mojorejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.478.072	0	-	1	268.845	0	88.061	0	39.200	0%	1%	0	39.200	0%	0,23%	Dinas Perhubungan
6 0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Mojorejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	3.996.463	0	-	1	798.078	0	266.465		674.894	#DIV/0!	22%	0%	674.894	0%	4%	
6 1	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Manisrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.699.648	0	-	1	536.593	0	148.743	34102	283.360	29%	24%	34102	283.360	6%	3,94%	Dinas Perhubungan
6 2	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Manisrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.351.183	0	-	1	486.133	0	95.304	7846	15.848	34%	9%	7846	15.848	34%	1,76%	Dinas Perhubungan
6 3	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Manisrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.548.038	0	-	1	317.695	0	115.090	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Perhubungan
6 4	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 04 Manisrejo	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	2.096.260	0	-	1	446.495	0	125.627	0	7.600	0%	7%	0	7.600	0%	1,69%	Dinas Perhubungan
6 5	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Demangan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.304.896	0	-	1	267.498	0	60.299	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Perhubungan

1		2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP			
6	6	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Demangan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.436.061	0	-	1	289.105	0	57.967	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Perhubungan			
6	7	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 01 Josenan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.501.192	0	-	1	299.741	0	54.871	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Perhubungan			
6	8	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 02 Josenan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.451.511	0	-	1	298.978	0	56.254	310	68.875	31%	40%	310	68.875	6%	8,10%	Dinas Perhubungan			
6	9	Kegiatan Penyelenggaraan SDN 03 Josenan	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.112.807	0	-	1	240.785	0	75.975	0	14.080	0%	6%	0	14.080	0%	4,14%	Dinas Perhubungan			
7	0	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kejuron	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	867.751	0	-	1	189.828	0	69.166	0	182.389	0%	38%	0	182.389	0%	7,34%	Dinas Perhubungan			
7	1	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kuncen	jumlah lembaga yang beroperasi dengan baik	Lembaga	5	1.011.269	0	-	1	183.014	0	54.511	0	102.743	0%	28%	0	102.743	0%	4,35%	Dinas Perhubungan			
7	2	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 1	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	873.939	0	-	1	1.303.000	0	-												
7	3	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 2	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	800.073	0	-	1	744.000	0	-	5.630.985	#DIV/0!	24%	0%	5.630.985		0%	4%				
7	4	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 3	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	599.835	0	-	1	573.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
7	5	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 4	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.024.135	0	-	1	886.000	0	-	0	799.513	0%	11%	0	799.513	0%	1,39%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP							
7 6	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 5	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	531.156	0	-	1	462.000	0	-	10	3.271.934	43%	41%	10	3.271.934	33%	6,42%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7 7	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 6	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	764.211	0	-	1	650.000	0	-	0	78.012	0%	2%	0	78.012	0%	0,39%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7 8	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 7	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	958.995	0	-	1	905.813	0	-	1980	1.302.481	602%	67%	1980	1.302.481	130%	15,62%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7 9	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 8	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	579.513	0	-	1	550.000	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8 0	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 9	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	3.643.844	0	-	1	439.000	0	-	0	68.725	0%	4%	0	68.725	0%	0,65%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8 1	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 10	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	738.899	0	-	1	518.000	0	-	3	110.321	43%	55%	3	110.321	43%	3,97%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8 2	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 11	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	697.083	0	-	1	786.995	0	-									
8 3	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 12	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	988.205	0	-	1	723.000	0	-		86.707	#DIV/0!	7%	0%	86.707	0%	4%	
8 4	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 13	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	915.317	0	-	1	725.000	0	-	4	38.013	2%	10%	4	38.013	4%	4,75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
8 5	Kegiatan Dana BOS pada SMP Negeri 14	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	2.758.507	0	-	1	376.000	0	-	16	41.431	23%	10%	16	41.431	19%	29,59%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP		
	8 6	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kartoharjo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.773.320	0	-	1	288.800	0	-	0	7.262	0%	1%	0	7.262	0%	0,73%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
	8 7	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kartoharjo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	406.331	0	-	1	52.800	0	-									
	8 8	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kartoharjo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	397.477	0	-	1	66.400	0	-									
	8 9	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Klegen	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.766.241	0	-	1	296.000	0	-	49.699	#DIV/0!	43%	0%	49.699	0%	50%		
	9 0	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Klegen	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.408.241	0	-	1	121.600	0	-	1	49.699	50%	43%	1	49.699	50%	49,70%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	9 1	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Klegen	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.720.035	0	-	1	287.200	0	-									
	9 2	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Klegen	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	560.273	0	-	1	85.600	0	-	155.424	#DIV/0!	0%	0%	155.424	0%	5%		
	9 3	Kegiatan Dana BOS pada SDN Oro Oro Ombo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.450.195	0	-	1	228.000	0	-	1	112.576	20%	0%	1	112.576	5%	8,96%	Dinas Lingkungan Hidup
	9 4	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Rejomulyo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	491.677	0	-	1	84.800	0	-	70	12.968	100%	32%	70	12.968	100%	32,42%	Dinas Lingkungan Hidup
	9 5	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Rejomulyo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	60.282	0	-	1	51.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP							
9 6	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Kanigoro	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	689.209	0	-	1	92.800	0	-	329	23.281	119%	23%	329	23.281	20%	4,24%	Dinas Lingkungan Hidup
9 7	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Kanigoro	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	777.457	0	-	1	136.000	0	-	0	5.250	0%	5%	0	5.250	0%	0,78%	Dinas Lingkungan Hidup
9 8	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Kanigoro	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	857.684	0	-	1	143.200	0	-	4	1.350	80%	2%	4	1.350	16%	0,25%	Dinas Lingkungan Hidup
9 9	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sukosari	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	857.684	0	-	1	33.600	0	-		158.641	#DIV/0!	19%	0%	158.641	0%	4%	
1 0 0	Kegiatan Dana BOS pada SDN Pilangbango	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.177.386	0	-	1	184.000	0	-	0	35.201	0%	13%	0	35.201	0%	2,52%	Dinas Lingkungan Hidup
1 0 1	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Tawangrejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	2.399.225	0	-	1	133.600	0	-	318	54.650	64%	44%	318	54.650	7%	6,66%	Dinas Lingkungan Hidup
1 0 2	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Tawangrejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	517.420	0	-	1	26.400	0	-	0	7.490	0%	8%	0	7.490	0%	2,49%	Dinas Lingkungan Hidup
1 0 3	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kelun	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	160.652	0	-	1	141.600	0	-	0	22.900	0%	28%	0	22.900	0%	5,99%	Dinas Lingkungan Hidup
1 0 4	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manguharjo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.728.279	0	-	1	272.000	0	-	0	20.944	0%	18%	0	20.944	0%	3,10%	Dinas Lingkungan Hidup
1 0 5	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.473.902	0	-	1	248.000	0	-	0	17.456	0%	10%	0	17.456	0%	2,70%	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP							
106	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	681.069	0	-	1	114.400	0	-		240.430	#DIV/0!	9%	0%	240.430	0%	1%	
107	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Madiun Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	639.011	0	-	1	105.600	0	-	30	87.746	73%	6%	30	87.746	34%	1,02%	Dinas Lingkungan Hidup
108	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Madiun Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	793.626	0	-	1	122.400	0	-	3	3.201	38%	9%	3	3.201	38%	1,78%	Dinas Lingkungan Hidup
109	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Madiun Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	2.387.909	0	-	1	419.200	0	-	0	480	0%	1%	0	480	0%	0,11%	Dinas Lingkungan Hidup
110	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Madiun Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.864.902	0	-	1	293.600	0	-	0	60.002	0%	28%	0	60.002	0%	3,64%	Dinas Lingkungan Hidup
111	Kegiatan Dana BOS pada SDN 05 Madiun Lor	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	2.111.032	0	-	1	362.400	0	-	0	89.002	0%	11%	0	89.002	0%	1,75%	Dinas Lingkungan Hidup
112	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	787.934	0	-	1	124.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
113	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	550.062	0	-	1	164.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
114	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.490.627	0	-	1	247.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
115	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	750.774	0	-	1	122.400	0	-		1.825.314	#DIV/0!	23%	0%	1.825.314	0%	4%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP							
1 1 6	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Winongo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.616.762	0	-	1	277.600	0	-	9	122.145	69%	8%	9	122.145	15%	1,70%	Dinas Lingkungan Hidup
1 1 7	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Winongo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	449.334	0	-	1	54.400	0	-	0	1.230.676	0%	40%	0	1.230.676	0%	6,40%	Dinas Lingkungan Hidup
1 1 8	Kegiatan Dana BOS pada SDN Ngegong	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	664.227	0	-	1	197.800	0	-	0	31.032	0%	4%	0	31.032	0%	0,70%	Dinas Lingkungan Hidup
1 1 9	Kegiatan Dana BOS pada SDN Patihan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	320.119	0	-	1	288.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
1 2 0	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Pangongangan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	97.123	0	-	1	77.600	0	-	0	441.460	0%	20%	0	441.460	0%	3,71%	Dinas Lingkungan Hidup
1 2 1	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pangongangan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	276.666	0	-	1	256.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
1 2 2	Kegiatan Dana BOS pada SDN Sogaten	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	157.701	0	-	1	145.600	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
1 2 3	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Taman	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	2.160.526	0	-	1	364.800	0	-									
1 2 4	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Taman	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	320.591	0	-	1	64.000	0	-		175.062	#DIV/0!	5%	0%	175.062	0%	0%	
1 2 5	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Taman	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	538.180	0	-	1	82.400	0	-	0	34.701	0%	10%	0	34.701	0%	2,48%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP							
1 2 6	Kegiatan Lana BOS pada SDN 01 Pandean	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.736.675	0	-	1	288.000	0	-	0	71.640	0%	7%	0	71.640	0%	0,79%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 2 7	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Pandean	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.438.480	0	-	1	264.000	0	-	0	18.040	0%	14%	0	18.040	0%	1,90%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 2 8	Kegiatan Dana BOS pada SDN Banjarejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	2.203.764	0	-	1	374.400	0	-	0	11.523	0%	5%	0	11.523	0%	1,21%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 2 9	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Mojorejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	682.764	0	-	1	109.000	0	-	0	8.587	0%	1%	0	8.587	0%	0,03%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 3 0	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Mojorejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	2.567.940	0	-	1	436.000	0	-	0	30.570	0%	4%	0	30.570	0%	0,73%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 3 1	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Manisrejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.724.643	0	-	1	283.200	0	-									
1 3 2	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Manisrejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.522.625	0	-	1	251.200	0	-		3.787.779	#DIV/0!	10%	0%	3.787.779	0%	2%	
1 3 3	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Manisrejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	852.267	0	-	1	145.600	0	-	0	366.566	0%	3%	0	366.566	0%	2,54%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
1 3 4	Kegiatan Dana BOS pada SDN 04 Manisrejo	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	1.265.850	0	-	1	194.400	0	-	0	38.535	0%	8%	0	38.535	0%	1,54%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
1 3 5	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Demangan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	744.600	0	-	1	130.400	0	-	0	3.382.678	0%	13%	0	3.382.678	0%	2,03%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP	
1 3 6	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Dermangan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	843.302	0	-	1	138.400	0	-		19.295.602	#DIV/0!	25%	0%	19.295.602	0%	4%	
1 3 7	Kegiatan Dana BOS pada SDN 01 Josenan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	892.211	0	-	1	149.600	0	-	0	5.897.029	0%	20%	0	5.897.029	0%	1,74%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
1 3 8	Kegiatan Dana BOS pada SDN 02 Josenan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	882.053	0	-	1	145.600	0	-	8	744.444	47%	14%	8	744.444	18%	4,89%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
1 3 9	Kegiatan Dana BOS pada SDN 03 Josenan	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	521.343	0	-	1	86.400	0	-	1	3.749.988	20%	17%	1	3.749.988	7%	7,19%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
1 4 0	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kejuron	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	350.547	0	-	1	50.400	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
1 4 1	Kegiatan Dana BOS pada SDN Kuncen	jumlah lembaga yang memenuhi standar pendidikan	Lembaga	5	405.287	0	-	1	68.800	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
1 4 2	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru	angka partisipasi murni sd smp, jumlah siswa yang memenuhi kriteria lembaga yang dituju	Lembaga	470	25.532.065	0	-	94	40.699	0	9.110	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
1 4 3	Kegiatan Pelaksanaan Uji Coba USBN SD, SMP, Kegiatan USBN Pendidikan Agama SD dan SMP, Kegiatan USBN SD, SMP dan UN SMP	jumlah lembaga yang mengikuti ujicoba USBN dan UN SD dan SMP	Lembaga	465	5.809.049	0	-	93	1.492.522	0	432.608	0	8.453.603	0%	42%	0	8.453.603	0%	6,79%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
1 4 4	Kegiatan OSN dan Cerdas Cermat SD, SMP	jumlah siswa yang berprestasi	Siswa	2610	2.268.420	0	-	522	611.161	0	90.618	0	445.738	0%	42%	0	445.738	0%	3,78%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
1 4 5	Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD dan SMP	jumlah siswa yang berprestasi	Siswa	1545	3.108.891	0	-	309	1.218.801	0	28.050	0	4.800	0%	2%	0	4.800	0%	0,32%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K (%)	RP						
			6	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan PAUD	jumlah gedung PAUD yang direhab	lembaga	5	10.000.000	0	-	1	5.000.000	0	5.010		543.488	#DIV/0!	9%	0%	543.488	0%	2%					
			7	Kegiatan Pagelaran Hari Anak Nasional	jumlah anak yang mengikuti HAN	anak	10000	3.293.165	0	-	2000	595.580	0	-	175	140.926	28%	32%	175	140.926	6%	6,16%	Dinas Perhubungan				
1				Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Lembaga yang Terakreditasi	Lembaga	90	10.869.058				1.335.404		37.070	1	297.625	17%	20%	1	297.625	3%	3,58%	Dinas Perhubungan				
			1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	jumlah peserta lulus ujian	peserta	25	1.623.375	0	-	5	288.440	0	4.360	0	40.137	0%	7%	0	40.137	0%	1,45%	Dinas Perhubungan				
			2	Kegiatan Pembinaan Lembaga PAUD dan PNF	jumlah lembaga yang sesuai dengan aturan yang berlaku	lembaga	1150	2.157.206	0	-	230	106.064	0	-	0	25.600	0%	4%	0	25.600	0%	0,85%	Dinas Perhubungan				
			3	Kegiatan Bimbingan Teknis Ekstra Kurikuler Pembina Pramuka	jumlah peserta yang mengikuti bimtek ekskul pembina pramuka	peserta	1315	3.365.110	0	-	263	609.000	0	-	0	39.200	0%	1%	0	39.200	0%	0,23%	Dinas Perhubungan				
			4	Kegiatan Workshop Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah	jumlah peserta yang memahami workshop pengelolaan perpustakaan	peserta	695	2.176.635	0	-	169	331.900	0	-		674.894	#DIV/0!	22%	0%	674.894	0%	4%					
			5	Kegiatan Workshop Penyusunan Bahan Ajar Mulok Bahasa Daerah	Persentase saran dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	%	470	1.546.732	0	-	94		0	32.710	34102	283.360	29%	24%	34102	283.360	6%	3,94%	Dinas Perhubungan				
2				Perpustakaan.										7846	15.848	34%	9%	7846	15.848	34%	1,76%	Dinas Perhubungan					
			2	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah bahan pustaka yang dipinjam	eks	22750	1.285.000	0	0	22750	1.285.000	0	241.288	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Perhubungan				

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR HIJAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun Ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di Evaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR																					
1	4	Perumahan dan Kawasan Permukiman																				
1	1	Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	Prosentase rumah tidak layak huni dan bersanitasi	%	99,3	46.759.221	0	-	3.201.308		175.062		175.062	#DIV/0!	5%	0%	175.062	0%	0%			
		1	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan data/ Kajian Perumahan	Jumlah dokumen	doc	7	1.400.000	0	-	2	345.370	0	34.701	0	34.701	0%	10%	0	34.701	0%	2,48%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2	Kegiatan Penyediaan Perumahan	Jumlah lokasi	lokasi	1	9.059.221	0	0	1	1.000.000	0	71.640	0	71.640	0%	7%	0	71.640	0%	0,79%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		3	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Perumahan	Jumlah lokasi	lokasi	5	950.000	0	0	1	130.938	0	18.040	0	18.040	0%	14%	0	18.040	0%	1,90%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		5	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan Data/ Kajian Permukiman	Jumlah dokumen	doc	10	950.000	0	0	2	225.000	0	11.523	0	11.523	0%	5%	0	11.523	0%	1,21%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		6	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah lokasi	kecamatan	3	30.200.000	0	0	3	750.000	0	8.587	0	8.587	0%	1%	0	8.587	0%	0,03%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		7	Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Permukiman	Jumlah lokasi	lokasi	30	4.200.000	0	0	10	750.000	0	30.570	0	30.570	0%	4%	0	30.570	0%	0,73%	Dinas Perumahan

1					2		3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
																								dan Kawasan Permukiman	
1	3				Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota																				
1	1	0	3	1	Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	%	100	#####	0	-	39.634.550	3.787.779	3.787.779	#DIV/0!	10%	0%	3.787.779	0%	2%					
				1	Kegiatan Penyelenggaraan Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung/bangunan	gedung	4	14.423.950	0	-	8	12.423.950	0	366.566	0	366.566	0%	3%	0	366.566	0%	2,54%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota	
				2	Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta	Orang	200	2.500.000	0	-	200	500.000	0	38.535	0	38.535	0%	8%	0	38.535	0%	1,54%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota	
				3	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi	kelurahan	30	#####	0	-	27	26.710.600	0	3.382.678	0	3.382.678	0%	13%	0	3.382.678	0%	2,03%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota	
1	1	0	3	1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalankota dalam kondisi baik	%	94	#####	0	-	77.891.388	19.295.602	19.295.602	#DIV/0!	25%	0%	19.295.602	0%	4%					
				1	Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah lokasi	lokasi	10	#####	0	-	10	28.787.238	0	5.897.029	0	5.897.029	0%	20%	0	5.897.029	0%	1,74%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota	
				2	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dokumen perencanaan	doc	45	15.238.400	0	-	17	5.140.400	8	744.444	8	744.444	47%	14%	8	744.444	18%	4,89%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota	
				3	Kegiatan Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan	Jumlah lokasi	lokasi	14	52.176.750	0	-	5	22.376.750	1	3.749.988	1	3.749.988	20%	17%	1	3.749.988	7%	7,19%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota	
				4	Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	Jumlah lokasi	lokasi	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota	
				5	Kegiatan Peningkatan Jalan	Jumlah lokasi	lokasi	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota	

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
				6	Kegiatan Inspeksi Pemutakhiran Data Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen inspeksi	doc	15	1.195.000	0	-	3	275.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
				7	Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah lokasi	lokasi	85	##### #	0	-	70	20.000.000	0	8.453.603	0	8.453.603	0%	42%	0	8.453.603	0%	6,79%			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
				8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Jumlah lokasi	lokasi	8	11.807.040	0	-	8	1.062.000	0	445.738	0	445.738	0%	42%	0	445.738	0%	3,78%			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
				9	Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Ring Road	Jumlah lokasi	lokasi	1	1.505.000	0	-	1	250.000	0	4.800	0	4.800	0%	2%	0	4.800	0%	0,32%			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
1	1	1	1		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	%	90,4	##### #	0	-		27.400.000		4.926.589		4.926.589	#DIV/0!	18%	0%	4.926.589	0%	4%			
				1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Dokumen DED sa'uran/drainase/go rong-gorong	doc	8	7.700.000	0	-	8	1.500.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
				2	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Panjang saluran yang dibangun	meter	15000	##### #	0	-	15000	23.000.000	0	4.550.266	0	4.550.266	0%	20%	0	4.550.266	0%	3,82%			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
				4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kecamatan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Jumlah kecamatan	kec	3	6.900.000	0	-	3	2.900.000	1	376.324	1	376.324	33%	13%	1	376.324	33%	5,45%			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
1	1	1	1		Program Pengendalian Banjir	Jumlah titik / lokasi banjir / tergenang	titik	12	##### #	-	-		35.150.000		750.820		750.820	#DIV/0!	2%	0%	750.820	0%	0%			
				1	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan/ Perbaikan Rumah Pompa, Pompa Banjir dan Pintu Air	Persentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir	%	95	2.650.000	0	-	90%	650.000	0	48.324	0	48.324	0%	7%	0	48.324	0%	1,82%			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
				2	Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	Jumlah lokasi	Lokasi	8	##### #	0	-	13	29.500.000	0	702.496	0	702.496	0%	2%	0	702.496	0%	0,31%			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
				3	Kegiatan Pengadaan Pompa Pengendalian Banjir	Jumlah pompa	unit	3	10.000.000	0	-	3	5.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kota		
				4	Kegiatan Penataan Rumah Jaga dan Kawasan Rumah Pompa Pandan	Jumlah lokasi	Lokasi	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota		
2	9				Perhubungan																					
2	0	0	1		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas	%	80	33.699.951	0	-		5.771.951		543.488		543.488	#DIV/0!	9%	0%	543.488	0%	2%			
				1	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	Jumlah yang dipelihara	unit	3160	2.286.859	0	-	632	446.859	175	140.926	175	140.926	28%	32%	175	140.926	6%	6,16%	Dinas Perhubungan		
				2	Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Kegiatan	kali	30	8.306.755	0	-	6	1.506.755	1	297.625	1	297.625	17%	20%	1	297.625	3%	3,58%	Dinas Perhubungan		
				3	Kegiatan Manajemen Relayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen	doc	16	2.760.338	0	-	4	560.338	0	40.137	0	40.137	0%	7%	0	40.137	0%	1,45%	Dinas Perhubungan		
				4	Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	Panjang Marka Jalan	meter	18000	3.000.000	0	-	5000	600.000	0	25.600	0	25.600	0%	4%	0	25.600	0%	0,85%	Dinas Perhubungan		
				5	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	Jumlah peralatan dan perlengkapan lalu lintas	unit	4667	17.346.000	0	-	934	2.658.000	0	39.200	0	39.200	0%	1%	0	39.200	0%	0,23%	Dinas Perhubungan		
2	0	0	1		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	orang	539916	16.368.200	-			3.129.893		674.994		674.894	#DIV/0!	22%	0%	674.894	0%	4%			
				1	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Orang	Jumlah penumpang	penumpang	596.280	7.193.925	0	-	119256	1.193.926	34102	283.360	34102	283.360	29%	24%	34102	283.360	6%	3,94%	Dinas Perhubungan		
				2	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Barang	Jumlah angkutan barang yang di data	kendaraan	23000	899.526	0	-	23000	179.905	7846	15.848	7846	15.848	34%	9%	7846	15.848	34%	1,76%	Dinas Perhubungan		

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
				3	Kegiatan Pelatihan SDM Perhubungan	Jumlah SDM yang terampil	orang	120	710.850	0	-	120	186.970	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%			Dinas Perhubungan	
				4	Kegiatan Pembangunan Halte	Luas halte	m2	135	451.000	0	-	27	110.000	0	7.600	0	7.600	0%	7%	0	7.600	0%	1,69%			Dinas Perhubungan	
				5	Kegiatan Kalibrasi Pengujian Alat Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat yang dikalibrasi	alat	12	530.000	0	-	12	106.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%			Dinas Perhubungan	
				6	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Jumlah awak kendaraan yang diberi penghargaan	peserta	35	211.910	0	-	35	42.382	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%			Dinas Perhubungan	
				7	Kegiatan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Wahana Tata Nugraha	Jumlah Penilaian	kali	5	330.900	0	-	1	66.180	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%			Dinas Perhubungan	
				8	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalin dan Angkutan	Jumlah orang yang paham	orang	5000	850.700	0	-	1000	170.140	310	68.875	310	68.875	31%	40%	310	68.875	6%	8,10%			Dinas Perhubungan	
				11	Kegiatan Pembangunan Kios dan Ruang Tunggu Sub Terminal Manisrejo	Luas Bangunan	m2	45	340.000	0	-	45	225.000	0	14.080	0	14.080	0%	6%	0	14.080	0%	4,14%			Dinas Perhubungan	
				12	Kegiatan Pengelolaan Operasional Tempat Parkir Khusus	Jumlah Pegawai	orang	13	2.485.062	0	-	13	485.062	0	182.389	0	182.389	0%	38%	0	182.389	0%	7,34%			Dinas Perhubungan	
				13	Kegiatan Pengelolaan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Pegawai	orang	15	2.364.327	0	-	15	364.327	0	102.743	0	102.743	0%	28%	0	102.743	0%	4,35%			Dinas Perhubungan	
1	4				Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
1	00401	116			Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permukiman	Persentase RTH dan penerangan jalan lingkungan yang dikelola	%	72	#####	-		23.712.408		5.630.985		5.630.985	#DIV/0!	24%	0%		5.630.985	0%	4%				
				14	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan Data/ Kajian Ruang Terbuka Hijau	Jumlah dokumen	doc	8	2.150.000	0	-	3	409.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				15	Kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Pendukungnya	Jumlah lokasi	lokasi	29	57.450.000	0	-	5	7.554.350	0	799.513	0	799.513	0%	11%	0	799.513	0%	1,39%			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
2	4																										
2	2	1	1					100	100.000		-		116.650		49.699		49.699	#DIV/0!	43%	0%	49.699	0%	50%				
	0	0	5																								
	4	4	0																								
				1	Kegiatan Perencanaan, Pemantauan, Pengendalian dan Pembuatan Data/ Kajian Pertanahan	Jumlah dokumen	doc	2	100.000	0	-	2	116.650	1	49.699	1	49.699	50%	43%	1	49.699	50%	49,70%			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2	5																										
2	2	2	1					64,1	3.252.000		-		#####		155.424		155.424	#DIV/0!	0%	0%	155.424	0%	5%				
	0	0	5																								
	5	5	0																								
				1	Kegiatan penyusunan data dan informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	doc	19	1.256.000	0	-	5	#####	1	112.576	1	112.576	20%	0%	1	112.576	5%	8,96%			Dinas Lingkungan Hidup	
				2	Kegiatan Sosialisasi PPLH	Jumlah peserta sosialisasi	orang	70	40.000	0	-	70	40.000	70	12.968	70	12.968	100%	32%	70	12.968	100%	32,42%			Dinas Lingkungan Hidup	
				3	Kegiatan Pengembangan Kajian Lingkungan Hidup	Jumlah data dan informasi KLH yang tersedia	Doc	2	200.000	0	-	1	150.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%			Dinas Lingkungan Hidup	
				4	Kegiatan pengendalian lahan	Jumlah lubang biopori yang terpasang	unit	1627	549.000	0	-	277	101.000	329	23.281	329	23.281	119%	23%	329	23.281	20%	4,24%			Dinas Lingkungan Hidup	
				5	Kegiatan Inventarisasi Perusahaan/ Instansi Penghasil Limbah B3 dan Penghasil Limbah Cair	Jumlah data dan informasi yang tersedia	doc	12	670.000	0	-	2	109.168	0	5.250	0	5.250	0%	5%	0	5.250	0%	0,78%			Dinas Lingkungan Hidup	
				6	Kegiatan Pembinaan Izin TPS B3 dan Izin IPAL	Jumlah kegiatan / usaha yang mengurus izin	Perusahaan	25	537.000	0	-	5	72.523	4	1.350	4	1.350	80%	2%	4	1.350	16%	0,25%			Dinas Lingkungan Hidup	
2	2	2	1					47	4.220.000		-		856.500		158.641		158.641	#DIV/0!	19%	0%	158.641	0%	4%				
	0	0	6																								
	5	5	0																								
				1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahannya	Perusahaan	79	1.395.000	0	-	63	270.500	0	35.201	0	35.201	0%	13%	0	35.201	0%	2,52%			Dinas Lingkungan Hidup	

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
										4550	820.000	0	-	500	125.000	318	54.650	318	54.650	64%	44%	318	54.650	7%	6,66%	Dinas Lingkungan Hidup	
										400	301.000	0	-	100	90.700	0	7.490	0	7.490	0%	8%	0	7.490	0%	2,49%	Dinas Lingkungan Hidup	
										15	382.000	0	-	3	82.500	0	22.900	0	22.900	0%	28%	0	22.900	0%	5,99%	Dinas Lingkungan Hidup	
										10	675.000	0	-	2	118.500	0	20.944	0	20.944	0%	18%	0	20.944	0%	3,10%	Dinas Lingkungan Hidup	
										2	647.000	0	-	2	169.300	0	17.456	0	17.456	0%	10%	0	17.456	0%	2,70%	Dinas Lingkungan Hidup	
2	2	2	1							12,25	17.053.000		-		2.767.646		240.430		240.430	#DIV/0!	9%	0%	240.430	0%	1%		
										88	8.561.500	0	-	41	1.417.328	30	87.746	30	87.746	73%	6%	30	87.746	34%	1,02%	Dinas Lingkungan Hidup	
										8	180.000	0	-	8	34.874	3	3.201	3	3.201	38%	9%	3	3.201	38%	1,78%	Dinas Lingkungan Hidup	
										3	430.000	0	-	3	37.955	0	480	0	480	0%	1%	0	480	0%	0,11%	Dinas Lingkungan Hidup	
										20	1.650.000	0	-	7	217.169	0	60.002	0	60.002	0%	28%	0	60.002	0%	3,64%	Dinas Lingkungan Hidup	
										36	5.085.500	0	-	5	840.500	0	89.002	0	89.002	0%	11%	0	89.002	0%	1,75%	Dinas Lingkungan Hidup	
										20	80.000	0	-	20	42.940	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup	
										25	828.000	0	-	15	141.880	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup	

1					2		3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
				8	Kegiatan Edukasi dan Kader lingkungan yang Aktif	Jumlah kader lingkungan yang aktif	peserta	100	238.000	0	-	100	35.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup	
2	2	2	1	8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	75	44.257.000		-		7.885.000		1.825.314		1.825.314	#DIV/0!	23%	0%	1.825.314	0%	4%		
				1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan	jenis	59	7.189.000	0	-	13	1.600.000	9	122.145	9	122.145	69%	8%	9	122.145	15%	1,70%	Dinas Lingkungan Hidup	
				2	Kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah	Jumlah ruas jalan yang ditangani	ruas jalan	11	19.219.000	0	-	11	3.049.000	0	1.230.676	0	1.230.676	0%	40%	0	1.230.676	0%	6,40%	Dinas Lingkungan Hidup	
				3	Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Jumlah kelurahan dalam pengelolaan sampah	kelurahan	27	4.449.000	0	-	27	795.000	0	31.032	0	31.032	0%	4%	0	31.032	0%	0,70%	Dinas Lingkungan Hidup	
				4	Kegiatan Peningkatan Kegiatan/ Usaha dalam Pengelolaan Limbah	Kegiatan / usaha yang melakukan pengelolaan limbah sesuai prosedur	perusahaan	22	265.000	0	-	15	41.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup	
				5	Kegiatan Operasional Pengelolaan Sampah Akhir dengan Metode Controlled Landfill	Jumlah zona pengelolaan sampah akhir	zona	1	11.900.000	0	-	1	2.200.000	0	441.460	0	441.460	0%	20%	0	441.460	0%	3,71%	Dinas Lingkungan Hidup	
				6	Kegiatan Peningkatan Kerja Sama kegiatan Usaha dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah kegiatan / usaha dan kelompok masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan sampah	orang	155	520.000	0	-	127	80.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup	
				7	Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura	Jumlah kecamatan dalam titik pantau penilaian adipura	Kecamatan	3	715.000	0	-	3	120.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup	

PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun Ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di Evaluasi Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																			
2	1	Tenaga Kerja.																		
2	2	Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan	%	98	31.158.835		-	1.993.213	248.508	248.508	#DIV/0!	12%	0%	248.508	0%	1%	Dinas Tenaga Kerja			
			%	60,25																
			%	86																
	1	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	kasus	63	431.000	0	-	12	72.776	10	15.995	10	15.995	83%	22%	10	15.995	16%	4%	Dinas Tenaga Kerja
	2	Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial dan Kelembagaan Ketenagakerjaan	perusahaan	1850	1.551.835	0	-	324	271.003	25	20.750	25	20.750	8%	8%	25	20.750	1%	1%	Dinas Tenaga Kerja
	3	Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	750	1.176.000	0	-	150	216.776	100	120.915	100	120.915	67%	56%	100	120.915	13%	10%	Dinas Tenaga Kerja
	4	Kegiatan Asuransi Tenaga Kerja Sektor Informal (SIAGA KITA)	Orang	25	28.000.000	0	-	21000	1.432.658	0	90.848	0	90.848	0%	6%	0	90.848	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja

1					2		3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
						K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
2	2	2	1	1	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	79	15.489.048		-		1.688.776		158.747		158.747	#DIV/0!	9%	0%	158.747	0%	1%	Dinas Tenaga Kerja	
						Persentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi dasar	%	95																	
				1	Kegiatan Updating data Pengangguran Tenaga Kerja	Tersedianya data ketenagakerjaan atau pengangguran	Dokumen	5	2.015.528	0	-	1	300.585	0	107.063	0	107.063	0%	36%	0	107.063	0%	5%	Dinas Tenaga Kerja	
				2	Kegiatan Penyebarluasan Optimalisasi Informasi Pasar Kerja dan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan di dalam negeri maupun diluar negeri	Orang	4650	1.958.520	0	-	910	149.171	197	37.284	197	37.284	22%	25%	197	37.284	4%	2%	Dinas Tenaga Kerja	
				3	Kegiatan Pameran Bursa Kerja Job Market Fair	Jumlah pencari kerja yang terserap di dunia kerja	Orang	1650	2.600.000	0	-	310	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja	
				4	Kegiatan penerapan Tehnologi Tepat Guna	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan penerapan tehnologi tepat guna	Angkatan Kerja	200	1.900.000	0	-	40	228.749	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja	
				5	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan ketrampilan berkmpeten	Orang	3225	6.330.000	0	-	515	871.306	23	14.400	23	14.400	4%	2%	23	14.400	1%	0%	Dinas Tenaga Kerja	
				6	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan	Jumlah wirausaha baru yang be kembang	Orang	200	685.000	0	-	40	138.965	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja	
2	2	2	1	7	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan	Persentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi nasional	%	98	3.620.000		-		200.000		-		-	#DIV/0!	0%	0%	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja	
				1	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah peserta pelatihan yang berkmpeten	orang	1000	3.620.000	0	-	200	200.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja	
3	8				Transmigrasi																				
3	3	2	1	5	Program Ketransmigrasian	Persentase pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	%	80	151.800		-		32.694		18.426		18.426	#DIV/0!	56%	0%	18.426	0%	12%	Dinas Tenaga Kerja	

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
				1	Kegiatan Penyelenggaraan ketransmigrasian	Jumlah sosialisasi ketransmigrasian	kegiatan			5	151.800	0	-	1	32.694	0	18.426	0	18.426	0%	56%	0	18.426	0%	12%	Dinas Tenaga Kerja	
2	1	2			Penanaman Modal																						
2	2	1	2	1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi	Persentase investor yang merealisasikan investasi	%			10	670.591		-		670.591		51.556		51.556	#DIV/0!	8%	0%	51.556	0%	8%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro	
				1	Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor baru	investor			70	472.366	0	-	10	472.366	3	39.736	3	39.736	30%	8%	3	39.736	4%	8%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro	
				2	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan/Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	perusahaan			100	198.225	0	-	10	198.225	6	11.821	6	11.821	60%	6%	6	11.821	6%	6%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro	
2	2	1	2	1	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase pengaduan pelayanan perizinan	%			0,9	508.400		-		271.237		148.383		148.383	#DIV/0!	55%	0%	148.383	0%	29%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro	
				1	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Perizinan.	Jumlah izin yang diterbitkan	izin			8000	61.000	0	-	1500	61.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro	
				2	Kegiatan Peningkatan Kualitas Perizinan	Jumlah Peserta Sosialisasi	peserta sosialisasi			1000	210.000	0	-	200	210.000	0	43.500	0	43.500	0%	21%	0	43.500	0%	21%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro	

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
				3	Kegiatan Evaluasi Perizinan Berusaha	Persentase pemenuhan komitmen	%	150	237.400	0	-	10	237	0	104.883	0	104.883	0%	44180%	0	104.883	0%	44%			Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro	
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																											
Unsur Staf																											
4	4	4	1		Program Stabilitas Ekonomi Daerah	Tingkat inflasi	%	4	4.240.000		-		460.000		-		-	#DIV/0!	0%	0%		-	0%	0%			
	0	0	8																								
	1	0	1																								
	0	1	0																								
	1	0	3																								
				1	Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Jenis kegiatan TPID	kegiatan	3	780.000	0	-	3	80.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%			Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
				2	Kegiatan Pembinaan BUMD	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	BUMD	3	1.670.000	0	-	3	380.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%			Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
				3	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan	kegiatan	3	1.790.000	0	-	1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%			Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
4	4	4	1		Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase jumlah kegiatan sosialisasi bidang cukai yang dilaksanakan	%		2.600.000		-		100.000		26.311		26.311	#DIV/0!	26%	0%	26.311	#DIV/0!	1%				
	0	0	9																								
	1	1	0																								
	0	1	0																								
	1	0	3																								
				1	Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/	Jumlah informasi yang disampaikan	Macam	3	1.790.000	0	-	3	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%			Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan	

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
																											Rakyat Sekretariat Daerah
				2	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	Jumlah Pemantauan dan evaluasi	kali	12	810.000	0	-	12	100.000	0	26.311	0	26.311	0%	26%	0	26.311	0%	3%				Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
4	4	0	1	2	5	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi	Persentase kelompok sosial ekonomi yang di fasilitasi	%	100	1.790.000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	-	0%	0%				
				1	Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jenis Kegiatan Promosi	jenis	2	1.790.000	0	-	2	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%				Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
3	7				Perindustrian																						
3	3	0	7	2	5	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase IKM yang berstandart	%	17,9	7.131.250	-	-	1.244.600	-	159.615	-	159.615	#DIV/0!	13%	0%	159.615	0%	2%				Dinas Tenaga Kerja
				1	Kegiatan Sosialisasi Penerapan dan Fasilitasi Standart Produk Industri (HKI) bagi IKM/IRT Kota Madiun	Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi HKI	Usaha Mikro	200	745.000	0	-	40	142.000	25	10.767	25	10.767	63%	8%	25	10.767	13%	1%				Dinas Tenaga Kerja
				2	Kegiatan Peningkatan Kewirausahaan Kuliner dan Diversifikasi Produk Industri Manufaktur dan Fasilitasi Ijin Teknis	Jumlah IKM yang mempunyai ijin PIRT	Usaha Mikro	20	251.000	0	-	20	48.600	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%				Dinas Tenaga Kerja
				3	Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil, Menengah Tk. Nasional; INACRAFT	Jumlah produk unggulan yang dipamerkan	Jenis	15	1.856.250	0	-	3	306.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%				Dinas Tenaga Kerja

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13		
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
				4	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan IKM/IRT oleh DEKRANASDA	Jumlah produk unggulan kerajinan handmade yang dipamerkan	Produk	28	1.500.000	0	-	5	300.000	2	55.827	2	55.827	40%	19%	2	55.827	7%	4%			Dinas Tenaga Kerja		
				5	Kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi IKM / IRT	Jumlah dokumen IKM yang belum berijin	Doc	1	130.000	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0%	0%			Dinas Tenaga Kerja		
				6	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan bagi IKM / IRT	Jumlah IKM/ IRT yang meningkat SDM nya	Usaha Mikro	700	2.649.000	0	-	140	448.000	30	93.020	30	93.020	21%	21%	30	93.020	4%	4%			Dinas Tenaga Kerja		
3	3	0	7	2	1	0	6																					
					Program Pembinaan Industri	Persentase IKM yang melaksanakan GMP	%	80	650.000	-	-		100.000		43.523		43.523	#DIV/0!	44%	0%	43.523	0%	7%			Dinas Tenaga Kerja		
				1	Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin rendah melalui fasilitas pengujian TAR dan Nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan Good Manufacturing Practices bagi industri hasil tembakau DBHCH	Jumlah pengujian kadar TAR dan Nikotin	Kegiatan	20	650.000	0	-	4	100.000	1	43.523	1	43.523	25%	44%	1	43.523	5%	7%			Dinas Tenaga Kerja		
3	6				Perdagangan																							
3	3	0	6	3	1	0	5																					
					Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	Persentase pertumbuhan perdagangan non pasar rakyat	%	0,5	7.958.132	-	-		1.435.000		327.234		327.234	#DIV/0!	23%	0%	327.234	0%	4%			Dinas Perdagangan		
				1	Kegiatan Promosi Produk Perdagangan	Jumlah jenis produk perdagangan yang dipromosikan	jenis	13	2.979.291	0	-	15	570.000	0	16.496	0	16.496	0%	3%	0	16.496	0%	1%			Dinas Perdagangan		
				2	Kegiatan Pen-binaan dan Pengawasan Perdagangan	Jumlah ketersediaan bahan pokok	jenis	9	280.835	0	-	9	50.000	0	2.713	0	2.713	0%	5%	0	2.713	0%	1%			Dinas Perdagangan		
				3	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)	buah	7000	1.801.005	0	-	7000	250.000	2214	69.808	2214	69.808	32%	28%	2214	69.808	32%	4%			Dinas Perdagangan		
				4	Kegiatan Peningkatan Mutu Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Prosentase kenaikan BDKT yang terjamin mutunya	%	20	213.678	0	-	20	25.000	2	-	2	-	10%	0%	2	-	10%	0%			Dinas Perdagangan		
				5	Kegiatan Pengawasan Perijinan Perdagangan	Jumlah pemohon perpanjangan perijinan	orang	75	200.920	0	-	75	35.000	20	-	20	-	27%	0%	20	-	27%	0%			Dinas Perdagangan		
				6	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PKL	Jumlah PKL dengan pendapatan diatas UMK	orang	600	793.680	0	-	400	265.000	400	238.218	400	238.218	100%	90%	400	238.218	67%	30%			Dinas Perdagangan		

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
				7	Kegiatan Membangun Jejaring Perdagangan Lintas Kota	Jumlah pengusaha yang bertransaksi antar kota	orang	30	223.500	0	-	20	80.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%			Dinas Perdagangan
				8	Kegiatan Pendataan Volume Perdagangan Kota Madiun	Jumlah Dokumen	doc	1	1.465.224	0	-	1	160.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%			Dinas Perdagangan
3	3	3	1		Program Pengelolaan Pasar Rakyat	Jumlah omset pasar rakyat	6E+08		23.717.000		-		6.341.941		2.029.846		2.029.846	#DIV/0!	32%	0%	2.029.846	#DIV/0!	9%			Dinas Perdagangan
				1	Kegiatan Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang dikembangkan fasilitas, sarana dan prasarananya	Pasar	17	6.650.000	0	-	18	1.952.102	1	349.381	1	349.381	6%	18%	1	349.381	6%	5%			Dinas Perdagangan
				2	Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Keamanan Pasar Rakyat	Jumlah Pasar yang ditingkatkan kebersihan dan keamanannya	pasar	17	13.555.000	0	-	18	3.486.199	7	1.480.106	7	1.480.106	39%	42%	7	1.480.106	41%	11%			Dinas Perdagangan
				3	Kegiatan Promosi Pasar Rakyat	Prosentase peningkatan omset rata-rata/tahun pasar rakyat	Milyar Rp	640	3.512.000	0	-	640	903.640	35	200.358	35	200.358	5%	22%	35	200.358	5%	6%			Dinas Perdagangan
3	3	3	1		Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Jumlah barang kena cukai ilegal	-	0	250.000		-		50.000		43.502		43.502	#DIV/0!	87%	0%	43.502	#DIV/0!	17%			Dinas Perdagangan
				1	Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau dilekati Pita Cukai Palsu, tidak dilekati Pita Cukai	Jumlah informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu	unit	5	250.000	0	-	1	50.000	0	43.502	0	43.502	0%	87%	0	43.502	0%	17%			Dinas Perdagangan
2	1	1			Koperasi Usaha Kecil dan Menengah																					
2	2	2	1		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	96,77	1.194.010		-		1.194.010		52.301		52.301	#DIV/0!	4%	0%	52.301	0%	4%			Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
				1	Kegiatan Pemeringkatan Koperasi dan Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian.	Jumlah Koperasi Aktif	koperasi	155	513.000	0	-	151	513.000	0	16.821	0	16.821	0%	3%	0	16.821	0%	3%			Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro

1				2		3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RF	
				2	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi	Jumlah Koperasi dengan omzet meningkat	koperasi	110	190.000	0	-	20	190.000	0	10.821	0	10.821	0%	6%	0	10.821	0%	6%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
				3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK)	Jumlah Koperasi dengan Aktif	koperasi	755	491.010	0	-	151	491.010	0	24.660	0	24.660	0%	5%	0	24.660	0%	5%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
2	2	2	1		Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan usaha mikro	%	0,41	1.010.000		-		1.010.000		111.045		111.045	#DIV/0!	11%	0%	111.045	0%	11%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
				1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Madiun	Jumlah Wira Usaha Baru	WUB	460	1.010.000	0	-	87	1.010.000	3	111.045	3	111.045	3%	11%	3	111.045	1%	10,99%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
3	2				Pariwisata																			
3	3	7	1		Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Jumlah promosi dan peningkatan sumber daya wisata	kali	8	12.650.000		-		1.798.254		91.437		91.437	#D\ V/0!	5%	0%	91.437	0%	1%	
				1	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	event	10	3.250.000	0	-	2	398.254	0	45.096	0	45.096	0%	11%	0	45.096	0,00%	1,39%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				2	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam Negeri	Jumlah Promosi Pariwisata	jumlah promosi	17	5.200.000	0	-	3	750.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				3	Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pemberdayaan Pariwisata yang diselenggarakan	event	13	4.200.000	0	-	2	650.000	1	46.341	1	46.341	50%	7%	1	46.341	7,69%	1,10%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

1					2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
				3	Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu	Jumlah peserta sosialisasi	orang	420	495.676	0	-	330	83.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Sosial			
				4	Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah lembaga fakom dan panti asuhan anak yang aktif	lembaga	10	3.795.723	0	-	7	520.818	0	117.694	0	117.694	0%	23%	0	117.694	0%	3%	Dinas Sosial			
				5	Kegiatan Peningkatan dan Penanganan PMKS Pangan	Jumlah PMKS yang tertangani	orang	415	3.650.680	0	-	415	705.748	0	3.118.592	0	3.118.592	0%	442%	0	3.118.592	0%	85%	Dinas Sosial			
2	2	3	1		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor pola pangan harapan	indeks	95,6	7.587.000		-		1.298.000		278.973		278.973	#DIV/0!	21%	0%	278.973	0%	4%				
				1	Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah Produksi pangan hasil pekarangan/kawasan Rumah Pangan Lestari	Kg	2500	740.000	0	-	1700	135.000	140	72.796	140	72.796	8%	54%	140	72.796	6%	10%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
				2	Kegiatan Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Jumlah Dokumen Ketersediaan dan kerawanan pangan	doc	15	475.000	0	-	3	83.000	0	28.648	0	28.648	0%	35%	0	28.648	0%	6%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
				3	Kegiatan Promosi Pola Konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang, Sehat dan Aman	Jumlah Menu Konsumsi Olahan Pangan yang tercipta	produk	250	2.420.000	0	-	180	400.000	0	59.899	0	59.899	0%	15%	0	59.899	0%	2%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
				4	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Pangan	Prosentase sample pangan segar dan olahan aman dikonsumsi	%	86,4	2.500.000	0	-	85,2	450.000	0	101.965	0	101.965	0%	23%	0	101.965	0%	4%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
				5	Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Jumlah Dokumen Informasi Harga, Pasokan, Dan Akses Pangan	doc	4	502.000	0	-	4	80.000	0	12.205	0	12.205	0%	15%	0	12.205	0%	2%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
				6	Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Daerah dan Masyarakat	ton	128	950.000	0	-	120	150.000	0	3.460	0	3.460	0%	2%	0	3.460	0%	0%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																											
Kelautan dan Perikanan																											
3	3	3	1		Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan	%	1	4.840.000		-		813.000		134.266		134.266	#DIV/0!	17%	0%	134.266	0%	3%				
				1	Kegiatan Pendampingan, Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap	ton	401	1.560.000	0	-	367	260.000	120	126.001	120	126.001	33%	48%	120	126.001	30%	8%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
										K Rp. (000)		K Rp. (000)		K Rp. (000)		K RP		K RP		K RP		K RP				
3				Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak/ Hewan Peliharaan		Jumlah ternak dan hewan peliharaan yang terlayani/terperiksa		ekor		3200 1.165.000		0 -		3000 220.000		350 6.762		350 6.762		12% 3%		350 6.762		11% 1%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4				Kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Prosentase sampel bahan pangan asal hewan yang ASUHH (AMAN SEHAT UTUH DAN HALAL)		%		95,75 1.100.000		0 -		94,75 200.000		0 32.595		0 32.595		0% 16%		0 32.595		0% 3%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun Ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di Evaluasi Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1				2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
							K Rp. (000)		K Rp. (000)		K Rp. (000)		K Rp. (000)		K RP		K RP		K RP		K RP		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR																			
4 7				Penelitian dan Pengembangan																			
4 4 4 1 0 0 5 7 4 0 1				Program Pengembangan Kajian dan Penelitian			675.000 -		668.250		39.306		39.306		#DIV/0! 6%		0% 39.306		#DIV/0! 6%				
1				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan Umum	jumlah dokumen	doc	3 325.000		0 -		3 325.000		0 27.761		0 27.761		0% 9%		0 27.761		0% 8,54%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana	jumlah dokumen	doc	3 350.000		0 -		3 343.250		0 11.545		0 11.545		0% 3%		0 11.545		0% 3,30%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3				Kegiatan Penyelenggaraan Riset Daerah	Jumlah Penyelenggaraan	kegiatan	0 -		0 -		1 -		0 -		0 -		0% #DIV/0!		0 -		#DIV/0! #DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4				Kegiatan Lokakarya/Seminar Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Peserta	Orang	800 -		0 -		800 -		0 -		0 -		0% #DIV/0!		0 -		0% #DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
4	4																										
4	4	4	1						1.367.525		-		1.459.083		577.282		577.282	#DIV/0!	40%	0%	577.282	#DIV/0!	42%				
				1	Kegiatan Perencanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen	doc	7	1.150.000	0	-	7	1.148.245	1	441.361	1	441.361	14%	38%	1	441.361	14%	38%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				2	Kegiatan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Jumlah Dokumen	doc	30	120.000	0	-	6	213.313	1	39.346	1	39.346	17%	18%	1	39.346	3%	33%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				3	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan Aplikasi Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi	1	97.525	0	-	1	97.525	1	96.575	1	96.575	100%	99%	1	96.575	100%	99%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
4	4	4	1						263.000		-		297.056		104.317		104.317	#DIV/0!	35%	0%	104.317	#DIV/0!	40%				
				1	Kegiatan Perencanaan Bidang Ekonomi	jumlah dokumen	doc	2	138.000	0	-	2	171.850	0	73.525	0	73.525	0%	43%	0	73.525	0%	53%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				2	Kegiatan Perencanaan Bidang Sosial Budaya	jumlah dokumen	doc	1	125.000	0	-	1	125.206	0	30.792	0	30.792	0%	25%	0	30.792	0%	25%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
4	4	4	1						541.962		-		541.962		56.079		56.079	#DIV/0!	10%	0%	56.079	#DIV/0!	10%				
				1	Kegiatan Perencanaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	jumlah dokumen	doc	1	418.256	0	-	1	418.256	0	28.604	0	28.604	0%	7%	0	28.604	0%	7%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				2	Kegiatan Perencanaan Sarana dan Prasarana Perkotaan	jumlah dokumen	doc	1	123.706	0	-	1	123.706	0	27.476	0	27.476	0%	22%	0	27.476	0%	22%			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

1				2		3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
			1	Kegiatan Penempatan PNS	Jumlah Penempatan PNS	PNS	3026	331.318	0	-	386	331.318	299	20.000	299	20.000	77%	6%	299	20.000	10%	6%	Badan Kepegawaian Daerah	
4	4	4	1	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur			3.936.708		-		5.404.168		852.987		852.987	#DIV/0!	16%	0%	852.987	#DIV/0!	22%			
			1	Kegiatan Diklat teknis dan Fungsional	Jumlah Peserta	PNS	1480	1.206.008	0	-	280	1.206.008	18	261.859	18	261.859	6%	22%	18	261.859	1%	22%	Badan Kepegawaian Daerah	
			2	Kegiatan Diklat Kepemimpinan	Jumlah Peserta	PNS	190	1.050.000	0	-	50	1.312.600	30	591.127	30	591.127	60%	45%	30	591.127	16%	56%	Badan Kepegawaian Daerah	
			3	Kegiatan Pembekalan CPNS	Jumlah Peserta	PNS	990	75.000	0	-	198	63.960	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Kepegawaian Daerah	
			4	Kegiatan Latihan Dasar CPNS	Jumlah Peserta	PNS	990	1.050.000	0	-	198	2.265.900	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Kepegawaian Daerah	
			5	Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Workshop	Jumlah Peserta	peserta	500	67.200	0	-	100	67.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Kepegawaian Daerah	
			6	Kegiatan Assesment Pegawai	Jumlah Peserta	PNS	200	488.500	0	-	40	488.500	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Kepegawaian Daerah	
4	9			Kecamatan																				
4	4	4	1	Program Penyelenggaraan Kelurahan			17.181.481		-		15.086.891		4.851.210		4.851.210	#DIV/0!	32%	0%	4.851.210	#DIV/0!	28%			
			1	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Madiun Lor	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan madiun lor	%	99,6	606.063	0	-	100	606.063	24,9	244.206	24,9	244.206	25%	40%	24,9	244.206	25%	40,29%	Kecamatan Manguharjo	
			2	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Manguharjo	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan manguharjo	%	99,6	634.835	0	-	100	634.835	24,9	227.753	24,9	227.753	25%	36%	24,9	227.753	25%	35,88%	Kecamatan Manguharjo	

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	3	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Kidul	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Nambangan Kidul	%	99,6	673.326	0	-	100	751.035	24,9	262.834	24,9	262.834	25%	35%	24,9	262.834	25%	39,04%	Kecamatan Manguharjo
	4	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Lor	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan nambangan lor	%	99,6	751.035	0	-	100	751.035	24,9	224.223	24,9	224.223	25%	30%	24,9	224.223	25%	29,86%	Kecamatan Manguharjo
	5	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Ngegong	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan ngegong	%	99,6	496.325	0	-	100	496.325	24,9	129.994	24,9	129.994	25%	26%	24,9	129.994	25%	26,19%	Kecamatan Manguharjo
	6	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan pangongangan	%	99,6	515.310	0	-	100	515.310	24,9	159.867	24,9	159.867	25%	31%	24,9	159.867	25%	31,02%	Kecamatan Manguharjo
	7	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Patihan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan patihan	%	99,6	523.047	0	-	100	523.047	24,9	190.924	24,9	190.924	25%	37%	24,9	190.924	25%	36,50%	Kecamatan Manguharjo
	8	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sogaten	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sngaten	%	99,6	564.459	0	-	100	564.459	24,9	155.224	24,9	155.224	25%	27%	24,9	155.224	25%	27,50%	Kecamatan Manguharjo
	9	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Winongo	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan winongo	%	99,6	638.319	0	-	100	638.319	24,9	214.946	24,9	214.946	25%	34%	24,9	214.946	25%	33,67%	Kecamatan Manguharjo
	#	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kartoharjo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kartoharjo	%	500	2.715.874	0	-	100	543.175	41,5	161.820	41,5	161.820	42%	30%	41,5	161.820	8%	5,96%	Kecamatan Kartoharjo
	#	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kanigoro	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kanigoro	%	500	630.449	0	-	100	630.449	41,5	209.811	41,5	209.811	42%	33%	41,5	209.811	8%	33,28%	Kecamatan Kartoharjo
	#	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pilangbango	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	500	530.965	0	-	100	530.965	41,5	191.409	41,5	191.409	42%	36%	41,5	191.409	8%	36,05%	Kecamatan Kartoharjo

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
						Pilangbango																					
		#	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Oro-Oro Ombo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Oro-Oro Ombo	%	500	581.025	0	-	100	581.025	41,5	174.215	41,5	174.215	42%	30%	41,5	174.215	8%	29,98%	Kecamatan Kartoharjo					
		#	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Klegen	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Klegen	%	500	626.495	0	-	100	626.495	41,5	179.646	41,5	179.646	42%	29%	41,5	179.646	8%	28,67%	Kecamatan Kartoharjo					
		#	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Sukosari	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Sukosari	%	500	473.621	0	-	100	473.621	41,5	173.618	41,5	173.618	42%	37%	41,5	173.618	8%	36,66%	Kecamatan Kartoharjo					
		#	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Tawangrejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Tawangrejo	%	500	504.397	0	-	100	504.397	41,5	149.893	41,5	149.893	42%	30%	41,5	149.893	8%	29,72%	Kecamatan Kartoharjo					
		#	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Kelun	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Kelun	%	500	529.547	0	-	100	529.547	41,5	157.772	41,5	157.772	42%	30%	41,5	157.772	8%	29,79%	Kecamatan Kartoharjo					
		#	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Rejomulyo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Rejomulyo	%	500	604.125	0	-	100	604.125	41,5	174.667	41,5	174.667	42%	29%	41,5	174.667	8%	28,91%	Kecamatan Kartoharjo					
		#	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Mojorejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan mojorejo	%	100	569.187	0	-	100	569.187	0	204.887	0	204.887	0%	36%	0	204.887	0%	36,00%	Kecamatan Taman					
		#	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pandean	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Pandean	%	100	544.210	0	-	100	544.210	0	165.450	0	165.450	0%	30%	0	165.450	0%	30,40%	Kecamatan Taman					
		#	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Banjarejo	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan Banjarejo	%	100	482.411	0	-	100	482.411	0	168.063	0	168.063	0%	35%	0	168.063	0%	34,84%	Kecamatan Taman					

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
				1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan	Obrik	18	2.777.048	0	-	18	400.143	1	60.061	1	60.061	6%	15%	1	60.061	6%	2%	Inspektorat		
				2	Kegiatan Evaluasi SPIP Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang dievaluasi SPIP-nya	OPD	34	269.830	0	-	34	44.430	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat		
				3	Kegiatan Reviu Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil reviu	doc	30	633.500	0	-	6	156.684	1	58.035	1	58.035	17%	37%	-1	58.035	3%	9%	Inspektorat		
				4	Kegiatan Pembinaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pembinaan	orang	750	226.150	0	-	150	36.150	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat		
				6	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan	doc	25	1.946.270	0	-	5	411.623	2	68.103	2	68.103	40%	17%	2	68.103	8%	3%	Inspektorat		
				7	Kegiatan Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Laporan	doc	1	1.631.150	0	-	1	266.650	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat		
				8	Kegiatan Optimalisasi Saber Pungli	Jumlah Laporan	doc	1	3.726.600	0	-	1	862.260	0	279.310	0	279.310	0%	32%	0	279.310	0%	7%	Inspektorat		
4	4	4	1		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			3.203.063		-		584.678		184.819		184.819	#DIV/0!	32%	0%	184.819	#DIV/0!	6%				
				1	Kegiatan Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur pengawas yang bersertifikat teknik	orang	25	3.203.063	0	-	25	584.678	0	184.819	0	184.819	0%	32%	0	184.819	0%	0%	Inspektorat		
4	4	4	1		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan			138.150		-		22.650		-		-	#DIV/0!	0%	0%	-	#DIV/0!	0%				
				1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Sisdur Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	doc	2	138.150	0	-	2	22.650	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Inspektorat		
4	5				Keuangan																					
4	4	4	1		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			6.267.652		-		1.194.229		380.449		380.449	#DIV/0!	32%	0%	380.449	#DIV/0!	6%				

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
			1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan keuangan daerah	doc	3	600.000	0	-	3	100.000	0	5.600	0	5.600	0%	6%	0	5.600	0%	1%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			2	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah produk hukum	produk hukum	2	1.512.152	0	-	2	280.000	0	125.849	0	125.849	0%	45%	0	125.849	0%	8%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			3	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis	buku	2	250.000	0	-	2	40.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			4	Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah peserta bimtek	orang	500	1.175.000	0	-	500	228.129	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			5	Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pendampingan dengan OPD	kali	30	2.730.500	0	-	30	546.100	0	249.000	0	249.000	0%	46%	0	249.000	0%	9%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4	4	4	1	Program Pengelolaan Anggaran Daerah					3.825.875		-		967.592		202.139		202.139	#DIV/0!	21%	0%	202.139	#DIV/0!	5%			
	0	0	5																							
			1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran	doc	2	295.000	0	-	2	68.529	0	47.862	0	47.862	0%	70%	0	47.862	0%	16%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			2	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD	Jumlah produk hukum	produk hukum	4	1.850.000	0	-	4	454.414	0	82.200	0	82.200	0%	18%	0	82.200	0%	4%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			3	Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus	Jumlah dokumen standar biaya	doc	10	769.000	0	-	2	304.650	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			4	Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah	Jumlah perbaikan/penambahan fitur aplikasi	fitur	5	911.875	0	-	5	139.999	0	72.077	0	72.077	0%	51%	0	72.077	0%	8%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4	4	4	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah					1.078.119		-		250.000		55.333		55.333	#DIV/0!	22%	0%	55.333	#DIV/0!	5%			
	0	0	5																							
			1	Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan SPD dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Jumlah dokumen pengeluaran kas	doc	3	523.140	0	-	3	120.000	0	16.235	0	16.235	0%	14%	0	16.235	0%	3%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
				2	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji/ Kas Daerah	Jumlah dokumen administrasi gaji/kasda	doc kasda	70	554.979	0	-	55	130.000	0	39.098	0	39.098	0%	30%	0	39.098	0%	7%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4	4	4	1		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah				23.263.581		-		5.244.980		133.751		133.751	#DIV/0!	3%	0%	133.751	#DIV/0!	1%				
				1	Kegiatan Penyelenggaraan Asuransi Barang Milik Daerah Kota Madiun	Jumlah aset daerah yang diasuransikan	jenis	2	17.500.000	0	-	2	3.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				2	Kegiatan Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi	buku	18	295.000	0	-	18	50.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				3	Kegiatan Optimalisasi, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	tanah/ bangunan	5	3.968.581	0	-	5	1.944.980	0	113.143	0	113.143	0%	6%	0	113.143	0%	3%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				4	Kegiatan Perencanaan dan Penukasaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah	doc	2	1.500.000	0	-	2	250.000	0	20.609	0	20.609	0%	8%	0	20.609	0%	1%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4	4	4	1		Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah				153.375		-		453.375		3.300		3.300	#DIV/0!	1%	0%	3.300	#DIV/0!	2%				
				1	Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Obyek Pajak Daerah	Tersedianya basis data yang update	WP	750	22.175	0	-	150	422.175	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%			Badan Pendapatan Daerah	
				3	Kegiatan Cetak Masal dan Penyampaian SPPT	Jumlah penerbitan SPPT PBB dan DHKP	SPPT	55000	25.000	0	-	55000	25.000	0	3.300	0	3.300	0%	13%	0	3.300	0%	13%			Badan Pendapatan Daerah	
				4	Kegiatan Pemeliharaan Frame Reklame	Tersedianya frame yang bersih dan rapi	Titik	32	75.000	0	-	32	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%			Badan Pendapatan Daerah	
				5	Kegiatan Monitoring Rekonsiliasi dan Pelaporan Penerimaan BPHTB	Jumlah pihak yang terkait (BPN dan notaris)	orang	50	6.200	0	-	50	6.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%			Badan Pendapatan Daerah	
				6	Kegiatan Evaluasi Penyampaian SPPT PBB	Petugas penyampaian SPPT kelurahan	orang	300	25.000	0	-	300	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%			Badan Pendapatan Daerah	
4	4	4	2		Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah				1.022.705		-		981.120		-		-	#DIV/0!	0%	0%	-	#DIV/0!	0%				

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
			1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak Berprestasi dan Gebyar Undian PBB	Pemberian penghargaan wajib pajak berprestasi dan gebyar undian PBB	WP	207	300.000	0	-	207	310.175	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%			Badan Pendapatan Daerah		
			2	Kegiatan Verifikasi Data Piutang Pajak	Penyelesaian piutang pajak	WP	22	1.000	0	-	22	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%			Badan Pendapatan Daerah		
			3	Kegiatan Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan kesadaran petugas pungut PBB	petugas pungut	150	166.980	0	-	150	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%			Badan Pendapatan Daerah		
			4	Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	Pemberian souvenir kepada wajib pajak PBB	sovenir	5500	497.475	0	-	5500	497.475	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%			Badan Pendapatan Daerah		
			5	Kegiatan Rekonsiliasi dan Pembinaan Petugas Pungut	Peningkatan capaian penerimaan pajak daerah	petugas pungut	326	56.250	0	-	326	173.470	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%			Badan Pendapatan Daerah		
			6	Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	Peningkatan kepatuhan WP terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan daerah	orang	10	1.000	0	-	2	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%			Badan Pendapatan Daerah		
4	5			Unsur Staf																							
4	4	#	1	Program Peningkatan Fasilitas: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			5.278.448		-		864.597		56.490		56.490	#DIV/0!	7%	0%	56.490	#DIV/0!	1%						
	0	#	5																								
	1	#																									
		#																									
		#																									
			1	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah personil PD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang/jasa	orang	250	1.349.365	0	-	170	221.023	170	56.490	170	56.490	100%	26%	170	56.490	68%	4%			Bagian Administrasi Pembangunan		
			2	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilelang	paket	820	2.160.864	0	-	160	353.944	35	-	35	-	22%	0%	35	-	4%	0%			Bagian Administrasi Pembangunan		
			3	Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dan Standar Kegiatan Konstruksi	Jumlah dokumen yang disusun	doc	1	1.361.230	0	-	1	222.966	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%			Bagian Administrasi Pembangunan		
			1	Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Operasional	Jumlah dokumen yang disusun	Doc	1	406.990	0	-	1	66.664	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%			Bagian Administrasi Pembangunan		

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
4	4	#	2		Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan						860.227		-		140.903		31.457		31.457	#DIV/0!	22%	0%	31.457	#DIV/0!	4%	
				1	Kegiatan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen/laporan	doc		12	860.227	0	-	12	140.903	1	31.457	1	31.457	8%	22%	1	31.457	8%	4%		Bagian Administrasi Pembangunan
4	5				Kecamatan																					
4	4	4	1		Program Dana Kelurahan						9.494.469		-		9.494.469		-		-	#DIV/0!	0%	0%	-	#DIV/0!	0%	
				1	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madiun Lor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	150.000	0	-	4	150.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%			Kecamatan Manguharjo
				2	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manguharjo	Jumlah sarana dan prasarana yg terpenuhi	unit	4	250.000	0	-	4	250.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%			Kecamatan Manguharjo
				3	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambangan Kidul	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	250.000	0	-	4	250.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%			Kecamatan Manguharjo
				4	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambangan Lor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	250.000	0	-	4	250.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%			Kecamatan Manguharjo
				5	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngegong	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	150.000	0	-	4	150.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%			Kecamatan Manguharjo
				6	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangongangan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	250.000	0	-	4	250.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%			Kecamatan Manguharjo
				7	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patihan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	250.000	0	-	4	250.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%			Kecamatan Manguharjo

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	8	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sogaten	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	250.000	0	-	4	250.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo
	9	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Winongo	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	unit	4	250000	0	0	4	250.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo
	#	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kartoharjo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	211.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
	#	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klegen	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	211.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
	#	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukosari	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	211.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
	#	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tawangrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	211.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
	#	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	211.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
	#	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kanigoro	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	211.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
	#	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Oro- oro Ombo	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	211.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
	#	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pilangbango	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	211.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
	#	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelun	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terpenuhi	paket	2	211.200	0	-	2	211.200	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	# Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman	Jumlah Saran dan Prasarana yang terpenuhi	unit	2	100.000	0	-	2	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman
	# Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kuncen	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	unit	2	100.000	0	-	2	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman
	# Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kejuron	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	unit	2	100.000	0	-	2	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman
	# Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Josenan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	unit	2	100.000	0	-	2	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman
	# Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manisrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	unit	2	100.000	0	-	2	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman
	# Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Demangan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	unit	2	100.000	0	-	2	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman
	# Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	unit	2	100.000	0	-	2	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman
	# Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandean	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	unit	2	100.000	0	-	2	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman
	# Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjarejo	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	unit	2	100.000	0	-	2	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman
	# Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manguharjo	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	40	100.000	0	-	40	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo
	# Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nambangan Kidul	prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	45	100.000	0	-	45	100.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Manguharjo

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	#	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukosari	kegiatan pemberdayaan masyarakat Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	10	140.800	0	-	10	140.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
	#	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tawangrejo	kegiatan pemberdayaan masyarakat Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	10	140.800	0	-	10	140.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
	#	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejomulyo	kegiatan pemberdayaan masyarakat Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	10	140.800	0	-	10	140.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
	#	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kanigoro	kegiatan pemberdayaan masyarakat Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	10	140.800	0	-	10	140.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
	#	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Oro-oro Ombo	kegiatan pemberdayaan masyarakat Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	10	140.800	0	-	10	140.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
	#	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pilangbango	kegiatan pemberdayaan masyarakat Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	10	140.800	0	-	10	140.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
	#	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelun	kegiatan pemberdayaan masyarakat Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	10	140.800	0	-	10	140.800	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
	#	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Taman	kegiatan pemberdayaan masyarakat Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan Masyarakat	%	10	252.941	0	-	10	252.941	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman
	#	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuncen	kegiatan pemberdayaan masyarakat Prosentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Keg. Pemberdayaan	%	10	252.941	0	-	10	252.941	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Taman

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13				
										K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K		Rp.		K		RP		K		RP		
				2	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Media	Jumlah pertemuan	kali	60	900.000	0	-	12	900.000	2	161.267	2	161.267	17%	18%	2	161.267	3%	18%	Dinas Komunikasi dan Informatika						
				3	Kegiatan Produksi Konten Informasi Publik	Jumlah media yang dikelola Pemerintah Daerah	Media	5	2.500.000	0	-	5	2.500.000	5	637.270	5	637.270	100%	25%	5	637.270	100%	25%	Dinas Komunikasi dan Informatika						
				4	Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kelompok	27	750.000	0	-	27	750.000	27	103.945	27	103.945	100%	14%	27	103.945	100%	14%	Dinas Komunikasi dan Informatika						
				5	Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik Statistik	Jumlah permohonan informasi yang ditindak lanjuti	%	100	600.000	0	-	100	594.000	0	56.660	0	56.660	0%	10%	0	56.660	0%	9%	Dinas Komunikasi dan Informatika						
2	1								600.000		-		570.000		108.934		108.934	#DIV/0!	19%	0%	108.934	#DIV/0!	18%	Dinas Komunikasi dan Informatika						
2	4				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral																									
2	1	2	1	1	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Desiminasi Data Statistik Daerah Kearsipan	Jumlah dokumen statistik	Doc	5	600.000	0	-	5	570.000	0	108.934	0	108.934	0%	19%	0	108.934	0%	18%	Dinas Komunikasi dan Informatika						
2	8								610.000		-		610.000		136.430		136.430	#DIV/0!	22%	0%	136.430	#DIV/0!	22%							
2	1	2	1	1	Kegiatan Pengelolaan dan Layanan Arsip	Jumlah Unit Kearsipan	unit	15	315.000	0	-	2	315.000	1	110.301	1	110.301	50%	35%	1	110.301	7%	35%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						
2	2	2	1	1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Jumlah SDM Pengelola Arsip	orang	131	295.000	0	-	131	295.000	0	26.128	0	26.128	0%	9%	0	26.128	0%	9%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						
2	0				Komunikasi dan Informatika																									
2	2	2	1	1	Kegiatan Pengelolaan dan Layanan Arsip	Jumlah Unit Kearsipan	unit	15	315.000	0	-	2	315.000	1	110.301	1	110.301	50%	35%	1	110.301	7%	35%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						
2	1	1	7		Program Sosialisasi di Bidang Cukai				500.000		-		1.599.000		309.274		309.274	#DIV/0!	19%	0%	309.274	#DIV/0!	62%	Dinas Komunikasi dan Informatika						
2	0	0	1	1	Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-Undangan dibidang Cukai kepada Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah Event	kali	60	500.000	0	-	12	1.599.000	1	309.274	1	309.274	8%	19%	1	309.274	2%	62%	Dinas Komunikasi dan Informatika						

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13																
										K		Rp. (000)		K		Rp. (000)		K		RP		K		RP		K		RP														
				FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN																																						
4 1				Unsur Staf																																						
4 4 4 2				Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Kinerja		%		1.048.150		-		927.550		62.507		62.507		#DIV/0!		7%		0%		62.507		#DIV/0!		6%												
0 0 3																																										
1 1 0 1																																										
				1 Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Jumlah OPD capai Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 80%		OPD		40		350.000		0		-		8		70.000		0		345		0		345		0%		0%		Bagian Organisasi								
				2 Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		Jumlah OPD yang nilai SAKIPnya minimal BB		OPD		235.000		0		-		29		235.000		0		41.184		0		41.184		0%		18%		#DIV/0!	18%		Bagian Organisasi							
				3 Kegiatan Pembinaan Kelompok Budaya Kinerja		Jumlah Kelompok Budaya: Kinerja		OPD		65		208.150		0		-		13		208.150		0		-		0		-		0%		0%		Bagian Organisasi								
				4 Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah		Jumlah OPD yang besaran dan urusan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku		OPD		29		-		0		-		29		159.400		0		20.978		0		20.978		0%		13%		0	20.978		0%		#DIV/0!		Bagian Organisasi	
				5 Kegiatan Standarisasi Penataan Jabatan		Jumlah OPD yang penataan Jabatannya sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku		OPD		29		255.000		0		-		29		255.000		0		-		0		-		0%		0%		0	-		0%		0%		Bagian Organisasi	

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			3		Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya	Prosentase Peningkatan Keragaman Budaya yang Terfasilitasi	%	55	24.700.000	0	-	11	3.620.000	5	177.964	5	177.964	45%	5%	5	177.964	9%	0,72%		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
				FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN																							
				Unsur Staf																							
4	1																										
4	4	4	1		Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	%	100	22.289.164	-	-		4.129.164		545.250		545.250	#DIV/0!	13%	0%	545.250	0%	2%				
	0	0	7																								
	1	1																									
	0	1																									
	1	0																									
	0	1																									
	0	0																									
	3																										
			1		Kegiatan Peningkatan Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah peringatan hari besar islam (PHBI) dan Kegiatan Keagamaan lainnya	kegiatan	15	19.479.164	0	-	15	3.679.164	0	545.250	0	545.250	0%	15%	0	545.250	0%	3%		Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah		
			2		Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Haji	Jumlah calon jamaah haji yang terdaftar	orang	170	1.450.000	0	-	170	250.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%		Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah		
			3		Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota	Jumlah peserta yang lolos seleksi	cabang	10	660.000	0	-	10	200.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%		Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah		
			4		Kegiatan Pengiriman kafilah MTQ	Jumlah peserta yang menjadi juara tingkat kota	cabang	0	700.000	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	0%		Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah		
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR																							

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13					
				K	Rp	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	2	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	Jumlah peerta pengelolaan keuangan Parpol	orang	33	25.000	0	-	33	25.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	3	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Orkesmas	Jumlah peserta	orang	300	87.985	0	-	300	87.985	100	54.459	100	54.459	33%	62%	100	54.459	33%	61,90%					
2	5	Ketentruman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																							
1	1 0 5 0 1	1	1	5	Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	persentase perda yang ditegakan	%	100	1.810.000	-	335.000	121.525	121.525	#DIV/0!	36%	0%	121.525	0%	7%						
		1			1	Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Prosentase penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwal	100%	500	670.000	0	0	100	125.000	50	35.186	50	35.186	50%	28%	50	35.186	10%	5%	Satuan Polisi Pamong Praja
		2			2	Kegiatan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Prosentase Peserta yang paham terhadap Perda dan Perwal	100%	500	1.140.000	0	0	100	210.000	41	86.339	41	86.339	41%	41%	41	86.339	8%	8%	Satuan Polisi Pamong Praja
1	1 0 5 0 1	1	1	6	Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentruman Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%	96	10.845.840	-	1.992.757	451.151	451.151	#DIV/0!	23%	0%	451.151	0%	4%						
		1			1	Kegiatan Peningkatan SDA dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Prosentase Aparatur Satpol PP dan Damkar yang mengikuti kegiatan	80%	420	2.750.000	0	-	80	450.000	50	67.556	50	67.556	63%	15%	50	67.556	12%	2%	Satuan Polisi Pamong Praja
		2			2	Kegiatan Pengamanan Kegiatan Pemerintah	Prosentase kegiatan pengamanan	100%	500	1.582.055	0	-	100	240.000	60	36.565	60	36.565	60%	15%	60	36.565	12%	2%	Satuan Polisi Pamong Praja
		3			3	Kegiatan Penertiban dan Evaluasi Ketertiban Umum dan Ketentruman Masyarakat	Prosentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentruman, Keindahan)	96%	483	6.513.785	0	-	96	1.302.757	55	347.031	55	347.031	57%	27%	55	347.031	11%	5%	Satuan Polisi Pamong Praja
1	1 0 5	1	1	7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	org	1,3	3.725.100	-	865.020	20.431	20.431	#DIV/0!	2%	0%	20.431	0%	1%						
		1			1	Kegiatan Pemberdayaan dan Evaluasi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Masyarakat pesilat yang berpartisipasi dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	90%	470	2.975.100	0	-	90	715.020	0	15.231	0	15.231	0%	2%	0	15.231	0%	1%	Satuan Polisi Pamong Praja

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
								K	Rp	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1	0	5	1	1	8	2	Kegiatan Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	Prosentase Personil Satlinmas yang mengikuti kegiatan	75%	385	750.000	0	-	75	150.000	4	5.200	4	5.200	5%	3%	4	5.200	1%	1%	Satuan Polisi Pamong Praja
								Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat wktu tanggap	%	100	7.234.198	-	-	1.180.670	438.587	438.587	#DIV/0!	37%	0%	438.587	0%	6%				
1	4						1	Kegiatan Pencegahan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran	Prosentase Anggota Damkar yang bersertifikat	100%	420	5.186.585	0	-	80	904.200	60	290.350	60	290.350	75%	32%	60	290.350	14%	6%	Satuan Polisi Pamong Praja
							2	Kegiatan Operasi dan Evaluasi Penanggulangan Pemadam Kebakaran	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran	100%	500	2.047.613	0	-	100	276.470	60	148.237	60	148.237	60%	54%	60	148.237	12%	7%	Satuan Polisi Pamong Praja
1	1	0	5	1	1	9		Program Pencegahan Diri dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase penganggulangan bencana	%	100	7.810.000	-	-	1.587.555	650.263	650.263	#DIV/0!	41%	0%	650.263	0%	8%				
									Persentase tingkat pemenuhan atau kecakupan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	%	100				1.587.555	650.263	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	-	0%	#DIV/0!					
							1	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Jumlah Piket Siaga Bencana	shift	3650	4.110.000	0	-	730	740.855	304	384.589	304	384.589	42%	52%	304	384.589	8%	9%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							2	Kegiatan Identifikasi Daerah Rawan Bencana	Jumlah Dokumen Daerah Rawan Bencana	doc	3	100.300	0	-	1	16.700	0	6.878	0	6.878	0%	41%	0	6.878	0%	7%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							3	Kegiatan Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase peserta yang hadir	%	500	1.005.000	0	-	100	125.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							4	Kegiatan Pendataan Korban Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Korban Pasca Bencana	doc	5	145.000	0	-	1	15.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	0
							5	Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah peserta yang terlatih	Orang	150	375.000	0	-	50	75.000	0	18.156	0	18.156	0%	24%	0	18.156	0%	5%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							7	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Alam	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk yang diadakan	paket	4	810.000	0	-	2	475.000	1	232.878	1	232.878	50%	49%	1	232.878	25%	29%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1				2		3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
								K	Rp	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			8	Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana	Persentase peserta yang hadir	%		500	1.265.000	0	-	100	140.000	0	7.761	0	7.761	0%	6%	0	7.761	0%	1%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	9			Kecamatan																				
4	4	4	1	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Kezentraman Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang di tindak lanjuti	%		100	449.846	-	-		515.996		85.385		85.385	#DIV/0!	17%	0%	85.385	0%	19%	
	0	0	6																					
	9	0																						
	0	3																						
			1	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%		99,6	212.707	0	-	100	212.707	24,9	40.550	24,9	40.550	25%	19%	24,9	40.550	25%	19,06%	Kecamatan Manguharjo
			1	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%		100	112.738	0	-	100	178.888	33,2	19.884	33,2	19.884	33%	11%	33,2	19.884	33%	17,64%	Kecamatan Kartoharjo
			1	Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase hasil koordinasi seksi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	%		100	124.401	0	-	100	124.401	0	24.951	0	24.951	0%	20%	0	24.951	0%	20,06%	Kecamatan Taman

Peningkatan Pelayanan Publik

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD Tahun 2019 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Tahun Lalu (Renja Tahun Lalu)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun Ini)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di Evaluasi Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
0 0	Rutin																			
0 0 1 0 1 0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah lembaga	lembaga	5	24.463.150	0	0	1	4.625.000	0	1.051.162	0	1.051.162	0%	23%	0	1.051.162	0%	4,30%	Dinas Pendidikan
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bahan penunjang	paket	5	520.000	0	-	1	520.000	0	166.477	0	166.477	0%	32%	0	166.477	0%	32,01%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	%	100	22.974.014	0	-	100	3.938.039	0	602.268	0	602.268	0%	15%	0	602.268	0%	2,62%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Honorarium non PNS yang disediakan	orang	40	6.498.142	0	-	40	1.178.916	40	582.700	40	582.700	100%	49%	40	582.700	100%	8,97%	RSUD
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan bahan penunjang : Uang Kinerja Kegiatan (UKK), ATK, Alat Listrik dan Elektronik, Benda Pos, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Cetak dan Penggandaan	%	100	3.840.000	0	-	100	892.362	0	207.563	0	207.563	0%	23%	0	207.563	0%	5,41%	Dinas Tenaga Kerja
	1 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	60	2.300.000	0	-	12	2.399.336	4	878.200	4	878.200	33%	37%	4	878.200	7%	38,18%	Dinas Komunikasi dan Informatika

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
			1		Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa operasional kantor	Jenis	70	1.230.000	0	-	14	1.203.120	5	314.759	5	314.759	36%	26%	5	314.759	7%	25,59%			Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
			1		Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	8	3.950.000	0	-	8	1.390.000	1	320.585	1	320.585	13%	23%	1	320.585	13%	8,12%			Dinas Perdagangan
			1		Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	paket	8	1.596.960	0	-	8	276.960	0	97.495	0	97.495	0%	35%	0	97.495	0%	6,11%			Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
			1		Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	paket	50	8.362.790	0	-	10	1.358.161	0	396.340	0	396.340	0%	29%	0	396.340	0%	4,74%			Dinas Sosial
			1		Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jenis	20	4.481.380	0	-	20	768.000	5	290.745	5	290.745	25%	38%	5	290.745	25%	6,49%			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			1		Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	50	17.900.000	0	-	10	3.400.000	1	786.606	1	786.606	10%	23%	1	786.606	2%	4,39%			Diras Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
			1		Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	75	11.908.767	0	-	75	1.639.094	18	528.808	18	528.808	24%	32%	18	528.808	24%	4,44%			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			1		Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	9	8.603.000	0	-	9	1.231.050	0	413.215	0	413.215	0%	34%	0	413.215	0%	4,80%			Dinas Lingkungan Hidup
			1		Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	15	43.196.301	0	-	15	2.712.380	1	834.944	1	834.944	7%	31%	1	834.944	7%	1,93%			Dinas Perhubungan

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Barang Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	35	14.083.697	0	-	7	2.606.012	0	1.049.747	0	1.049.747	0%	40%	0	1.049.747	0%	7,45%	Satuan Polisi Pamong Praja
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	unit	55	2.488.500	0	-	11	435.000	11	132.430	11	132.430	100%	30%	11	132.430	20%	5,32%	Badan Perangulanga n Sencana Daerah
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	30	2.202.380	0	-	6	2.202.380	1	516.562	1	516.562	17%	23%	1	516.562	3%	23,45%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	paket	500	12.392.000	0	-	100	2.100.200	50	826.261	50	826.261	50%	39%	50	826.261	10%	6,67%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan perkantoran	jenis	7	1.500.000	0	-	7	300.000	0	64.702	0	64.702	0%	22%	0	64.702	0%	4,31%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa kantor	paket	6	2.142.858	0	-	6	350.995	1	28.980	1	28.980	17%	8%	1	28.980	17%	1%	Bagian Administrasi Pembangunan
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	14	1.317.382	0	-	14	233.551	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Hukum
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya penyediaan barang dan jasa kantor	jenis	13	18.545.035	0	-	13	5.047.332	1	1.560.349	1	1.560.349	8%	31%	1	1.560.349	8%	8%	Bagian Umum
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan penunjang	jenis	65	196.104	0	-	13	196.104	0	48.269	0	48.269	0%	25%	0	48.269	0%	25%	Bagian Organisasi
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	%	500	5.417.947	0	-	100	3.167.023	25	284.358	25	284.358	25%	9%	25	284.358	5%	5%	Sekretariat DPRD
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	8	2.690.000	0	-	8	492.695	0	118.994	0	118.994	0%	24%	0	118.994	0%	4%	Inspektorat
1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa kantor	%	100	800.000	0	-	100	832.000	0	207.675	0	207.675	0%	25%	0	207.675	0%	26%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	7	88.858.668	0	-	7	17.676.750	0	7.476.675	0	7.476.675	0%	42%	0	7.476.675	0%	8%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor	jenis	15	861.258	0	-	13	909.985	13	223.581	13	223.581	100%	25%	13	223.581	87%	26%	Badan Kepegawaian Daerah
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	50	565.412	0	-	10	565.412	10	137.388	10	137.388	100%	24%	10	137.388	20%	24%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan penunjang	jenis	40	483.550	0	-	8	687.624	8	83.388	8	83.388	100%	12%	8	83.388	20%	17%	Badan Pendapatan Daerah
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	8	979.036	0	-	9	979.036	7	276.289	7	276.289	78%	28%	7	276.289	88%	28%	Kecamatan Manguharjo
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	45	5.988.895	0	-	9	1.172.663	3	318.205	3	318.205	33%	27%	3	318.205	7%	5%	Kecamatan Kartoharjo
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	paket	13	881.186	0	-	10	881.186	2	230.886	2	230.886	20%	26%	2	230.886	15%	26%	Kecamatan Taman
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah kali	kali	525	1.743.468	0	0	105	403.411	0	95.062	0	95.062	0%	24%	0	95.062	0%	5%	Dinas Pendidikan
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	kali	448	130.000	0	-	88	130.000	28	59.322	28	59.322	32%	46%	28	59.322	6%	46%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	%	100	3.644.395	0	-	100	420.000	0	133.574	0	133.574	0%	32%	0	133.574	0%	4%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan dinas keluar daerah bagi pejabat dan staf Dinas Tenaga Kerja	Kegiatan	5	1.551.055	0	-	1	230.000	0	99.995	0	99.995	0%	43%	0	99.995	0%	6%	Dinas Tenaga Kerja
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	590	600.000	0	-	94	367.000	33	86.468	33	86.468	35%	24%	33	86.468	6%	14%	Dinas Komunikasi dan Informatika

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	675	450.000	0	-	125	400.000	30	84.691	30	84.691	24%	21%	30	84.691	4%	19%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	orang/kali	90	2.564.142	0	-	75	432.862	10	90.641	10	90.641	13%	21%	10	90.641	11%	3,53%	Dinas Perdagangan
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	325	1.200.000	0	-	65	180.000	24	48.130	24	48.130	37%	27%	24	48.130	7%	4,01%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	kali	132	4.114.538	0	-	132	555.363	0	109.294	0	109.294	0%	20%	0	109.294	0%	2,66%	Dinas Sosial
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Petugas yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi keluar daerah/laporan hasil yang disusun	Laporan	120	2.100.000	0	-	120	264.550	10	83.679	10	83.679	8%	32%	10	83.679	8%	3,98%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali kegiatan	80	1.400.000	0	-	60	250.000	6	75.657	6	75.657	10%	30%	6	75.657	8%	5,40%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	kali	250	1.158.637	0	-	50	183.880	7	50.126	7	50.126	14%	27%	7	50.126	3%	4,33%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	kali	162	1.146.000	0	-	32	165.000	15	34.324	15	34.324	47%	21%	15	34.324	9%	3,00%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	300	1.605.000	0	-	60	230.000	17	75.293	17	75.293	28%	33%	17	75.293	6%	4,69%	Dinas Perhubungan
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	kali kegiatan	150	1.330.000	0	-	30	279.500	19	103.458	19	103.458	63%	37%	19	103.458	13%	7,78%	Satuan Polisi Pamong Praja

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	100	500.000	0	-	20	140.000	9	52.576	9	52.576	45%	38%	9	52.576	9%	10,52%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas selama setahun	kali	30	400.000	0	-	30	400.000	8	91.574	8	91.574	27%	23%	8	91.574	27%	22,89%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Frekuensi Perjalanan Dinas	kali	225	1.686.300	0	-	45	299.500	17	62.695	17	62.695	38%	21%	17	62.695	8%	3,72%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	kali kegiatan	24	1.250.000	0	-	24	230.000	0	34.683	0	34.683	0%	15%	0	34.683	0%	2,77%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tahun	5	947.145	0	-	1	155.140	0	56.110	0	56.110	0%	36%	0	56.110	0%	6%	Bagian Administrasi Pembangunan
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi	kali	80	610.300	0	-	60	130.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Hukum
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	650	15.000.000	0	-	600	2.437.286	25	418.117	25	418.117	4%	17%	25	418.117	4%	3%	Bagian Umum
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	220	291.687	0	-	44	291.687	12	44.788	12	44.788	27%	15%	12	44.788	5%	15%	Bagian Organisasi
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	%	100	12.592.538	0	-	100	3.395.846	25	1.091.412	25	1.091.412	25%	32%	25	1.091.412	25%	9%	Sekretariat DPRD
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar daerah	kali	325	3.262.770	0	-	65	428.483	13	199.162	13	199.162	20%	46%	13	199.162	4%	6%	Inspektorat
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	terpenuhinya kebutuhan dinas	%	100	750.000	-	-	100	451.305	0	156.636	0	156.636	0%	35%	0	156.636	0%	21%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	kali	115	2.180.000	0	-	100	400.000	0	87.262	0	87.262	0%	22%	0	87.262	0%	4%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	kali	150	694.170	0	-	150	607.810	12	141.703	12	141.703	8%	23%	12	141.703	8%	20%	Badan Kepegawaian Daerah

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	250	150.000	0	-	50	120.000	0	21.491	0	21.491	0%	18%	0	21.491	0%	14%				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	kali	38	88.465	0	-	38	88.465	3	16.618	3	16.618	8%	19%	3	16.618	8%	19%				Badan Pendapatan Daerah	
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	1932	143.751	0	-	1936	143.751	130	26.761	130	26.761	7%	19%	130	26.761	7%	19%				Kecamatan Manguharjo	
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	80	622.489	0	-	16	97.961	7	25.545	7	25.545	44%	26%	7	25.545	9%	4%				Kecamatan Kartoharjo	
			2	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	kali	34	97.793	0	-	35	97.793	0	25.005	0	25.005	0%	26%	0	25.005	0%	26%				Kecamatan Taman	
0	0	1	0	1	0	1	0	1																			
			2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah																							
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah lembaga	lembaga	5	302.239	0	0	1	329.650	0	5.339	0	5.339	0%	2%	0	5.339	0%	2%				Dinas Pendidikan	
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung	unit	2	60.000	0	-	2	60.000	0	42.210	0	42.210	0%	70%	0	42.210	0%	70%				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Persentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	%	100	70.987	0	-	100	14.126	5	13.427	5	13.427	5%	95%	5	13.427	5%	19%				Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah pemeliharaan dan perawatan gedung/ lingkungan	Unit	5	194.256	0	-	1	35.000	0	550	0	550	0%	2%	0	550	0%	0%				Dinas Tenaga Kerja	
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung	unit	3	150.000	0	-	2	150.000	2	44.217	2	44.217	100%	29%	2	44.217	67%	29%				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung dan kantor yang bersih dan nyaman	unit	5	80.000	0	-	1	80.000	0	4.658	0	4.658	0%	6%	0	4.658	0%	6%				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro	

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung dan bangunan dalam kondisi baik	gedung	3	274.730	0	-	3	400.000	0	1.261	0	1.261	0%	0%	0	1.261	0%	0%	Dinas Perdagangan
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung	unit	1	30.000	0	-	1	4.000	1	3.825	1	3.825	100%	96%	1	3.825	100%	13%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Dinas Sosial
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	gedung	2	505.000	0	-	2	75.000	0	19.602	0	19.602	0%	26%	0	19.602	0%	3,88%	Dinas Sosial
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung dan bangunan yang dipelihara	unit	1	515.000	0	-	1	60.000	1	59.750	1	59.750	100%	100%	1	59.750	100%	11,60%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung	gedung	1	2.500.000	0	-	1	500.000	1	111.440	1	111.440	100%	22%	1	111.440	100%	4,46%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan	gedung	2	772.800	0	-	2	103.270	2	26.332	2	26.332	100%	25%	2	26.332	100%	3,41%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara	gedung	3	473.000	0	-	3	24.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Luas gedung yang dipelihara	m2	132	2.000.000	0	-	132	400.000	0	230	0	230	0%	0%	0	230	0%	0,01%	Dinas Pehubungan
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Gedung kantor yang dipelihara	gedung	10	175.000	0	-	2	25.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah kantor yang dipelihara	paket	5	110.000	0	-	1	30.000	1	30.000	1	30.000	100%	100%	1	30.000	20%	27,27%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	gedung	1	44.750	0	-	1	44.750	1	42.488	1	42.488	100%	95%	1	42.488	100%	94,94%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung yang Dipelihara	gedung	10	1.302.000	0	-	2	199.650	0	62.451	0	62.451	0%	31%	0	62.451	0%	4,80%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	jumlah gedung	unit	1	37.500	0	-	1	7.500	0	5.500	0	5.500	0%	73%	0	5.500	0%	14,67%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	gedung	5	500.618	0	-	1	82.000	0	80.004	0	80.004	0%	98%	0	80.004	0%	15,98%	Bagian Administrasi Pembangunan
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung	unit	5	15.263	0	-	1	2.500	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Bagian Hukum
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung	gedung	2	1.621.865	0	-	2	269.677	1	184.758	1	184.758	50%	69%	1	184.758	50%	11%	Bagian Umum
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung yang representatif	unit	1	10.000	0	-	1	2.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Organisasi
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Persentase terwujudnya kondisi gedung/bangunan yang layak pakai	%	100	1.985.637	0	-	100	1.230.702	25	12.721	25	12.721	25%	1%	25	12.721	25%	1%	Sekretariat DPRD
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara	paket	1	27.825	0	-	1	5.000	0	2.700	0	2.700	0%	54%	0	2.700	0%	10%	Inspektorat
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	prosentase kantor dalam kondisi baik	%	100	195.000			100	195.000	0	27.615	0	27.615	0%	14%	0	27.615	0%	14%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung/kantor	gedung	1	250.000	0	-	1	50.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung	gedung	20	21.000	0	-	2	21.000	1	15.110	1	15.110	50%	72%	1	15.110	5%	72%	Badan Kepegawaian Daerah
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung/bangunan yang terpelihara	gedung	1	7.500	0	-	1	7.500	0	3.077	0	3.077	0%	41%	0	3.077	0%	41%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Perbaikan gedung kantor	unit	1	208.063	0	-	1	8.063	1	-	1	-	100%	0%	1	-	100%	0%	Badan Pendapatan Daerah
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung	gedung	1	71.298	0	-	1	71.298	0	41.908	0	41.908	0%	59%	0	41.908	0%	59%	Kecamatan Manguharjo
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung/ bangunan yang dipelihara	gedung	5	134.000	0	-	1	23.000	0	23.000	0	23.000	0%	100%	0	23.000	0%	17%	Kecamatan Kartoharjo

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	gedung	1	15.000	0	-	1	15.000	0	15.000	0	15.000	0%	100%	0	15.000	0%	100%	Kecamatan Taman
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah unit	unit	625	508.624	0	0	125	136.100	0	24.497	0	24.497	0%	18%	0	24.497	0%	5%	Dinas Pendidikan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diperbaiki	unit	22	66.902	0	-	22	66.902	0	10.772	0	10.772	0%	16%	0	10.772	0%	16%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Persentase terwujudnya kendaraan dinas yang layak pakai	%	100	1.139.958	0	-	100	201.098	5	60.141	5	60.141	5%	30%	5	60.141	5%	5%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	Unit	20	234.353	0	-	20	43.294	0	11.106	0	11.106	0%	26%	0	11.106	0%	5%	Dinas Tenaga Kerja
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	unit	32	65.000	0	-	25	65.000	0	31.259	0	31.259	0%	48%	0	31.259	0%	48%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang aman dan nyaman	unit	140	45.000	0	-	28	45.000	2	6.984	2	6.984	7%	16%	2	6.984	1%	16%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	Unit	26	2.380.989	0	-	39	400.000	3	65.275	3	65.275	8%	16%	3	65.275	12%	2,74%	Dinas Perdagangan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	unit	10	139.000	0	-	10	22.000	0	5.394	0	5.394	0%	25%	0	5.394	0%	3,88%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	kendaraan	35	611.570	0	-	25	131.733	0	37.720	0	37.720	0%	29%	0	37.720	0%	6,17%	Dinas Sosial
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	unit	22	350.000	0	-	22	60.000	6	16.522	6	16.522	27%	28%	6	16.522	27%	4,72%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	kendaraan	70	1.200.000	0	-	60	700.000	1	66.163	1	66.163	2%	33%	1	66.163	1%	5,51%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
																				Kota	
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	unit	52	12.474.930	0	-	50	16.886.800	12	206.258	12	206.258	24%	1%	12	206.258	23%	1,65%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	unit	59	9.462.000	0	-	57	1.308.696	3	336.732	3	336.732	5%	26%	3	336.732	5%	3,56%	Dinas Lingkungan Hidup
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah yang dipelihara	unit	62	3.050.000	0	-	37	450.000	0	174.191	0	174.191	0%	39%	0	174.191	0%	5,71%	Dinas Perhubungan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas yang dipelihara	unit	165	2.510.000	0	-	33	499.500	5	118.428	5	118.428	15%	24%	5	118.428	3%	4,72%	Satuan Polisi Pamong Praja
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	25	797.500	0	-	5	140.000	5	40.797	5	40.797	100%	29%	5	40.797	20%	5,12%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	buah	26	99.000	0	-	26	99.000	2	5.476	2	5.476	8%	6%	2	5.476	8%	5,53%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Unit	110	375.000	0	-	22	74.650	9	21.751	9	21.751	41%	29%	9	21.751	8%	5,80%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	unit	1	100.000	0	-	1	20.000	0	4.840	0	4.840	0%	24%	0	4.840	0%	4,84%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jenis/jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	7	147.778	0	-	7	24.206	1	5.074	1	5.074	14%	21%	1	5.074	14%	3%	Bagian Administrasi Pembangunan
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	unit	5	125.445	0	-	1	20.548	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Bagian Hukum
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	unit	213	6.139.590	0	-	38	1.115.440	18	257.964	18	257.964	47%	23%	18	257.964	8%	4%	Bagian Umum
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	Unit	30	22.575	0	-	6	22.575	0	5.074	0	5.074	0%	22%	0	5.074	0%	22%	Bagian Organisasi
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Persentase terwujudnya kendaraan dinas yang layak pakai	%	500	1.573.124	0	-	100	374.642	25	13.800	25	13.800	25%	4%	25	13.800	5%	1%	Sekretariat DPRD

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	unit	1	128.834	0	-	1	24.892	0	8.374	0	8.374	0%	34%	0	8.374	0%	6%					Inspektorat
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Prosentase Kendaraan Dinas dalam kondisi baik	%	100	32.000			100	32.000	0	4.399	0	4.399	0%	14%	0	4.399	0%	14%					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	kendaraan	38	279.250	0	-	38	55.000	0	11.315	0	11.315	0%	21%	0	11.315	0%	4%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	kendaraan	20	25.000	0	-	20	25.000	2	5.458	2	5.458	10%	22%	2	5.458	10%	22%					Badan Kepegawaian Daerah
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	unit	24	24.892	0	-	24	24.892	0	6.595	0	6.595	0%	26%	0	6.595	0%	26%					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Kendaraan dinas yang diperbaiki	unit	10	44.229	0	-	2	44.229	2	4.765	2	4.765	100%	11%	2	4.765	20%	11%					Badan Pendapatan Daerah
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	unit	16	59.559	0	-	16	59.559	1	7.413	1	7.413	6%	12%	1	7.413	6%	12%					Kecamatan Manguharjo
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	unit	80	194.786	0	-	16	35.251	7	10.572	7	10.572	44%	30%	7	10.572	9%	5%					Kecamatan Kartoharjo
			2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	unit	16	48.448	0	-	16	48.448	0	5.301	0	5.301	0%	11%	0	5.301	0%	11%					Kecamatan Taman
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	jumlah lembaga	lembaga	5	1.028.940	0	0	1	140.800	0	23.747	0	23.747	0%	17%	0	23.747	0%	2%					Dinas Pendidikan
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Yang Dipelihara	unit	78	45.000	0	-	78	45.000	0	9.715	0	9.715	0%	22%	0	9.715	0%	22%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Persentase Terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	%	100	431.040	0	-	100	82.405	10	26.794	10	26.794	10%	33%	10	26.794	10%	6%					Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor	Kegiatan	5	130.000	0	-	1	25.000	0	9.310	0	9.310	0%	37%	0	9.310	0%	7%					Dinas Tenaga Kerja
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	unit	330	150.000	0	-	60	150.000	35	123.282	35	123.282	58%	82%	35	123.282	11%	82%					Dinas Komunikasi dan Informatika

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jenis sarana kantor yang memadai	Jenis	15	200.000	0	-	3	73.537	0	21.423	0	21.423	0%	29%	0	21.423	0%	11%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	unit	44	549.459	0	-	51	110.000	0	56.344	0	56.344	0%	51%	0	56.344	0%	10,25%	Dinas Perdagangan
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana	unit	28	55.200	0	-	28	9.200	0	2.555	0	2.555	0%	28%	0	2.555	0%	4,63%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	paket	25	344.568	0	-	5	55.800	0	32.712	0	32.712	0%	59%	0	32.712	0%	9,49%	Dinas Sosial
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	unit	55	300.000	0	-	55	50.000	15	9.339	15	9.339	27%	19%	15	9.339	27%	3,11%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana	unit	12	2.400.000	0	-	12	400.000	3	50.392	3	50.392	25%	13%	3	50.392	25%	2,10%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dilakukan pemeliharaan	unit	58	491.000	0	-	45	472.170	15	55.520	15	55.520	33%	12%	15	55.520	26%	11,31%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	unit	65	646.000	0	-	95	68.296	9	30.060	9	30.060	9%	44%	9	30.060	14%	4,65%	Dinas Lingkungan Hidup
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	unit	365	950.000	0	-	73	150.000	31	32.171	31	32.171	42%	21%	31	32.171	8%	3,39%	Dinas Perhubungan
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jenis Sarana dan Prasarana Kantor	Jenis	30	175.000	0	-	6	24.650	0	640	0	640	0%	3%	0	640	0%	0,37%	Satuan Polisi Pamong Praja
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	unit	40	125.000	0	-	8	15.000	5	4.587	5	4.587	63%	31%	5	4.587	13%	3,67%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP										
			3																								Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			3																								Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			3																								Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
			3																								Bagian Administrasi Pembangunan
			3																								Bagian Hukum
			3																								Bagian Umum
			3																								Bagian Organisasi
			3																								Sekretariat DPRD
			3																								Inspektorat
			3																								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3																								Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			3																								Badan Kepegawaian Daerah
			3																								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Perbaikan sarana dan prasarana kantor	jenis	5	239.652	0	-	5	55.100	0	3.850	0	3.850	0%	7%	0	3.850	0%	2%			Badan Pendapatan Daerah	
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasana kantor	jenis	3	45.300	0	-	3	45.300	1	9.385	1	9.385	33%	21%	1	9.385	33%	21%			Kecamatan Manguharjo	
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Kantor yang dipelihara	jenis	15	34.960	0	-	3	34.960	1	9.901	1	9.901	33%	28%	1	9.901	7%	28%			Kecamatan Kartoharjo	
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	jenis	3	36.500	0	-	3	36.500	0	11.107	0	11.107	0%	30%	0	11.107	0%	30%			Kecamatan Taman	
			4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas	gedung	4	6.713.717	0	-	4	1.288.645	1	503.259	1	503.259	25%	39%	1	503.259	25%	7%			Bagian Umum	
			4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Persentase terwujudnya rumah dinas yang layak	%	500	1.637.237	0	-	100	616.821	25	30.329	25	30.329	25%	5%	25	30.329	5%	2%			Sekretariat DPRD	
			5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Diklat	Jumlah Acara	kegiatan	1500	133.222	0	-	300	133.222	27	47.122	27	47.122	9%	35%	27	47.122	2%	35%			Badan Kepegawaian Daerah	
0	0	1	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																						
		0		1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah paket	paket	5	1.250.000	0	0	1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%			Dinas Pendidikan
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jenis Barang	paket					1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan	%	100	4.896.487	0	-	100	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%			Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Jenis	115	6.351.258	0	-	23	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0%			RSUD	
			1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	%	0	1.300.000	0	-	100	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	0%			Dinas Tenaga Kerja	

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor baru	paket				1												Dinas Komunikasi dan Informatika	
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan	jenis				3												Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro	
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jenis	2	610.510	0	-	2	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	Dinas Perdagangan
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	paket	1	292.000	0	-	0	-	0	-		#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	Bagian Administrasi Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	paket	0	1.350.000	0	-	2	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	0,00%	Dinas Sosial
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah pengadaan sarana prasarana kantor	unit	17	800.000	0	-	17	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarpras Kantor	Jenis	10	-	0	-	10	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor	jenis	14	14.331.161	0	-	3	3.000.000	2	2.908.000	2	2.908.000	67%	97%	2	2.908.000	14%	20,29%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan	unit	76	453.000	0	-	18	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	unit	381	3.750.000	0	-	81	2.550.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Perhubungan
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang dibeli	jenis	5	942.000	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	Satuan Polisi Pamong Praja

1				2		3		4		5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan	paket	4	300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	jenis					6					0	-	0%	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor yang tersedia	Unit	8	500.000	0	-	3	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	paket	18	70.000	0	-	18	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%						Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah/jenis sarana dan prasarana kantor yang dibeli	unit					18																	Bagian Administrasi Pembangunan
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	jenis					3																	Bagian Hukum
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah paket	paket	1	7.500.000	0	-	1	2.881.992	0	1.858.503	0	1.858.503	0%	64%	0	1.858.503	0%	24,78%						Bagian Umum
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipenuhi	jenis	2	457.500	0	-	2	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%						Inspektorat
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarpras yang terpenuhi	jenis	0	0	0	0	5	0	0	0	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana	jenis	5	525.632	0	-	1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat DPRD
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan	%	500	1.636.927	0	-	100	351.927	25	112.339	25	112.339	25%	32%	25	112.339	5%	6,86%						
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	paket	5	1.153.740	0	-	1	200.000	0	170.000	0	170.000	0%	85%	0	170.000	0%	14,73%						Badan Pendapatan Daerah
	1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana	paket					1					0	-	0%	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!					Kecamatan Manguharjo

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	paket	2	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	#DIV/0!	Kecamatan Kartoharjo
2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	orang	765	213.000	0	-	85	25.774	85	15.860	85	15.860	100%	62%	85	15.860	11%	7,45%	Dinas Lingkungan Hidup
2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah kelengkapan pakaian dinas	buah	3370	1.720.000	0	-	674	220.000	15	118.985	15	118.985	2%	54%	15	118.985	0%	6,92%	Dinas Perhubungan
2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	orang	570	2.000.000	0	-	114	300.000	0	291.105	0	291.105	0%	97%	0	291.105	0%	14,56%	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pegawai	orang	4500	4.336.911	0	-	4000	6.891.342	0	8.372	0	8.372	0%	0%	0	8.372	0%	0,19%	Bagian Umum
2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase penerimaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	%	500	1.032.336	0	-	100	394.047	25	-	25	-	25%	0%	25	-	5%	0,00%	Sekretariat DPRD
3	Kegiatan Pembangunan Gedung	Jumlah Gedung yang dibangun	gedung	1	160.000	0	-	1	160.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Kegiatan Pembangunan Gedung	Jumlah gedung yang dibangun	gedung	0	0	0	0	1	0	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
3	Kegiatan Pembangunan Gedung	Jumlah Gedung yang Dibangun	Unit	1	750.000	0	-	1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	Kegiatan Pembangunan Gedung	Jumlah Gedung	paket	3	4.287.125	0	-	2	234.125	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Kecamatan Kartoharjo
4	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah rehab sarana dan prasarana Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madian	Lokasi	2	1.150.000	0	-	1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	Dinas Tenaga Kerja
4	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Tersedianya gedung dan bangunan yang representatif	gedung	0	400.000	0	-	1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!	0,00%	Dinas Sosial
4	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung/bangunan yang direhab	unit	1	800.000	0	-	1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung dan Bangunan Yang Direhab	gedung	2	1.650.000	0	-	1	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	4	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Luas bangunan	m2	1040	8.160.000	0	-	197	-	0	-	0	-	0%	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	Dinas Perhubungan
	4	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Gedung Kantor yang direhab	gedung	1	187.000	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
	4	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung / bangunan yang direhab	paket	2	215.000	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0%	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bagian Umum
	4	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	jumlah paket	paket	1	1.400.000	0	-	1	197.927	1	194.875	1	194.875	100%	98%	1	194.875	100%	13,92%	
	4	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	gedung kantor	1	1.000.000	0	-	1	1.000.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%	Badan Kepegawaian Daerah
	4	Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	paket	2	2.539.050	0	-	1	939.050	0	32.974	0	32.974	0%	4%	0	32.974	0%	1,30%	Kecamatan Kartoharjo
0	0	1	4																		
		Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
	1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen	Doc	45	435.144	0	-	9	99.390	0	8.750	0	8.750	0%	9%	0	8.750	0%	2%	Dinas Pendidikan
	1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen	Doc	50	35.000	0	-	10	35.000	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen	Doc	55	1.595.608	0	-	11	285.608	2	113.079	2	113.079	18%	40%	2	113.079	4%	7%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja	Doc	30	125.000	0	-	6	25.000	4	-	4	-	67%	0%	4	-	13%	0%	Dinas Tenaga Kerja
	1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Doc	25	50.000	0	-	5	50.000	3	18.577	3	18.577	60%	37%	3	18.577	12%	37%	Dinas Komunikasi dan Informatika

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	Doc	50	30.000	0	-	10	52.905	5	28.111	5	28.111	50%	53%	5	28.111	10%	94%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perdagangan
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	doc	5	405.000	0	-	6	80.000	1	71.793	1	71.793	17%	90%	1	71.793	20%	17,73%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Dinas Sosial
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	doc	5	120.000	0	-	5	20.000	1	-	1	-	20%	0%	1	-	20%	0,00%	
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	doc	9	450.877	0	-	9	72.278	0	56.423	0	56.423	0%	75%	0	56.423	0%	12,51%	
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	doc	80	725.000	0	-	16	125.000	2	75.928	2	75.928	13%	61%	2	75.928	3%	10,47%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	10	210.000	0	-	10	25.000	0	15.511	0	15.511	0%	62%	0	15.511	0%	7,39%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan/laporan yang disusun	doc	50	256.000	0	-	10	23.163	7	7.178	7	7.178	70%	31%	7	7.178	14%	2,80%	
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	doc	10	305.000	0	-	10	37.585	1	21.686	1	21.686	10%	58%	1	21.686	10%	7,11%	Dinas Lingkungan Hidup
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	20	510.447	0	-	20	102.089	5	49.503	5	49.503	25%	48%	5	49.503	25%	9,70%	Dinas Perhubungan
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan/Pelaporan	doc	60	499400	0	0	12	99850	0	50.821	0	50.821	0%	51%	0	50.821	0%	10,18%	Satuan Polisi Pamong Praja

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	Perangkat Daerah																				
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan yang disusun	doc	35	120.000	0	-	7	20.000	5	3.439	5	3.439	71%	17%	5	3.439	14%	2,87%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	doc	40	62811,36	0	0	8	62811,36	0	15.339	0	15.339	0%	24%	0	15.339	0%	24,42%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	doc	30	440.000	0	-	6	85.000	5	38.925	5	38.925	83%	46%	5	38.925	17%	8,85%		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	doc	25	75.000	0	-	5	7.417	0	800	0	800	0%	11%	0	800	0%	1,07%		Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	5	203.007	0	-	5	33.252	0	8.188	0	8.188	0%	25%	0	8.188	0%	4,03%		Bagian Administrasi Pembangunan
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	7	194.616	0	-	7	38.923	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0,00%		Bagian Hukum
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	8	630.000	0	-	8	116.312	3	-	3	-	38%	0%	3	-	38%	0,00%		Bagian Umum
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun	%	500	50.632	0	-	100	26.032	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%		Sekretariat DPRD
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	60	486.601	0	-	12	95.724	6	22.824	6	22.824	50%	24%	6	22.824	10%	5%		Inspektorat
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	12	100.000			12	60.490	0	15.474	0	15.474	0%	26%	0	15.474	0%	15%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1	2	3	4	5		6		7		8		9=8		10=9/7 x 100		11=6+9		12=11/5 x 100		13
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	8	134.000	0	-	8	20.000	0	15.726	0	15.726	0%	79%	0	15.726	0%	12%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	doc	35	50.372	0	-	7	50.372	4	19.101	4	19.101	57%	38%	4	19.101	11%	38%	Badan Kepegawaian Daerah
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	60	92.393	0	-	12	92.393	6	-	6	-	50%	0%	6	-	10%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen OPD	doc	7	2.500	0	-	7	2.100	0	332	0	332	0%	16%	0	332	0%	13%	Badan Pendapatan Daerah
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	12	43.121	0	-	12	43.121	0	13.371	0	13.371	0%	31%	0	13.371	0%	31%	Kecamatan Manguharjo
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	61	151.468	0	-	12	30.274	5	3.041	5	3.041	42%	10%	5	3.041	8%	2%	Kecamatan Kartoharjo
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	doc	12	41.396	0	-	12	41.396	0	13.432	0	13.432	0%	32%	0	13.432	0%	32%	Kecamatan Taman
2	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	Jumlah dokumen	doc	1	27.842	0	-	1	27.842	0	19.385	0	19.385	0%	70%	0	19.385	0%	70%	Kecamatan Taman
2	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	Jumlah dokumen	doc	5	49.036	0	-	1	9.807	0	6.586	0	6.586	0%	67%	0	6.586	0%	13%	Kecamatan Kartoharjo
2	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	Jumlah dokumen	doc	5	29.192	0	-	1	29.192	0	18.504	0	18.504	0%	63%	0	18.504	0%	63%	Kecamatan Manguharjo
3	Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah dokumen	doc	2	37.950	0	-	2	37.950	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
3	Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah dokumen	doc	10	114.416	0	-	2	22.883	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo
3	Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah dokumen	doc	2	27.842	0	-	2	27.842	0	202	0	202	0%	1%	0	202	0%	1%	Kecamatan Taman

BAB III

KERANGKA EKONOMI

Sebagaimana dituangkan dalam bab sebelumnya bahwa sebagai upaya untuk melakukan sinkronisasi terhadap perkembangan yang terjadi maka dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dimungkinkan untuk dilakukannya perubahan. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, bahwa Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD kedalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD untuk menjaga konsistensi maka RKPD juga perlu dilakukan perubahan. Perubahan ini dimaksudkan agar tercapai integrasi program dan kegiatan mulai RKPD, KUA dan PPAS serta APBD, berdasarkan perubahan asumsi-asumsi seperti pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam RKPD.

Perkembangan dinamika pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah menuntut daerah untuk lebih dapat mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan lebih efektif dan efisien. Perubahan RKPD merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Untuk menyikapi hal tersebut maka diperlukan perubahan-perubahan asumsi-asumsi RKPD Kota Madiun Tahun 2020 didasarkan pada beberapa perkembangan kondisi nasional, regional maupun kondisi daerah. Pada Tahun 2020 Pemerintah sudah merencanakan adanya APBN Perubahan, sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan sebesar 5,3%, mengalami perubahan pada APBN 2020 yang ditetapkan ada dua kondisi sehubungan dengan adanya pengaruh wabah Covid 19, apabila kondisi sangat berat maka pertumbuhan ekonomi 0,9, sedangkan jika kondisi berat maka pertumbuhan ekonomi di angka 1,9 %, sedangkan asumsi pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun pada RKPD Tahun 2020 yang diproyeksikan sebesar 6,02%, pada Perubahan RKPD Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Madiun diproyeksikan akan mengalami penurunan karena memang situasi dan kondisi ekonomi yang sangat berat menjadi 2,65 %, karena realisasi di tahun 2019 Kota Madiun di angka 5,69, maka realistis jika dilakukan penyesuaian, yang diharapkan akan mampu dicapai melalui peningkatan investasi dan produktifitas serta adanya keserasian pengelolaan APBD.

Penurunan target disebabkan karena realisasi pertumbuhan 2019 hanya 5,69 % dari target sebesar 6,25 %, dan beberapa faktor ekonomi yang lain seperti adanya kenaikan listrik, BBM serta beberapa sektor ekonomi yang lain, maka Pemerintah Kota Madiun berpikiran realistis dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,65 % dan berharap bisa tercapai dengan kondisi ekonomi yang tertekan seperti saat ini.

Penurunan target disebabkan karena adanya pandemi covid 19 yang sangat mempengaruhi seluruh sektor ekonomi pada 2020 hanya 2,65 % dari target sebesar 6,02 %, melihat perkembangan wabah yang hingga saat ini belum menunjukkan kearah yang lebih baik maka target tersebut diharapkan bisa tercapai.

Selain itu Perubahan RKPD tahun 2020 didasarkan pada upaya sinkronisasi program dan kegiatan, antara program dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2020 dengan program dan sasaran baik di tingkat nasional maupun provinsi, dimana pada tahun 2020 telah dilakukan refocusing dan realokasi program dan kegiatan untuk penanganan dan pencegahan covid19. Dengan adanya kebijakan tersebut baik di tingkat pusat maupun di daerah, Kota Madiun tetap berpedoman pada tema dan prioritas yang sudah ditetapkan sebelumnya :

- 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.**
- 2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau.**
- 3. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah.**
- 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.**
- 5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.**

Upaya pencapaian program prioritas ini dengan tidak melupakan tuntutan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian dan Lembaga, serta pencapaian visi dan misi kepala daerah.

3.1 Perubahan Asumsi Dasar Perubahan RKPD Tahun 2020

3.1.1 Perubahan Asumsi Dasar APBN-P 2020

Pemerintah telah mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 kepada DPR. Desain APBN diubah karena menyesuaikan dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang masih belum mereda. Adapun dengan perubahan desain tersebut menyebabkan pendapatan turun dari Rp 2.233,2 triliun menjadi Rp 1.760,0 triliun. Belanja negara naik, dari yang semula Rp2.540,4 triliun menjadi Rp2.613,8 triliun.

Perubahan desain APBN tahun 2020 ini juga berkonsekuensi pada melebarnya angkut defisit APBN yang semula di kisaran Rp 307,2 triliun atau 1,76 persen menjadi Rp 853 triliun atau sekitar 5,07 persen. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengajukan APBN Perubahan 2020 kepada legislatif. Langkah ini diambil karena banyak anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani penyebaran virus Corona.

Dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 saat ini, Pemerintah dan otoritas keuangan dinilai tidak akan mudah menghadapi tantangan ke depan. Karena Pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan mengandalkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 654,5 triliun.

Selain banyak belanja yang sifatnya mandatori karena perintah UUD 1945 dan undang undang, seperti anggaran pendidikan 20 persen, anggaran kesehatan 5 persen, dan dana desa 10 persen, juga masih terdapat belanja rutin yang peruntukkannya tidak longgar. Inilah salah satu tantangan ke depan yang tidak mudah.

Dalam situasi ekonomi domestik dan global mengalami *slowing down*, kita berharap masih banyak investor yang berminat dengan global bond yang diterbitkan pemerintah. Hingga 3 April 2020, justru banyak investor non residen melepas SBN senilai Rp 135,1 triliun. Seandainya pandemi Covid-19 mengajak "bermain panjang", maka alokasi anggaran penanganan Covid-19 berikut jaring pengaman sosial dan program pemulihan ekonomi sebesar Rp 405,1 triliun berpotensi tidak mencukupi. Konsekuensinya, kebutuhan pembiayaan akan semakin membesar. Apalagi penerimaan dari pajak dan sumber daya alam berpotensi mengalami penurunan sebagaimana yang telah diproyeksikan.

Karena Pemerintah sudah melakukan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro merupakan dasar penyusunan besaran dalam Perubahan APBN yang diperlukan sebagai pertimbangan dalam penyusunan Perubahan APBN baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan mengacu pada Perubahan APBN 2020. Pemerintah mengganti asumsi suku bunga SPN 3 bulan menjadi asumsi suku bunga SBN 10 tahun. Pada dasarnya, asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai dasar perhitungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Hal ini karena utang berbunga mengambang atau *variable-rate debt* yang menggunakan SPN 3 bulan sebagai referensi, jumlahnya semakin mengecil, baik terhadap portofolio utang pemerintah maupun porsinya dalam pembayaran bunga utang setiap tahun. saat ini penerbitan utang pemerintah sebagian besar dilakukan dalam tingkat bunga tetap atau *fixed-rate debt*. Dengan demikian, penggunaan suku bunga SBN 10 tahun

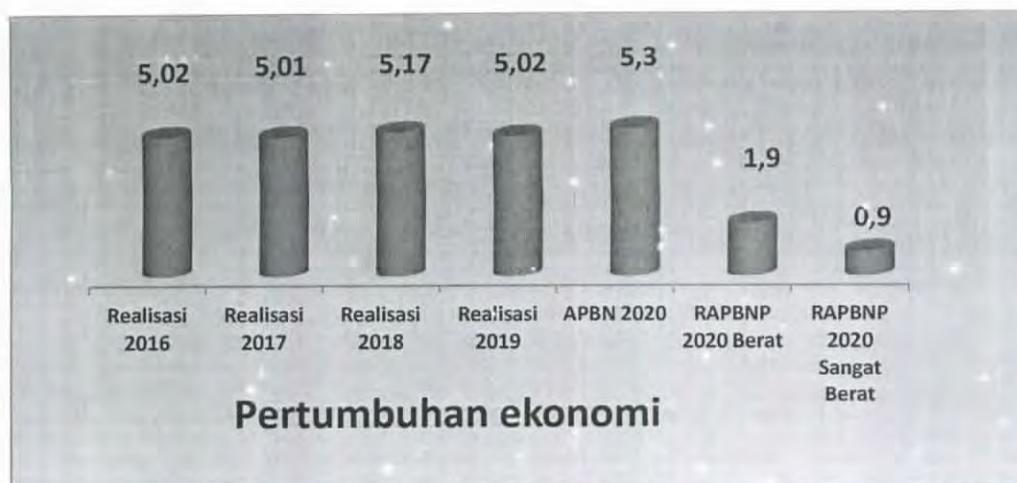
dipandang dapat merepresentasikan biaya penerbitan utang pemerintah secara lebih baik. suku bunga SBN 10 tahun juga digunakan sebagai salah satu indikator perkembangan pasar SBN. Untuk itulah pemilihan suku bunga obligasi negara (ON) 10 tahun sebagai asumsi makro ekonomi menggantikan SPN 3 bulan, terutama didasarkan pada fungsinya dalam perhitungan belanja bunga dalam APBN. Ringkasan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2020 termuat dalam RKP Nasional 2020 yang dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6 % berubah menjadi 0,9-1,9 %;
- b. Tingkat inflasi sebesar 2,0-4,0 % tidak mengalami perubahan yaitu 2,0-4,0 %;
- c. Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,0-5,5 % berubah menjadi berubah menjadi Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun yaitu 6,29-8,29%;
- d. Nilai Tukar Rupiah adalah Rp. 14.000-14.500/US\$ berubah menjadi 14.900-15.500/US\$;
- e. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US\$ 60-70 per barel berubah menjadi US\$ 30-35 per barel;
- f. *Lifting* minyak sebesar 695-840 ribu barel per hari berubah menjadi 695-725 ribu barel per hari;
- g. *Lifting* gas bumi 1.191-1.300 ribu barel setara minyak per hari berubah menjadi 990-1.050 ribu barel setara minyak per hari'

Tabel 2.1.
Proyeksi Asumsi Makro Nasional 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020	2020
	REALISASI	REALISASI	APBN	RAPBN-P
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,17	5,02	5,3-5,6	0,9-1,9
Inflasi (%)	3,13	2,72	2,0-4,0	2,0-4,0
Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	4,95	5,6	5,0-5,5	-
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	-	-	-	6,29-8,29
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.427	14.146	14.000-14.500	14.900-15.500
Harga Minyak (US\$/barel)	67,5	62	60-70	30-35
Lifting Minyak (ribu barel/hari)	776	741	695-840	695-725
Lifting Gas (ribu barel)	1.136	1.050	1.191-1.300	990-1.050

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020



Sumber : Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2016-2020

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksi ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun ini minus 3,8%. Rendahnya ekonomi tersebut imbas pandemi virus corona yang masuk Indonesia di pertengahan Maret 2020. Melihat pola pertumbuhan ekonomi, kuartal II menjadi yang paling dalam turunnya. Namun pada kuartal III-IV, ekonomi mulai kembali pulih. Rangkuman fakta-fakta menarik soal ekonomi Indonesia, apakah akan sampai resesi.

1. Minus 3,8%

Kementerian Keuangan kembali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2020 menjadi minus 3,8%. Semula Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi 3,1%. Menurut Kementerian Keuangan, di kuartal II-2020 Indonesia pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tekanan yang sangat tinggi. Mengingat sejumlah daerah yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah virus corona.

2. Kuartal II Jadi Kunci Ekonomi RI Tahun Ini

Kementerian Keuangan menambahkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun dan 2020 juga akan tergantung pada semester kedua ini. Artinya, pemulihan ekonomi di kuartal III dan IV akan menentukan perekonomian di tahun mendatang. Jadi kondisi apakah semester dua atau kuartal III dan kuartal IV, apakah kita sudah bisa pulih, sudah tertuang dalam postur APBN yang baru.

3. Kuartal II Jadi Pertumbuhan Ekonomi Paling Parah

Bank Indonesia mengatakan, polanya memang pada kuartal I pertumbuhan ekonomi tumbuh 2,97%, kemudian menurun di kuartal II dan kembali bangkit pada kuartal III dan IV. Seiring dengan pemberlakuan kebijakan pemerintah untuk masyarakat produktif dan aman dari Covid-19. Polanya memang kuartal II itu pertumbuhan ekonomi kecendrungan paling rendah sebelum secara perlahan meningkat di triwulan III dan IV.

4. Penyebab Anjloknya Ekonomi

Bank Indonesia mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan menurun pada triwulan II 2020, meskipun perkembangan terkini menunjukkan tekanan mulai berkurang. Melihat polanya, ekonomi RI pada kuartal II-2020 turun paling dalam. Ekspor menurun sejalan dengan kontraksi perekonomian global, sementara konsumsi rumah tangga dan investasi menurun sejalan dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengurangi aktivitas ekonomi.

5. Ekonomi Tahun Ini Tumbuh 0,9%-1,9%

Bank Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 berada di kisaran 0,9% sampai 1,9%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mulai membaik pada kuartal III-2020. Kuartal II turun cukup dalam kemudian secara perlahan meningkat di triwulan III maupun IV dengan perkembangan itu kami perkirakan untuk keseluruhan tahun pertumbuhan ekonomi (full year) kisarannya 0,9%-1,9%.

6. Pemulihan Ekonomi Jadi Harapan

Pemerintah telah menyiapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan covid-19 untuk mendorong perekonomian. Secara total, biaya yang dianggarkan Kementerian Keuangan untuk penanganan covid-19 mencapai Rp695,2 triliun.

Angka tersebut naik dari usulan semula, yakni Rp405,1 triliun. Nantinya biaya penanganan covid-19 mengubah struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara drastis.

3.1.2 Perubahan Laju Inflasi

Kota Madiun pada Maret 2020 terjadi inflasi sebesar 0,19 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 103,39. Dari delapan Kabupaten/Kota penghitung inflasi Nasional di Jawa Timur, 7 (tujuh) diantaranya mengalami inflasi dan 1 (satu) Kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Jember sebesar 0,34 persen dengan IHK sebesar 104,62. Inflasi terendah terjadi di Kota Surabaya sebesar 0,01 persen dengan IHK 104,26. Kota Malang adalah satu-satunya yang mengalami deflasi, yaitu sebesar 0,41 dengan IHK sebesar 102,86.

Inflasi di Kota Madiun terjadi karena adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen pada kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,68 persen, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,55 persen, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 0,34 persen, kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 0,29 persen, kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,14 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar lainnya sebesar 0,05 persen, kelompok Kesehatan dan kelompok Transportasi masing-masing sebesar 0,01 persen. Kelompok Pendidikan dan kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan tidak mengalami perubahan indeks. Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga mengalami deflasi sebesar 0,01 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender Maret 2020 dan inflasi tahun ke tahun (Maret 2020 terhadap Maret 2019) masing-masing sebesar 0,93 persen dan 2,30 persen.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari persentase perubahan IHK.

Inflasi di Kota Madiun terjadi karena adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen pada kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,68 persen, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,55 persen, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 0,34 persen, kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 0,29 persen, kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,14 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar lainnya sebesar 0,05 persen, kelompok Kesehatan dan kelompok Transportasi masing-masing sebesar 0,01 persen. Kelompok Pendidikan dan kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan tidak mengalami perubahan indeks. Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga mengalami deflasi sebesar 0,01 persen.

Kenaikan Indeks Harga Konsumen di Kota Madiun dipicu oleh naiknya harga pada beberapa komoditas yang dominan diantaranya : pisang, pepaya, jeruk, juice buah siap saji, beras dan gula pasir.

Berdasarkan kelompok komoditas, dari 11 (sebelas) kelompok yang ada, 8 (delapan) kelompok mengalami inflasi, 1 (satu) kelompok mengalami deflasi dan 2 (dua) kelompok tidak mengalami perubahan indeks. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau memberikan andil inflasi terbesar yaitu 0,0874 persen, disusul kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,0370 persen, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,0294 persen, kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,0137 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya dengan andil sebesar 0,0095 persen, kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 0,0066 persen, kelompok

Transportasi sebesar 0,0021, dan kelompok Kesehatan dengan andil sebesar 0,0005 persen. Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga menekan inflasi dengan andil sebesar 0,0007 persen. Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan dan kelompok Pendidikan dan tidak mengalami perubahan indeks.

Tabel 3.2.
IHK dan Tingkat Inflasi Kota Madiun Maret 2020, Tahun Kalender 2020, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran		IHK Maret 2019	IHK Desember 2019	IHK Maret 2020	% Perub Terhadap Februari 2020 *1)	Tahun Kalender 2020 *2)	Y O Y Tahun Ke Tahun 2020*3)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum (Headline)		101,07	102,44	103,399	0,19	0,93	2,30
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	101,03	103,29	107,47	0,34	4,05	6,37
2	Pakaian dan Alas Kaki	101,34	102,16	102,90	0,68	0,72	1,54
3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Lainnya	100,66	101,02	101,15	0,05	0,13	0,49
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	100,91	101,13	101,35	-0,01	0,22	0,44
5	Kesehatan	101,69	102,67	102,28	0,01	-0,38	0,59
6	Transportasi	100,39	103,13	101,87	-0,01	-1,42	1,28
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	100,22	98,39	97,33	0,00	-1,08	-2,88
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	108,29	108,90	109,17	0,29	0,25	0,81
9	Pendidikan	99,84	101,75	101,75	0,00	0,00	1,91
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	101,51	103,03	103,38	0,14	0,34	1,84
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	102,08	105,06	106,21	0,55	1,09	4,05

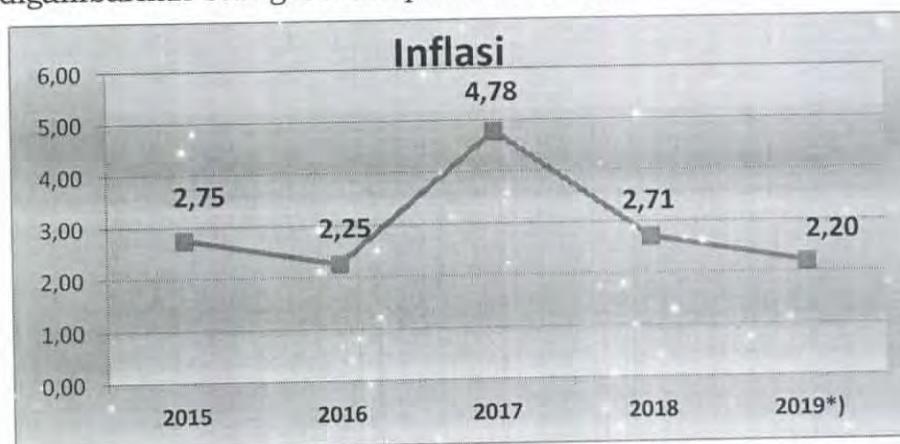
(1) Persentase perubahan IHK Maret 2020 terhadap IHK bulan sebelumnya

(2) Persentase Perubahan IHK Maret 2020 terhadap IHK Februari 2020

(3) Persentase perubahan IHK Maret 2020 terhadap IHK Februari 2020

Sumber : BPS Kota Madiun, 2020

Berdasarkan PDRB Kota Madiun, tingkat inflasi Kota Madiun tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,47 dibanding tahun 2018 yaitu dari 2,67% menjadi 2,20 %. Tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2015-2019 digambarkan sebagaimana pada tabel berikut.



Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

*) Angka Sementara

Gambar 3.2
Tingkat Inflasi Berdasarkan PDRB Kota Madiun Tahun 2015-2019 (%)

3.1.3 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai yang dihasilkan sektor usaha yang melakukan usahanya di suatu wilayah/regional. Dengan demikian PDRB secara agregat dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan /balas jasa terhadap faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Hal ini digunakan untuk melihat gejolak harga pada tahun berjalan dan perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun. Di bawah ini nilai PDRB Kota Madiun dihitung atas harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2019 dengan tahun dasar 2010.

Tabel. 3.3
Perbandingan Nilai PDRB Tahun 2019 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	ADHB*) (Milyar)	ADHK*) (Milyar)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	106,81	75,63
2	Pertambangan dan Penggalian	3,05	2,20
3	Industri Pengolahan	2.325,32	1.896,19
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,22	8,61
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	29,04	22,26
6	Konstruksi	834,71	647,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	3.702,62	2.515,13
8	Transportasi dan Pergudangan	499,01	330,99
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	707,63	554,24
10	Informasi dan Komunikasi	1.852,67	1.671,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.425,98	947,54
12	Real Estate	376,20	263,02
13	Jasa Perusahaan	98,17	77,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	438,16	323,38
15	Jasa Pendidikan	1.082,46	768,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	189,68	139,55
17	Jasa Lainnya	525,48	392,10
PDRB		14.108,21	10.623,81

Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2020

*) Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada tahun 2019 mencapai 5,81% atau mengalami penurunan sedikit dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,96%, karena dipengaruhi berbagai faktor perekonomian. Pertumbuhan terjadi pada seluruh sektor usaha, di mana sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 8,45 persen. Posisi berikutnya, diikuti Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 7,89 %. Kemudian, sektor Jasa Pendidikan sebesar 7,65 %. Dari kondisi tersebut ada beberapa sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Tabel. 3.4
Nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,58	1,31	-1,78	1,78	-0,94
2	Pertambangan dan Penggalian	1,98	1,91	2,31	1,07	2,41
3	Industri Pengolahan	6,49	7,21	8	7,01	4,64
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,28	3,86	4,91	5,45	6,69
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	2,58	3,82	6,84	4,44	4,52
6	Konstruksi	5,48	4,44	5,57	2,03	4,90
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	4,48	5,11	5,83	7,54	6,20
8	Transportasi dan Pergudangan	6,78	7,13	8,18	8,48	9,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,28	7,3	7,47	9,23	8,86
10	Informasi dan Komunikasi	8,13	6,64	6,77	5,34	4,58
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,52	7,11	3,88	4,08	4,79
12	Real Estate	6,76	5,64	4,22	3,57	5,96
13	Jasa Perusahaan	8,41	5,94	6,34	5,31	6,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,88	3,05	2,46	4,48	3,85
15	Jasa Pendidikan	6,3	5,14	4,5	4,21	7,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,35	5,85	5,93	7,38	7,52
17	Jasa Lainnya	4,28	4,17	4,14	5,74	6,92
PDRB		6,15	5,9	5,93	5,96	5,69

Sumber: BPSKotaMadiun, Tahun 2020

*) angka sementara

Tabel. 3.5
Prospek dan Prediksi Kinerja Pembangunan Kota Madiun

Indikator	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Real 2019*)	Proyeksi 2020 M	Proyeksi 2020 P
Pertumbuhan Ekonomi	5,90	5,93	5,96	5,81	6,02	2,65
PDRB ADHB (Milyar Rp)	11.077,47	12.140,20	13.190,40	14.208,21	12.463,82	14.365,82
PDRB ADHK (Milyar Rp)	8.916,29	9.486,00	9.488,07	10.635,46	10.257,44	10.754,61
PDRB per Kapita (Juta Rp)	63,69	68,9	74,31	79,70	76,53	80,74
TPT (%)	5,12	4,68	3,96	4,01	3,79	4,03
IPM	80,01	80,13	80,15	80,88	80,24	80,91
Inflasi (%)	2,25	4,78	2,11	2,2	4 ± 1	2 ± 1
Kemiskinan (%)	5,16	4,94	4,49	4,35	4,41	4,39

Proyeksi capaian kinerja tahun 2020 pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah direncanakan mengalami perubahan dari perencanaan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, hal ini disebabkan yang paling utama adalah adanya wabah Covid-19 yang sangat mempengaruhi baik di bidang kesehatan maupun ekonomi dan sosial. Dampak wabah Covid 19 ini tidak hanya di Kota Madiun, tapi berdampak secara nasional bahkan berdampak global.

Pemerintah pusat mengambil kebijakan dengan melakukan refocusing dan realokasi anggaran yang penggunaannya untuk menangani Covid 19 dengan tiga cluster yang terdiri dari Penanganan di bidang Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) serta pemulihan di bidang ekonomi (Recovery). Demikian juga di Kota Madiun maupun di Provinsi Jawa Timur juga melakukan refocusing dan realokasi anggaran yang dipergunakan untuk penanganan Covid 19.

3.1.4.Lain-lain asumsi

Beberapa asumsi lainnya yang menyebabkan Perubahan Asumsi dasar Perubahan RKPD Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

a. Yang menyebabkan perubahan pada sisi pendapatan yaitu sebagai berikut :

- Didapati adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp 223.580.475.124,05** setelah audit BPK dan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019, yang sebelumnya pada saat penyusunan APBD Tahun 2020 sebesar **Rp. 221.256.415.205,00**.
- Besaran Pendapatan Daerah yang telah tertuang dalam APBD tahun anggaran 2020, disusun berdasarkan prakiraan terhadap asumsi besaran pendapatan pada tahun anggaran sebelumnya. Sehingga diperlukan penyempurnaan untuk lebih merasionalisasi potensi pendapatan daerah yang sebenarnya, dengan berdasarkan realisasi yang telah berjalan beberapa bulan, yang pada akhirnya diharapkan akan dapat diperoleh besaran Pendapatan Daerah yang lebih riil sesuai dengan potensi yang ada.
- Telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, pada tanggal 25 Juni 2020 yang menyebabkan adanya perubahan pada dana transfer dari Pemerintah Pusat.
 - Dana Bagi Hasil Pajak yang sebelumnya sebesar Rp. 22.423.248.00,00 menjadi Rp. 24.444.091.000,00.
 - Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang sebelumnya sebesar Rp. 31.021.504.000,00 berubah menjadi Rp. 19.929.376.000,00.
 - Dana Bagi Hasil Cukai yang sebelumnya Rp. 13.927.277.000,00 menjadi Rp. 16.345.513.000,00.
 - Dana Alokasi Umum yang sebelumnya Rp. 527.916.797.000,00 berubah menjadi Rp. 476.135.673.000,00.

- Dana Alokasi Khusus yang sebelumnya 76.136.504.000,00 berubah menjadi Rp. 72.857.808.000,00.
- Telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, menyebabkan perubahan pada dana transfer Dana Insentif Daerah.
 - Dana Insentif Daerah yang sebelumnya Rp. 65.095.240.000,00 berubah menjadi Rp. 73.313.029.000,00.
- Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid 19 yang mengatur untuk dilakukan refocusing anggaran di masing-masing Kabupaten/Kota untuk fokus pada pemulihan ekonomi Pasca Pandemi Covid 19, penguatan jaring pengaman sosial dan peningkatan Pelayanan Kesehatan.
- Adanya Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun 2020.

b. Yang menyebabkan perubahan pada sisi belanja yaitu sebagai berikut :

- Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/215/2020 Tentang Pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan untuk Penanganan Covid-19

3.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak perlu dibayar kembali.

Tabel. 3.6
Pendapatan dan Perubahan Pendapatan

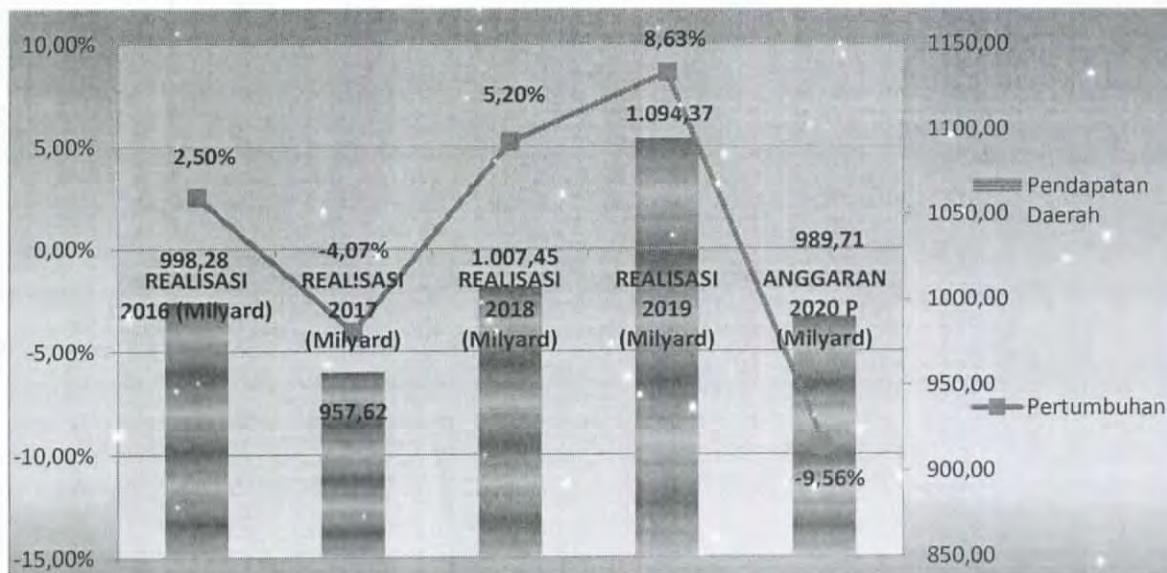
KODE	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	235.504.941.000,00	221.899.348.166,00	-13.605.592.834,00	-5,78%
1.1.1.	Pajak Daerah	85.000.000.000,00	76.350.000.000,00	-8.650.000.000,00	-10,18%
1.1.2.	Retribusi Daerah	18.762.439.600,00	15.008.623.740,00	-3.753.815.860,00	-20,01%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.934.446.400,00	15.092.455.426,00	158.009.026,00	1,06%
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	116.808.055.000,00	115.448.269.000,00	-1.359.786.000,00	-1,16%
1.2.	Dana Perimbangan	671.425.330.000,00	609.712.461.000,00	-61.712.869.000,00	-9,19%
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak	22.423.248.000,00	24.444.091.000,00	2.020.843.000,00	9,01%
	Bagi Hasil Bukan Pajak	31.021.504.000,00	19.929.376.000,00	-11.092.128.000,00	
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	527.916.797.000,00	476.135.673.000,00	-51.781.124.000,00	-9,81%
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	76.136.504.000,00	72.857.808.000,00	-3.278.696.000,00	-4,31%
1.2.4.	Dana Bagi Hasil Cukai	13.927.277.000,00	16.345.513.000,00	2.418.236.000,00	17,36%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	149.976.033.000,00	158.096.322.000,00	8.120.289.000,00	5,41%
1.3.1.	Pendapatan Hibah	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00	0,00	
1.3.2.	Pendapatan Darurat	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	64.366.614.000,00	64.366.614.000,00	0,00	0,00%
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	65.095.240.000,00	73.313.029.000,00	8.217.789.000,00	12,62%
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.114.579.000,00	1.017.079.000,00	-97.500.000,00	-8,75%
	Jumlah Pendapatan	1.056.906.304.000,00	989.708.131.166,00	-67.198.172.834,00	-6,36%

Sumber: BPKAD Kota Madiun

Dari tabel diatas nampak bahwa jenis pendapatan yang diproyeksi meningkat, menurun dan tetap adalah:

- Jenis pendapatan yang diproyeksi meningkat: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Dana Bagi Hasil Pajak dan DBH-CHT, serta Dana Penyesuaian Otonomi Khusus (DID)

- Jenis pendapatan yang diproyeksi menurun Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
- Jenis pendapatan yang diproyeksi tetap adalah Pendapatan Hibah dan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.



Gambar 3.3
Pendapatan Daerah Kota Madiun dan Pertumbuhannya

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah terletak pada potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan rumah tangga daerah pada tahun 2020 beserta dinamika yang terjadi didalam tahun berjalan. Potensi pendapatan daerah tersebut antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

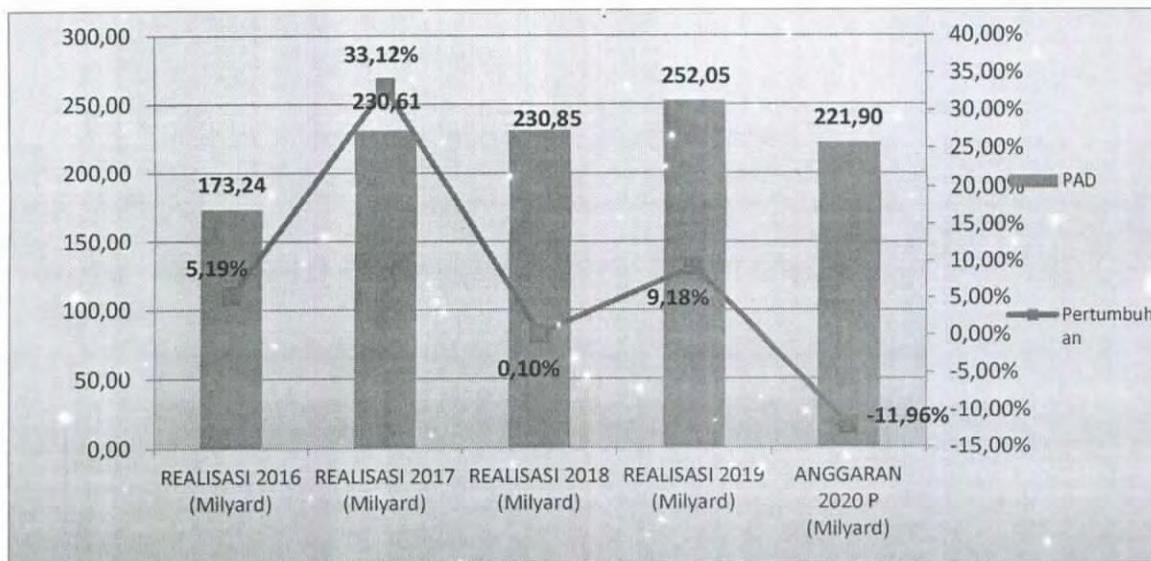
Disamping sumber-sumber penerimaan pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang menjadi hak daerah, maka Kota Madiun juga mampu secara bertahap mengoptimalkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari PAD sesuai dengan potensi riil yang ada, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang diberlakukan, serta tidak menjadi beban berat bagi wajib pajak ataupun wajib retribusi di Daerah.

Dengan adanya ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang salah satu tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan obyek pajak daerah dan retribusi daerah, serta kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

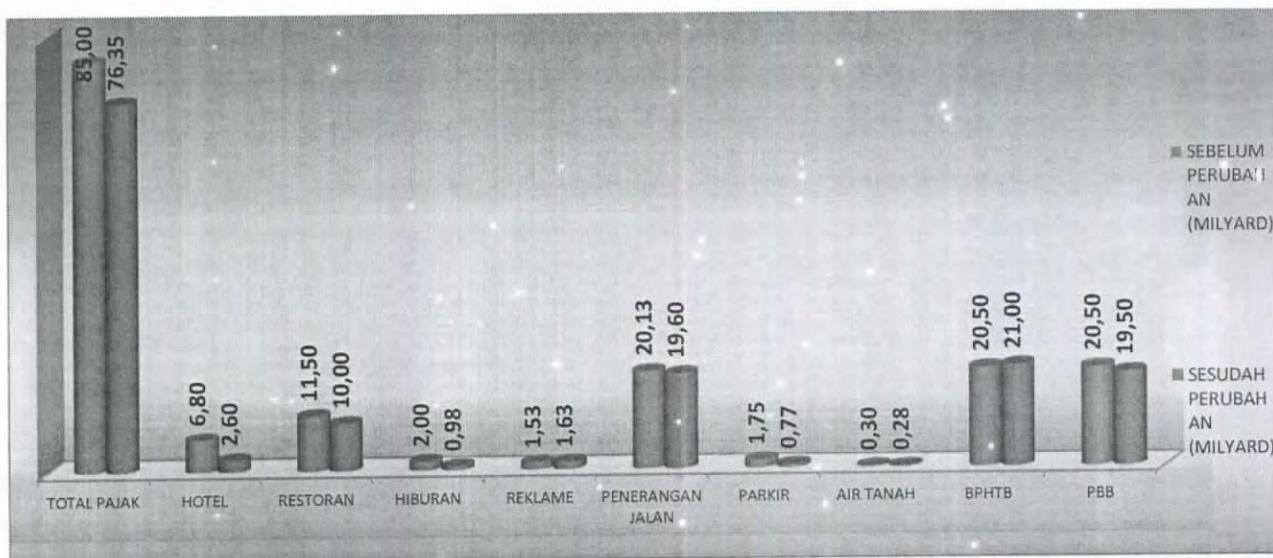
Pemerintah Kota Madiun telah berupaya melaksanakannya dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan mulai Tahun 2014 pelaksanaan pemungutan PBB sudah diserahkan ke daerah. Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD maupun efektifitas pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dari Dana Perimbangan yang terus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dan selanjutnya pada sisi pendayagunaannya dikelola secara proporsional dan profesional,

Adapun kebijakan yang dilaksanakan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah adalah, bahwa PAD sebagian didayagunakan untuk memenuhi Kedudukan Keuangan Walikota, Wakil Walikota dan DPRD, dan selebihnya direncanakan untuk membiayai Belanja Langsung yakni kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan PAD sampai akhir Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan mampu mencapai Rp. 221.899.348.166,00 yang artinya mengalami penurunan sebesar Rp. 13.605.592.834,00 atau mengalami penurunan sebesar 5,78 % dari target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 235.504.941.000,00. Hal ini terjadi karena adanya penurunan rencana pendapatan pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana karena adanya pandemi Covid 19 yang menyentuh semua sektor kehidupan tidak terkecuali di bidang ekonomi.



Gambar 3.4
PAD dan Pertumbuhannya



Gambar 3.5
Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan



Gambar 3.6
Penerimaan Retribusi Daerah Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan



Gambar 3.7
Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan

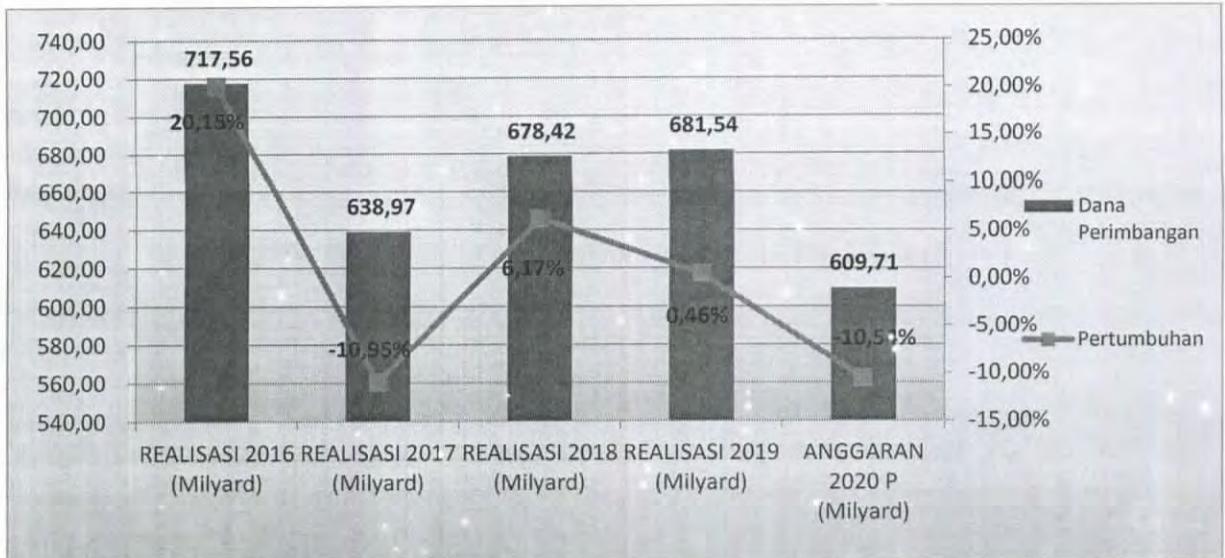


Gambar 3.8
Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah, yang dialokasikan berupa Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil Cukai.

Jumlah dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kota Madiun dan telah ditetapkan dalam APBD 2020 sampai dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD ini mengalami penurunan sebesar 9,19% atau berkurang sebesar Rp. 61.712.869.000,00 yaitu sebelum perubahan sebesar Rp.671.425.330.000,00 kemudian berkurang menjadi Rp. 609.712.461.000,00. Sama halnya di Pendapatan Asli Daerah penurunan Dana Perimbangan juga merupakan dampak dari pandemi Covid 19. Karena pendapatan negara berkurang maka dana transfer ke daerah juga berkurang.

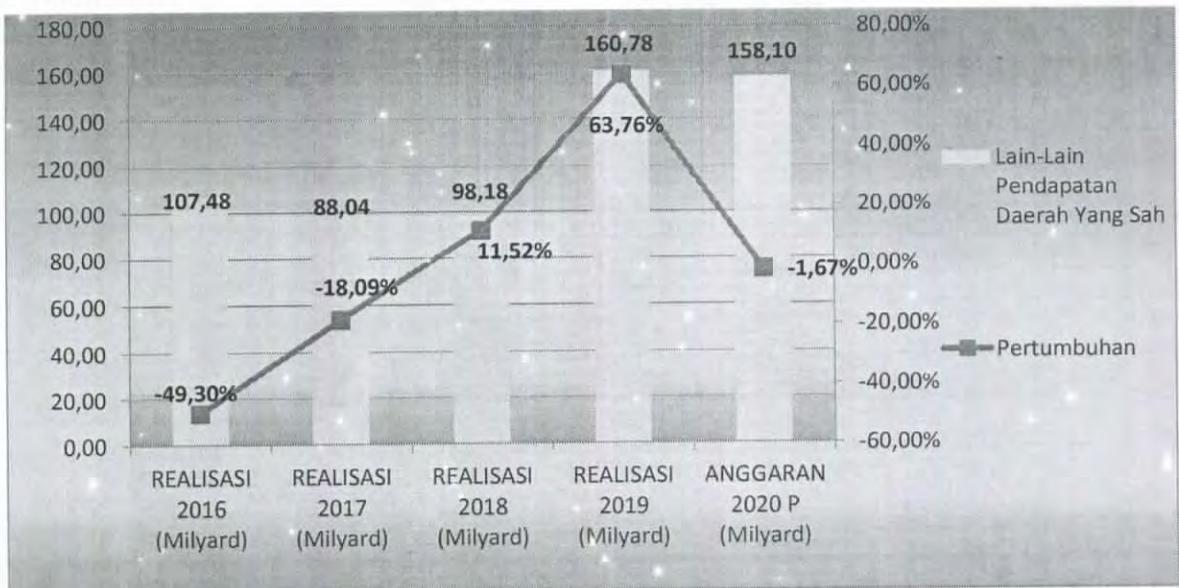


Gambar 3.9
Dana Perimbangan dan Pertumbuhannya

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu adanya penambahan sebesar Rp. 8.120.289.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 5,41% dari APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.149.976.003.000,00 menjadi Rp.158.096.322.000,00, kenaikan ini terjadi karena adanya penambahan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.



Gambar 3.10
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Pertumbuhannya

3.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Sebagai konsekuensi penerapan prinsip keadilan anggaran, maka rencana perubahan dilakukan dengan melakukan penambahan, pengurangan dan penggeseran kredit anggaran belanja daerah dengan tetap mengedepankan sistem belanja yang berbasis anggaran kinerja yakni suatu sistem anggaran belanja yang mengedepankan capaian hasil dari dana yang tersedia. Selanjutnya harus mampu mencerminkan pengeluaran-pengeluaran yang adil dan proporsional serta hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Penetapan rencana perubahan belanja daerah, pada umumnya diarahkan untuk menyempurnakan rencana kerja yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2020. Karena adanya faktor keterbatasan data, waktu serta alokasi dana yang ada, Rencana Kerja dimaksud belum dapat terakomodir dan belum sepenuhnya dapat dipenuhi penyediaan dananya.

Tabel. 3.7
Belanja dan Perubahan Belanja

KODE	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum, perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%
2.	BELANJA DAERAH				
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	464.944.240.577,00	557.911.386.873,05	92.967.146.296,05	20,00%
2.1.1.	Belanja Pegawai	424.570.731.577,00	427.499.431.842,56	2.928.700.265,56	0,69%
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.	Belanja Hibah	14.862.390.000,00	16.145.485.000,00	1.283.095.000,00	8,63%
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	21.248.848.000,00	21.045.508.000,00	-203.340.000,00	-0,96%
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik	700.062.000,00	700.062.000,00	0,00	0,00%
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	3.562.209.000,00	92.520.900.030,49	88.958.691.030,49	2497,29%
2.2.	BELANJA LANGSUNG	813.218.478.628,00	655.377.219.417,00	-157.841.259.211,00	-19,41%
2.2.1.	Belanja Pegawai	86.782.637.920,00	80.649.535.364,00	-6.133.102.556,00	-7,07%
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.432.411.684,00	335.767.856.458,00	-104.664.555.226,00	-23,76%
2.2.3.	Belanja Modal	286.003.429.024,00	238.959.827.595,00	-47.043.601.429,00	-16,45%
	JUMLAH BELANJA	1.278.162.719.205,00	1.213.288.606.290,05	-64.874.112.914,95	-5,08%
	SURPLUS / (DEFISIT)	-221.256.415.205,00	-(223.580.475.124,05)	-2.324.059.919,05	1,05%

Sumber: BPKAD Kota Madiun

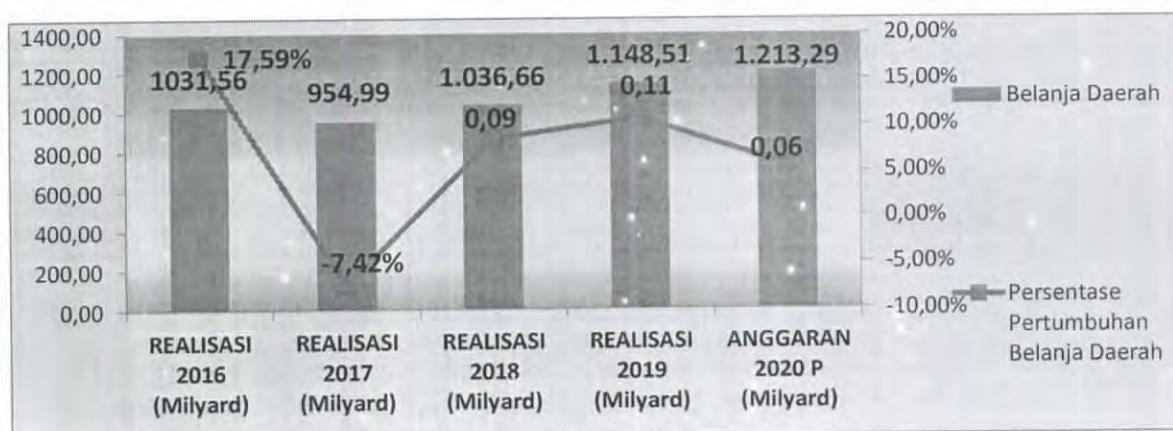
Perubahan kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terjadi pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung bertambah sebesar Rp. 92.967.146.296,05 atau mengalami kenaikan sebesar 20,00% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp. 464.944.240.577,00 menjadi Rp. 557.911.386.873,05. Bertambahnya Belanja Tidak Langsung paling besar terjadi pada Belanja Tidak Terduga serta ada penambahan pada Belanja Hibah dan Belanja Pegawai.

Belanja Langsung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp. 157.841.259.211,00 menunjukkan adanya penurunan yang mencapai -19,41 % dari APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 813.218.478.628,00 menjadi Rp.655.377.219.417,00. Penurunan Anggaran di Belanja Langsung disebabkan karena adanya kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menghadapi Pandemi Covid 19.

Tabel program prioritas yang akan didanai dalam APBD perubahan beserta target kinerjanya berdasarkan RPJMD, RKPD tahun 2020 dan Perubahan RKPD 2020 sebagai dasar perubahan anggaran, sebagai berikut.

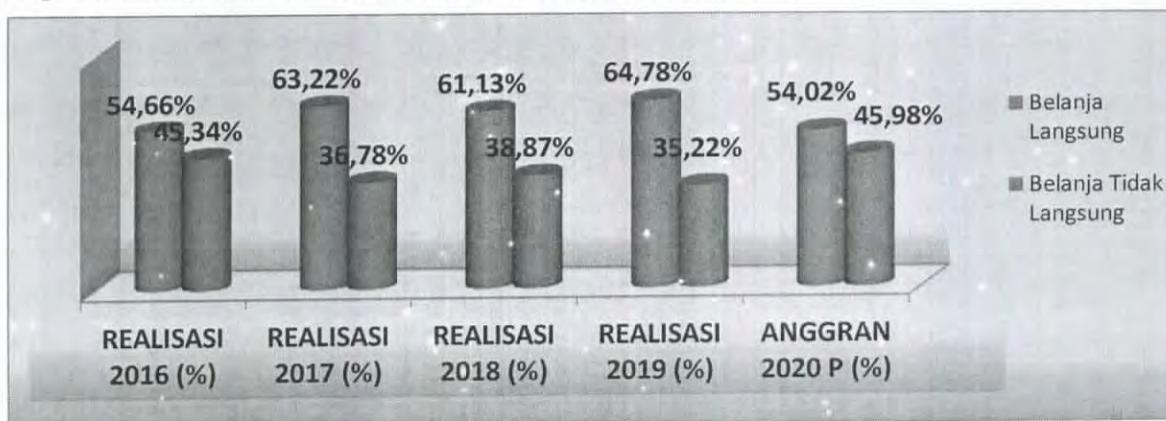
Tabel. 3.8
Sasaran Prioritas RPJMD, Prioritas Pembangunan RKPD 2020 dan Perubahan RKPD 2020

NO	SASARAN PRIORITAS (RPJMD)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH THN 2020 (RKPD)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH THN 2020 (PERUBAHAN RKPD)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, sarana transportasi kota dan Permukiman Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau
3	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif, dan peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
5	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat



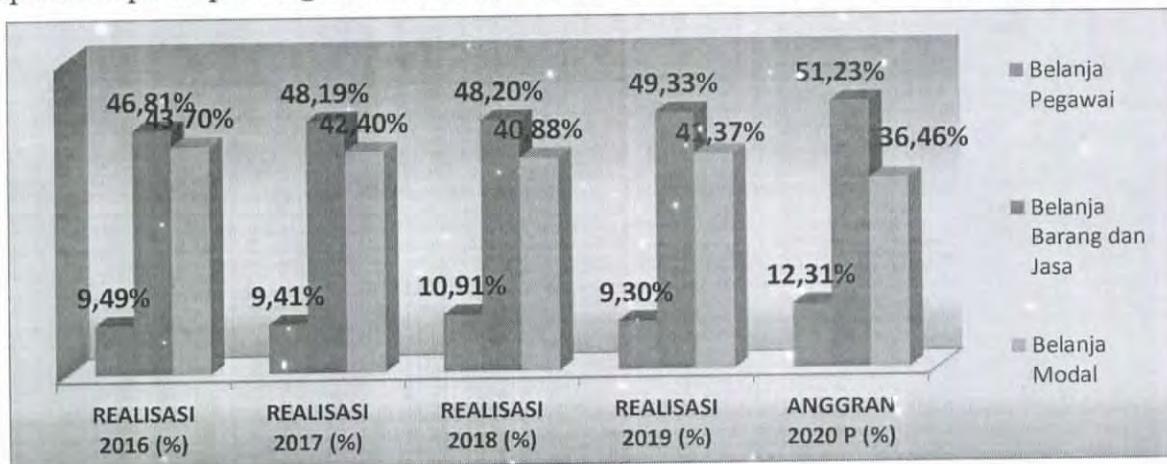
Gambar 3.11
Belanja Daerah dan Pertumbuhannya

Tren belanja daerah tahun 2020 dalam Perubahan RKPD mengalami kenaikan yang signifikan dimana belanja daerah dialokasikan mengalami kenaikan 0,06%, pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut menunjukkan perencanaan anggaran yang konsisten dengan tahun pemantapan pembangunan dan pencapaian target sesuai RPJMD 2019– 2024 di tahun terakhir.



Gambar 3.12
Komposisi Belanja Daerah

Komposisi belanja daerah antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung juga menunjukkan tren yang semakin baik, dimana tahun 2020 setelah perubahan komposisinya Belanja Tidak Langsung 45,98% ini berarti Belanja Langsung lebih dari 50%, yang berarti belanja publik lebih besar walaupun masih tetap fokus pada penanganan covid, yang di taruh Belanja Tidak Terduga (BTT).



Gambar 2.13
Komposisi Belanja Langsung

3.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan, merupakan bagian anggaran yang dipergunakan untuk mengadministrasikan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), yaitu untuk menampung “Transaksi Keuangan” guna menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran, apabila terjadi defisit anggaran, maka ditutup dengan pembiayaan yang bersumber dari obyek Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan pada sisi Penerimaan Pembiayaan dengan nomenklatur : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

(SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan apabila terjadi Surplus Anggaran, maka pemanfaatannya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sebagaimana Obyek Pengeluaran Pembiayaan yang dialokasikan pada sisi Pengeluaran Pembiayaan dengan nomenklatur : Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

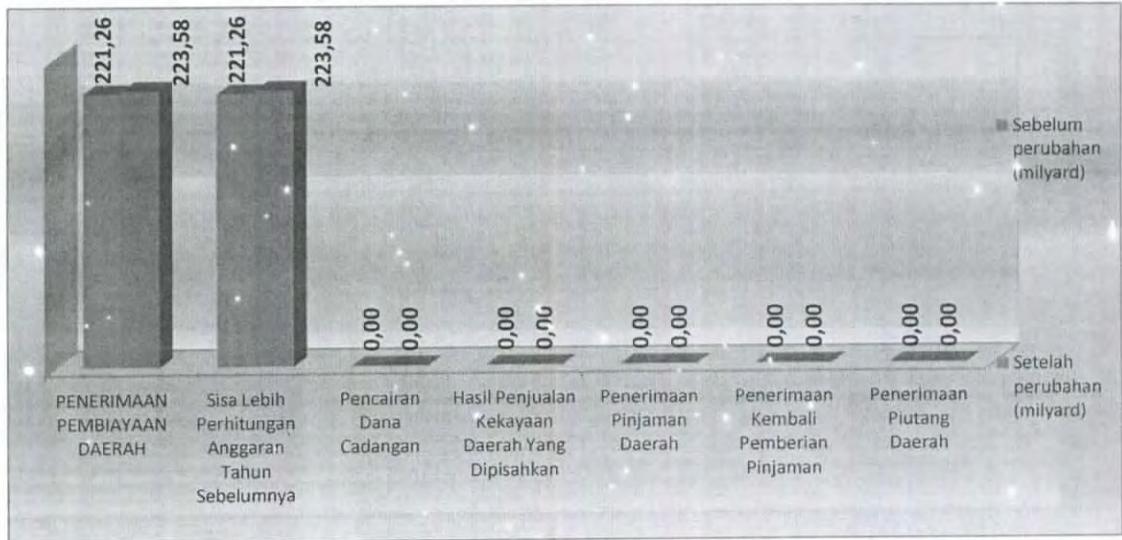
Tabel. 3.9
Pembiayaan dan Perubahan Pembiayaan

KOD E	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	221.256.415.205,00	223.580.475.124,05	2.324.059.919,05	1,05%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	221.256.415.205,00	223.580.475.124,05	2.324.059.919,05	1,05%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO	221.256.415.205,00	223.580.475.124,05	2.324.059.919,05	1,05%
	SILPA	0,00	0,00	0,00	

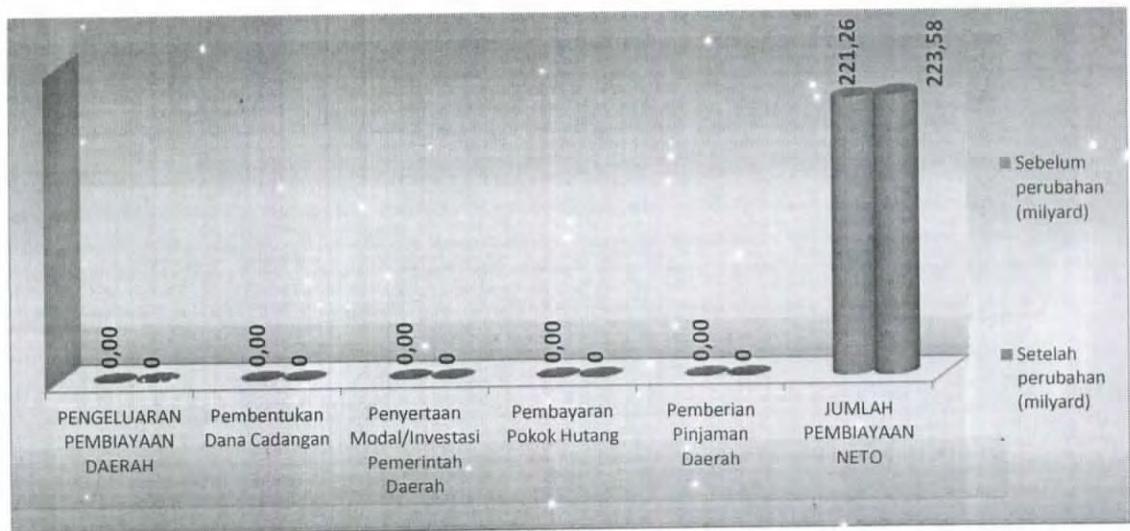
Sumber: BPKAD Kota Madiun

Untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan Keuangan Daerah yang tertuang dalam APBD beserta perubahannya, maka dari sisi Kebijakan Pembiayaan akandiarahkan untuk menutup defisit anggaran antara Pendapatan dan Belanja Daerah, penyertaan modal serta pembayaran hutang. Dari sisi Penerimaan Pembiayaan, diarahkan untuk mendayagunakan sepenuhnya SiLPA tahun anggaran 2019 untuk menutup defisit anggaran. Kebijakan yang dilakukan diupayakan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan keuangan daerah dengan kemampuan keuangan daerah yang ada dan tidak mencari dana dari luar, seperti pinjaman atau yang lainnya.

Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2020 yang diperoleh dari SiLPA tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 221.256.415.205,00 setelah dilakukan perhitungan maka terdapat SiLPA Rp. 223.580.475.124,05 yang akan digunakan untuk menutup defisit.



Gambar 3.14
Penerimaan Pembiayaan Daerah Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan



Gambar 3.15
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan

BAB IV
SASARAN PRIORITAS

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2024 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi adanya perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2020, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk tahun 2020 disusun fokus pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan Perubahan APBD tahun 2020. Fokus pembangunan daerah yang tercakup dalam Perubahan RKPD ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam perubahan anggaran dalam rangka mewujudkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020, serta dalam rangka menangani dan menanggulangi wabah Covid 19.

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan berkaitan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ;

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Berkualitas Baik		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		80,91	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Kesehatan	0,81	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100%
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	89,84%
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	Persentase Penyediaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	89,84%
				Persentase Penduduk Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	96%
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kesehatan Masyarakat yang Sesuai Standart	25%

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Berkualitas Baik		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		80,91	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
			Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Luar Biasa	5%
			Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	48,27%
			Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	42,74%
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pengetahuan	0,77	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengolahan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100%
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Lulus Pelatihan	100%
			Program Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	100%
			Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	100%
			Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Lembaga Non Formal yang Terakreditasi	90 lembaga
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Bahan Pustaka Yang Dipinjam	22.750 eksemplar

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan		Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)		80,73	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Sarana Transportasi Kota dan Permukiman	Indeks Sarana-Prasarana Permukiman	86,62	Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	Persentase Rumah Tinggal Layak Huni dan Bersanitasi	99,30
			Indeks Infrastruktur	96	Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota
	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik	94%		
	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air tidak Tersumbat	91,00%		

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET
Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan		Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)			80,73
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
			Program Pengendalian Banjir	Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ Tergenang	12 titik
	Kinerja Ruas Jalan	0,44	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas	80%
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum	539.916 orang
Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	100	Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman	Persentase RTH dan Penerangan Jalan Lingkungan yang dikelola	72,00%
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100%
			Program Pelayanan Pertanahan	Persentase Pelayanan Pertanahan	100%
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,04	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Persentase data dan informasi SDA dan lingkungan hidup yang tersedia	64,10%
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah sample yang memenuhi baku mutu	47%
			Program Pnaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	12,25%
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	75%

3. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Laju Pertumbuhan PDRB			6,01
		PDRB Perkapita			76,53
		Angka Kemiskinan			4,39
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,8	Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenaga Kerjaan	Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	98%

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET					
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Laju Pertumbuhan PDRB		6,01					
		PDRB Perkapita		76,53					
		Angka Kemiskinan		4,39					
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				
				Persentase perusahaan yang menerapkan program BPJS	60,25%				
				Persentase tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan dari PBID	86%				
				Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	79%			
					Persentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi dasar	98%			
				Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan	Persentase Lulusan Pelatihan yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Nasional	98%			
				Program Ketransmigrasian	Persentase pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	80%			
				ICOR	2,55	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase investor yang merealisasikan investasi	10%	
						Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase pengaduan pelayanan perizinan	0,90%	
						Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi	2%	
						Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bidang Cukai Yang Dilaksanakan	100%	
						Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi	Persentase Kelompok Sosial Ekonomi yang difasilitasi	100%	
				SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
				Meningkatnya Pertumbuhan	Pertumbuhan Sektor	7,30	Program Pengembangan	Persentase IKM yang	17,09%

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Laju Pertumbuhan PDRB		6,01	
		PDRB Perkapita		76,53	
		Angka Kemiskinan		4,39	
SASAPAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Sektor Unggulan Daerah	Pengolahan		Industri Kecil Menengah	Berstandart	
			Program Pembinaan Industri	Persentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)	80%
	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5,91	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Non Pasar Rakyat	0,5%
			Program Pengelolaan Pasar Rakyat	Jumlah Omset Pasar Rakyat	3.058.917 Juta (Rp)
			Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal	Jumlah Barang Kena Cukai Illegal	0
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	96,77%
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0,41%
	Pertumbuhan Sektor Pariwisata	8,70	Program Pengembangan Pem asaran Dan Destinasi Pariwisata	Jumlah Promosi dan Peningkatan Sumberdaya Pariwisata	8 kali
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM		
Stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	0,33	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	100%
			Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%
	Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan	1,03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,6
			Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan	1%
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Produktivitas Pertanian	7,21

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Laju Pertumbuhan PDRB		6,01	
		PDRB Perkapita		76,53	
		Angka Kemiskinan		4,39	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
			Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan	2%

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan ;

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi		B	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Sangat Tinggi (3.1000)	Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	Persentase Hasil Penelitian/ Kajian yang dapat sebagai dasar perencanaan dan atau diimplementasikan	100%
			Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumentasinya sesuai Ketentuannya	100%
				Persentase Pemerintah Kota yang capaian kinerjanya lebih dari 80%	100%
			Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Capaian target program pembangunan bidang eksosbud	100%
			Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota	Persentase Capaian target program pembangunan bidang fispras	100%
			Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100%
			Program Fasilitasi Kesejahteraan PNS	Persentase Penyelesaian SK Terkait Kesejahteraan PNS	100%
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pengembangan dan Pembinaan Aparatur	100%
			Program Penataan Aparatur	Persentase Realisasi Penempatan PNS	100%

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET			
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi			B			
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET			
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase Pendidikan Aparatur Terealisasi	100%			
			Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan	100%			
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan	100%			
			Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Dokumen Pertanggung jawaban kepala Daerah yang tepat syarat	6 dokumen			
			Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Jumlah Perjanjian Kerjasama	5 kerja sama			
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum yang Berkualitas	100%			
			Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3,16 (baik)	Program Penyelenggaraan Pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Persentase PD yang mengimple mentasikan keamanan keamanan Informasi	25%	
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	35%		
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase sasaran penyebaran informasi publik	80%		
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Data Statistik Sektor yang Terintegrasi	75%		
				Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	Jumlah Berkas Arsip Yang Dikelola	56.300 berkas		
				Program Sosialisasi di Bidang Cukai	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai	100%		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Nilai Kinerja PenyelenggaraPe layanan Publik	2,55 (cukup)

TUJUAN		INDIKATOR			TARGET
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi			B
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
			Program Layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	80
			Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	82%
			Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	92%
			Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan	Persentase Uptime SIAK Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99%
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB (70,01)	Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK	WTP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	25%
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat	100%
			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	100%
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	100%

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi		B	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi Pengelolaan Aset Terhadap PAD	4.427.616.067
			Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Basis Data Pajak Daerah	100%
			Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	1,5%
			Program Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	100%
			Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada	14,81% (4 kel.)	Program Dana Kelurahan	Indeks perkembangan kelurahan	0,81%
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Peserta yang Memberikan Usulan	10%
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,25	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	13,32%

5. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET	
Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif		Indeks Ketentraman		75	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Prestasi Pemuda dan Olah Raga ditingkat regional dan nasional	33	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah Pemuda Berprestasi	16 orang
				Jumlah Atlit yang ikut Kejuaran di Tingkat Provinsi	189 orang
	Indeks Kerukunan	2,77 (tinggi)	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kekayaan Budaya yang di Bina	35%
				Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi
			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan	Cakupan Pembinaan wasbang	100%

TUJUAN		INDIKATOR		TARGET
Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif		Indeks Ketentraman		75
			Kebangsaan	
			Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial	Konflik Horizontal di dalam Masyarakat 0 konflik
			Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas	Persentase Parpol dan Orkesmas yang Memahami Regulasi 100%
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman	76	Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase Penegakan Perda 100%
			Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) 100%
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota 1.3 orang setiap RT
			Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>) 100%
			Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Penanggulangan Korban Bencana 100%
				Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecakupan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 100%
			Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindak lanjuti 100%

Dari target yang terpasang dalam RKPD Tahun 2020 terdapat 4 target yang berubah pada RKPD-P tahun 2020 karena kondisi Covid-19 diantaranya :

1. Angka Kemiskinan target awal pada RKPD 4,47 menjadi 4,39 pada RKPD-P (ini terjadi karena realisasi target tahun 2019 adalah 4,35 sehingga rentang terlalu jauh dari target 2020, walaupun kemungkinan besar target awal akan tercapai karena kondisi saat ini)
2. Indeks Pembangunan Manusia target awal pada RKPD 80,51 menjadi 80,91 pada RKPD-P (ini terjadi karena realisasi target tahun 2019 adalah 80,88 sehingga diharapkan pada Tahun 2020 akan naik dari Tahun 2019 walaupun kondisi yang terjadi saat ini tidak menentu)
3. Tingkat Inflasi target awal pada RKPD 4% menjadi 2% pada RKPD-P (ini terjadi karena realisasi target tahun 2019 adalah 2% sehingga rentang terlalu jauh dari target 2020, walaupun kemungkinan besar target awal akan tercapai karena kondisi saat ini)
4. Indeks Gini target awal pada RKPD 0,35 menjadi 0,33 pada RKPD-P (ini terjadi karena realisasi target tahun 2019 adalah 0,33 sehingga rentang terlalu jauh dari target 2020, walaupun kemungkinan besar target awal akan tercapai karena kondisi saat ini)

Tabel 4.2
Persandingan Tema dan Prioritas 2020 Provinsi Jawa Timur dengan Kota Madiun

NO	RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP PUSAT) TAHUN 2020		RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MADIUN TAHUN 2020
	Tema	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS	PENGUATAN KAPASITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS
1	PRIORITAS	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
2	PRIORITAS	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau
3	PRIORITAS	Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
4	PRIORITAS	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau
5	PRIORITAS	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

BAB V

RENCANA KERJA PERUBAHAN

Perubahan rencana kerja terjadi baik di belanja langsung maupun belanja tidak langsung dalam rangka pencapaian keenam prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020 dan sekaligus dalam rangka pencapaian target yang ada di RPJMD Tahun pertama.

5.1 Rencana Perubahan Belanja Langsung

Rencana perubahan belanja langsung dijabarkan ke dalam program dan kegiatan serta pagu indikatifnya per prioritas seperti dalam tabel berikut

: